

PERNIAGAAN REMPAH

DI PERAIRAN TIMUR DAN TIMUR LAUT
KALIMANTAN

ABAD XVI DAN XVII



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

Juniar Purba
Yusri Darmadi
Pengantar: Didik Pradjoko

PERNIAGAAN REMPAH

DI PERAIRAN TIMUR DAN TIMUR LAUT
KALIMANTAN

ABAD XVI DAN XVII



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

PERNIAGAAN REMPAH

DI PERAIRAN TIMUR DAN TIMUR LAUT
KALIMANTAN

ABAD XVI DAN XVII



Juniar Purba
Yusri Darmadi
Pengantar: Didik Pradjoko

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

mja
Media Jaya Abadi

**Perniagaan Rempah di Perairan Timur dan Timur Laut Kalimantan
Abad XVI dan XVII**

Penulis:

Juniar Purba
Yusri Darmadi

Pengantar:
Didik Pradjoko

Editor:
Izzudin Irsam Mujib & Asep Ruhimat

Desain Sampul dan Tata Letak:
Yuda A. Setiadi

Keterangan Gambar Sampul:
Deskripsi: *Asie jihovýchodní*
Kreator: Visscher, Nicolaus
Penerbit: per Nicolaum Visscher 1640-1679
Inset: Kapal Galeon dan Rempah-rempah

Cetakan pertama, Februari 2022
ISBN: 978-623-7526-58-2

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Redaksi:

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

*Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit*

Isi di luar tanggung jawab penerbit

B O R N E O

Willems bande

Cyfa Erava

Porto Tuba

Costa de S. Antonio

Arre Giffons band



C E

Cellebus

M. Maraja

o. Pagan

M. Hater

M. Pagan

B E

DAFTAR ISI



VII DAFTAR GAMBAR

IX KATA PENGANTAR

XIII UCAPAN TERIMA KASIH

1 BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG—1

B. PERMASALAHAN—8

C. BATASAN PENELITIAN—9

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN—11

E. KAJIAN SUMBER—12

F. KONSEPSI—14

G. METODOLOGI—16

H. SISTEMATIKA LAPORAN—19

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

21 BAB 2 PERAIRAN KALIMANTAN SEBELUM KEDATANGAN BANGSA BARAT

A. DOMINASI KUTAI—22

B. PERDAGANGAN DAN PELAYARAN AWAL—32

C. KEKUATAN TRANSNASIONAL—42

53 BAB 3 PERAIRAN KALIMANTAN DI ERA PORTUGIS

A. DOMINASI MALAKA-MALUKU OLEH PORTUGIS—54

B. PELAYARAN DI KALIMANTAN—64

C. PEROMPIKAN LAUT—74


- 85** BAB 4 AKHIR JALUR REMPAH UTARA
A. HEGEMONI VOC—86
B. VOC DI KALIMANTAN TIMUR—97
C. DINAMIKA BARU—107
- 117** BAB 5 PENUTUP
- 123** DAFTAR PUSTAKA
- 139** TENTANG PENULIS



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



DAFTAR GAMBAR

- 
- 3** Gambar 1.1 Evolusi kapal di Sulawesi Selatan
- 23** Gambar 2.1 Prasasti Yupa Nomor Inventaris D2A, D2B, D2C, D2D
- 24** Gambar 2.2 Situs Lesong Batu di Muara Kaman
- 49** Gambar 2.3 Kaisar Kang Xi (1654–1722) dan kapal jung Cina
- 52** Gambar 2.4 Makam Habib Hasim bin Musaiyah (Tunggang Parangan)
- 56** Gambar 3.1 Lokasi-lokasi utama di Kalimantan pada abad XV dan XVI
-
- 65** Gambar 3.2 Peta Perjalanan Tome Pires
- 77** Gambar 3.3 Bajak laut Sulu membawa pedang *kampeli*, tombak, dan keris.
- 80** Gambar 3.4 Sungai Undap di Peta Boelangan tahun 1891
- 103** Gambar 4.1 Lingkup pengaruh Makassar sebelum 1669

MURI HANDA



Bala Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

The background of the page features a faded historical map of Southeast Asia, showing the Malay Peninsula, Sumatra, and the Indonesian archipelago. A large blue watermark logo of Tut Wuri Handayani is centered over the map. The logo consists of a stylized hand holding a torch, with the text 'TUT WURI HANDAYANI' written in a circular path around it. In the top right corner, there is a small illustration of a three-masted sailing ship.

KATA PENGANTAR

Kajian sejarah abad ke-16 Masehi merupakan periode yang menarik dalam dinamika politik-ekonomi dan budaya di Kepulauan Nusantara. Selama ini kajian dalam periode ini kurang mendapat perhatian oleh para sejarawan, kecuali para sejarawan yang tertarik dengan sejarah maritim atau masa kurun niaga. Periode ini merupakan periode transisi yang ditandai dengan puncak zaman perniagaan yang melibatkan para pedagang Nusantara, pedagang asing Asia dan para penghasil komoditas perdagangan terutama rempah-rempah, seperti lada, pala, cengkih, dan bunga pala.

Selain itu banyak komoditas lainnya sebagai hasil hutan, hasil laut, dan hasil tambang, seperti kapur barus, kayu gaharu, kemenyan, kayu cendana, lilin lebah, teripang, mutiara, emas, dan timah, yang juga menarik para pedagang dari mancanegara datang ke perairan Nusantara. Pada saat yang sama pada awal abad ke-16 ini, kapal-kapal dagang Eropa yaitu orang Portugis mulai berdatangan ke kawasan Nusantara, dan bahkan pada tahun 1511 merebut Bandar Malaka sebagai pelabuhan besar di kawasan Asia Tenggara pada masanya.

Masuknya bangsa Portugis dalam rangka mencari rempah-rempah di Nusantara dan pada akhirnya berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah mendapatkan reaksi dari para raja dan sultan yang berkuasa di Nusantara, mulai dari Kesultanan Aceh, Demak, Johor, Ternate, Tidore dan juga Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar). Kapal-kapal Spanyol juga memasuki Maluku dari arah Filipina sejak 1521 dan hadir di Tidore, meski kemudian kekuatan Spanyol ini kurang dominan dibandingkan dengan Portugis. Proses penguasaan Malaka dan Maluku

oleh Portugis dan reaksi yang muncul setelahnya mewarnai konstelasi politik dan ekonomi kawasan tersebut sampai akhir abad ke-16, seperti yang diulas oleh P.A. Tiele dalam tulisannya "De Europeers in den Maleischen Archipel" (*Bijdragen Koninklijk Instituut*, vol. 28, 1880 dan vol. 29, 1881).

Sementara itu, pada abad ke-17 M dinamika sejarah sosial-politik dan ekonomi Nusantara masih diwarnai oleh dunia perniagaan yang mulai didominasi oleh kekuatan Eropa (Portugis dan Spanyol) sejak abad ke-16. Menginjak abad ke-17, dominasi kekuatan pedagang dan politik orang-orang Belanda mengancam kekuatan Portugis dan Spanyol di Maluku. Pada tahun 1605, benteng Portugis di Ambon direbut oleh Perhimpunan Dagang Hindia Timur (VOC), kemudian disusul kejatuhan Malaka pada tahun 1641 juga akibat serangan armada laut VOC. Dominasi VOC juga mengancam eksistensi perdagangan kekuatan kerajaan pribumi di Nusantara, seperti halnya Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo) yang menolak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, bahkan memblokir jalur pelayaran di kawasan Laut Banda yang menjadi akses menuju Maluku (Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan).

Para pedagang Makassar berusaha melawan dominasi tersebut dengan melakukan perdagangan gelap rempah-rempah dengan menggunakan jalur Selat Makassar-Laut Sulawesi-Laut Maluku untuk mencapai daerah penghasil rempah-rempah di Maluku Utara. Sudah tentu upaya ini berhasil mengacaukan monopoli perdagangan rempah yang dilakukan oleh VOC, bahkan VOC mengalami kerugian karena Bandar Somba Opu di Makassar banyak dikunjungi kapal-kapal dagang asing dari Eropa (Inggris, Perancis, dan Denmark) dan juga para pedagang dari Arab, India, dan Cina. Pada saat itu Bandar Somba Opu merupakan bandar bebas yang menjual rempah-rempah dengan harga yang lebih murah.

Upaya VOC untuk mengakhiri perang dagang ini dilakukan melalui ekspedisi militer untuk menaklukkan Makassar sehingga meletuslah Perang Makassar antara 1666–1669, yang berakhir dengan kekalahan Kesultanan Makassar. Penggunaan jalur pelayaran Selat Makassar-Laut Sulawesi-Laut Maluku sebagai upaya para pedagang Makassar melawan dominasi monopoli VOC patut dicermati. Dengan kemampuan navigasi pelayarannya para pelaut dan pedagang Makassar telah memanfaatkan kawasan perairan yang belum menjadi rute umum pelayaran pada masanya. Upaya ini menjadi sangat menarik dicermati dalam penulisan

sejarah maritim Indonesia, seperti yang ditulis oleh A.B. Lopian dalam "Perebutan Samudra: Laut Sulawesi pada Abad XVI dan XVII" (*Prisma* 11, 1984)

Kemudian, terkait dinamika pelayaran dan perdagangan di kawasan zona komersial maritim di kawasan Asia Tenggara yang telah muncul sejak masa awal abad Masehi yang merupakan hasil temuan riset Kenneth R. Hall dalam bukunya *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (1985) patut juga dicermati. Dalam temuannya tersebut Hall selain menyebut Kawasan Teluk Benggala, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa juga menyebut Laut Sulu yang berdekatan dengan kawasan utara Selat Makassar dan sebelah utara Laut Sulawesi. Keramaian pelayaran dan perdagangan di berbagai zona komersial maritim tersebut menarik untuk dibicarakan, terutama di kawasan yang berbatasan dengan zona Laut Sulu, yaitu kawasan Selat Makassar yang melingkupi wilayah perairan sebelah timur Sulawesi bagian selatan, barat, dan tengah, juga melingkupi sebagian besar pesisir timur Pulau Kalimantan. Sementara itu, Laut Sulawesi melingkupi kawasan sebelah utara Sulawesi Utara dan sebelah timur dan timur laut Kalimantan Utara, termasuk wilayah Sabah (Malaysia).

Dinamika pelayaran dan perdagangan di kawasan yang disebutkan terakhir kurang banyak diekspos atau ditulis oleh para sejarawan maritim, kecuali segelintir sejarawan semisal A.B. Lopian dalam bukunya *Orang Laut Bajak Laut dan Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (2009) dan juga James Francis Warren "The Sulu Zone: Commerce and Evolution of a Multi-Ethnic Polity, 1768-1898" (*Archipel* 18, 1979), juga karya-karya Warren lainnya tentang sejarah kawasan kepulauan di Filipina Selatan.

Dengan memperhatikan pentingnya kajian sejarah pelayaran dan perdagangan di kawasan perairan Kalimantan bagian utara, bagian timur laut dan timur Pulau Kalimantan menjadi mutlak diperlukan untuk memberikan narasi dan cerita tentang peran pedagang lokal, pedagang Nusantara, dan pedagang asing Asia dan Eropa yang beraktivitas di kawasan tersebut. Saya menyambut baik buku-buku dengan topik-topik tersebut diterbitkan sehingga dapat dibaca oleh para pembaca, baik masyarakat Indonesia secara umum maupun masyarakat Kalimantan dan Sulawesi khususnya. Dengan demikian, akan memberikan peran Pulau Kalimantan baik sebagai dari penghasil komoditas perdagangan maupun juga sebagai wilayah transit pelayaran dan perdagangan.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini yang membahas dinamika pelayaran, perdagangan, dan perkapalan di kawasan timur laut dan timur Kalimantan sejak abad ke-16 dan abad ke-17 sebagai sumbangan terhadap historiografi sejarah maritim Indonesia yang menekankan kawasan perairan sekitar Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi. Dengan terbitnya buku, ini akan semakin terkuak dinamika pelayaran, jalur pelayaran, dan perdagangan sebelum kedatangan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) hingga era menguatnya dominasi orang Eropa terhadap pelayaran dan perdagangan di kawasan Hindia Timur atau Nusantara.

Semoga buku ini dapat semakin memperjelas sejarah Indonesia pada abad ke-16 dan abad ke-17 yang sebelumnya remang-remang. Dengan demikian, buku ini telah berhasil menerangi masa lampau menjadi lebih terang benderang lagi, sehingga kita semua dapat mengambil manfaat dan juga sebagai refleksi menatap ke masa depan, terutama bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Kalimantan dan pulau-pulau sekitarnya. Semoga.

Jakarta, Desember 2021

Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Dr. Didik Pradjoko, M.Hum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, atas berkah dan rahmat-Nya, penulisan sejarah yang berjudul *Perniagaan Rempah di Perairan Timur dan Timur Laut Kalimantan Abad XVI dan XVII* dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu. Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat tahun anggaran 2021.

Kegiatan penulisan ini dilakukan untuk menghimpun dan mendokumentasikan bahwa perairan Pulau Kalimantan berperan penting pada abad-abad sebelumnya sebagai jalur perkapalan dan perdagangan yang menyinggahi beberapa tempat hingga ke bagian timur laut Pulau Kalimantan.

Buku *Perniagaan Rempah di Perairan Timur dan Timur Laut Kalimantan Abad XVI dan XVII* ini dapat terwujud dengan adanya kerja sama dan arahan dari Kepala BPNB Kalimantan Barat, Dr. Didik Pradjoko, M.Hum. selaku narasumber dalam seminar awal dan seminar hasil, Bapak Hayat, Bapak Yusuf, Bapak Dr. Muslimin A.R. Effendy, Ibu Dr. Aji Eka Qomara Yulianti Dewi Hakim, Ibu Yekti Utami, S.Sen., M.Pd., Bapak Drs. Zularfi dan narasumber serta informan lain juga rekan-rekan peneliti BPNB dan rekan lainnya yang tidak kami sebutkan. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini, kami ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. *Tiada gading yang tak retak*, demikian bunyi pepatah. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik dari pembaca sangat bermanfaat

guna sepenuhnya tulisan ini. Harapan kami, semoga hasil tulisan ini dapat menambah khazanah kesejarahan dan budaya serta membawa manfaat bagi kita.

Pontianak, Desember 2021



Penulis

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan rempah di Indonesia, atau Kepulauan Nusantara masa lalu, menjadi suatu fenomena historis yang menarik dicermati. Arti penting dari fenomena ini bukan hanya terletak pada kajian geografis melainkan juga tematis. Secara tematis, perdagangan rempah merupakan suatu aktivitas yang rumit dan kompleks karena melibatkan berbagai kelompok komunitas baik berlatar belakang etnis, agama, sistem politik dan ekonomi, maupun budaya. Di samping itu, perdagangan ini juga melibatkan sejumlah kegiatan yang akhirnya meluas pada bidang kajian lain, yaitu geografis.

Pendekatan geografis menjadi penting karena perdagangan rempah ini tidak hanya menghubungkan produsen di daerah produksi dan konsumen yang datang dan membentuk hubungan transaksional. Perdagangan rempah tidak terbatas pada pola perdagangan di pusat produksi rempah, yang juga tersebar di sejumlah titik geografis sesuai dengan daya produktivitasnya, tetapi juga pada titik-titik lain yang tumbuh dan berkembang menjadi pasar transito tanpa harus menjadi produsen langsung komoditas yang diperdagangkan.¹

¹ UNCTAD/GATT, *Market for Spices in North America, Western Europe and Japan* (Geneva: International Trade Centre, 1970), hlm. 15. Yang dimaksud sebagai pasar transito adalah pasar yang melayani perdagangan bagi pihak ketiga di luar produsen dan konsumen barang.

Bertolak dari kenyataan tersebut, pendekatan geografis menjadi salah satu faktor penting dalam merekonstruksi dan menganalisis pola transaksi dan perdagangan yang berlangsung, sekaligus juga sarana pendukung yang mewujudkan hubungan transaksional ini. Perkapalan memainkan peranan penting sebagai faktor utama dalam pola transaksi, bukan hanya dalam hal pengangkutan, melainkan juga dalam mobilitas serta penyebaran pasar dan kegiatan fiskal yang berperan pada perdagangan tersebut.²

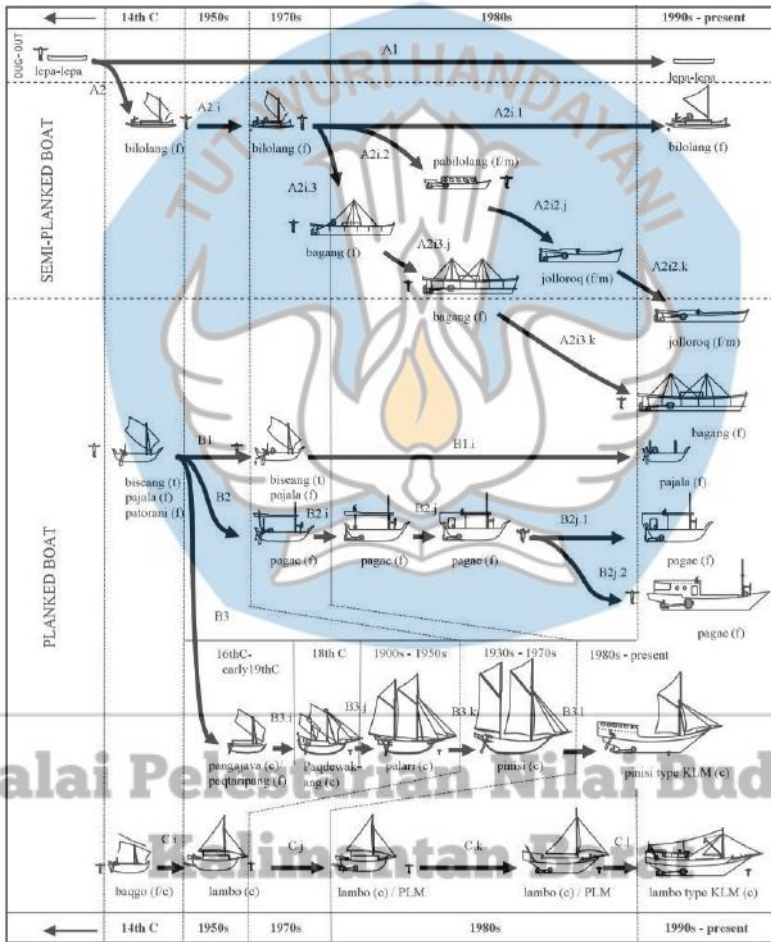
Perkapalan, baik tunggal maupun kolektif, menjadi suatu kekuatan utama yang menghidupkan perdagangan rempah, karena kapal pada periode maraknya perdagangan ini menjadi satu-satunya sarana yang berfungsi untuk mengangkut dan mengalihkan produk yang menjadi primadona pasar saat itu, di samping juga menjadi sarana penghubung antara satu titik ke titik lain, baik pusat produksi maupun pusat-pusat pemasaran. Mengingat pada saat itu pasar tidak dimonopoli oleh sumber produksi, kapal menjadi faktor utama yang menentukan dinamika perdagangan rempah, dan juga komoditas lain yang ikut berperan menyemarakkan perdagangan rempah tersebut.³

Keberadaan kapal ini juga ditentukan oleh kondisi geografi pada masa itu, khususnya perairan yang menjadi wahana utama dalam perkapalan. Selat, teluk, ujung, dan lautan lepas menjadi penentu bagi keberadaan kapal dan otomatis juga bentuk-bentuk kapal. Karena jalur pelayaran yang ada saat itu untuk menghubungkan pusat-pusat perdagangan rempah penting yang berbeda-beda tipologinya, para pelaku perdagangan utama harus menyesuaikan ukuran dan bentuk sarana transportasinya agar bisa menghindari persoalan yang muncul dan mendapatkan fasilitas pengangkutan yang prospektif dan maksimal. Berdasarkan kenyataan itu, selama abad Pertengahan di Nusantara berbagai jenis kapal muncul, mulai dari rakit kecil yang digunakan

2 P.L. Cottrell dan D.H. Aldcroft (eds.), *Shipping, Trade, and Commerce: Essays in Memory of Ralph Davis* (Leicester: Leicester University Press), hlm. 124. Bukti arti penting perkapalan pada abad-abad pertengahan itu tampak dari fakta bahwa tonase kapal di suatu pelabuhan tidak ditentukan oleh perdagangan di pelabuhan tempatnya singgah, tetapi oleh komposisi muatan yang dibawanya. Ini berarti bahwa terdapat keberagaman pengangkutan dan bukan homogenitas dalam transportasi niaga pada masa itu.

3 Pimpinan VOC J.P. Coen pada awal abad XVII saat tahun-tahun pertama bertugas di Nusantara sudah memantau arti penting perkapalan antarpulau di Nusantara yang potensial dan strategis, bahkan melebihi nilai perkapalan samudra. Dengan menguasai dan memonopoli perkapalan antarpulau saja, Coen yakin bahwa VOC mampu menjamin keuntungan besar dan tak akan habis daripada menguasai pusat-pusat produsen rempah. C.G. Frederik Simkin, *The Traditional Trade of Asia* (Oxford: Oxford University Press, 1968), hlm. 253.

untuk menyusuri sungai di pedalaman, perahu dalam berbagai ukuran untuk melayari selat dan pantai, perahu penghubung antara pelabuhan sebagai pusat pasar dan kapal besar yang berlabuh di tengah laut karena menghindari pendangkalan, hingga kapal-kapal berukuran besar yang mampu mengarungi samudra.⁴



Sumber: Aziz Salam dan Osozawa Katsuya, 2008

Gambar 1.1 Evolusi kapal di Sulawesi Selatan

4 Dalam kosakata Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu lama hanya ada empat istilah yang merujuk pada kapal: sampan, rakit, perahu, dan kapal. Keempatnya mengikuti ukuran dan penggunaan mulai yang paling kecil dan sederhana. Namun dalam kosakata tradisional setiap etnis pelaku pelayaran terdapat istilah yang beragam untuk membedakan, misalnya *paduwakang*, *mayang*, *cunia* dan sebagainya yang memiliki konsep berdasarkan struktur bangun dan bentuk serta ukurannya. Kurt Stenross, *Madurese Seafarers: Prahun, Timber and Illegality on the Margins of the Indonesian State* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2011), hlm. 116.

Dengan hadirnya berbagai jenis kapal pengangkut ini, bisa diduga bahwa pelayaran yang berlangsung sebagai bagian penting dari perdagangan rempah tidak bisa dibatasi dengan batas-batas geografis-politis. Meskipun pada puncak perdagangan rempah, abad XVI-XVII kawasan Nusantara dan sekitarnya dibagi dalam lingkup pengaruh kekuasaan politik oleh para penguasa lokal, perkapalan antarpulau yang menghubungkan pusat produksi dan titik-titik pasar tidak bisa dibatasi dengan batas kewenangan pengaruh politik di perairan. Bisa dikatakan bahwa perairan Nusantara pada saat itu merupakan perairan bebas dan menjadi titik penghubung saling kepentingan yang muncul dalam perdagangan rempah.

Prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi wilayah yang disebut sebagai Kepulauan Nusantara, atau Kepulauan Indonesia sekarang ini. Wilayah di sekitar Nusantara, seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Arafuru, dan juga perairan di sebelah utara Kalimantan bisa dikatakan sebagai kawasan perkapalan dan jalur utama perdagangan rempah yang tidak bisa dibatasi oleh suatu kekuatan dengan menolak kehadiran kekuatan lain, sejauh mereka memiliki kesamaan kepentingan.

Hegemoni dalam perairan hanya bisa dilakukan oleh para pelaku utama dalam pola perkapalan itu, yaitu mereka yang memiliki paling banyak kapal dan paling sering melakukan pelayaran di suatu wilayah. Hegemoni ini tidak tertulis sebagai suatu bentuk keputusan politik, tetapi menjadi pengakuan yang bersifat umum. Bahkan pusat kekuasaan yang berada di dekat lokasi hegemoni tersebut tidak mampu mencegah proses penegakkannya berlangsung. Sebaliknya, hegemoni di lautan yang berbeda dengan pusat dominasi di daratan bisa saling bekerja sama secara saling menguntungkan, terutama ketika keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam dinamika transaksi ekonomi.⁵

Dengan rempah sebagai objek komoditas utama yang menentukan pangsa pasar perdagangan saat itu, sumber produksi rempah tampil sebagai wilayah strategis. Akan tetapi, yang menarik untuk dikaji adalah bahwa tingginya nilai ekonomi rempah sebagai primadona pasar tidak selalu diikuti dengan kekuatan hegemoni dari sumber produksinya. Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai daerah pusat produksi dan asal

5 J. C. van Leur, *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History* (The Hague: W. van Hoeve Publ., 1967), hlm. 135. Pola perdagangan di situ adalah tawar-menawar individu atas sejumlah barang dan mereka berkumpul dari berbagai penjuru geografi serta latar belakang etnis yang berbeda-beda.

sebagian besar rempah tidak pernah menjadi suatu kesatuan politik. Dominasi politik lebih banyak terpusat di bagian utara, yakni Ternate, Tidore, dan Bacan, di samping sejumlah pulau kecil. Beberapa seperti Ternate dan Tidore tampil sebagai suatu kerajaan besar yang menguasai produksi rempah sejak milenium kedua ini. Bacan, Halmahera, dan Jailolo yang juga memiliki lahan produksi rempah, tidak didukung dengan kekuatan politik yang lebih besar daripada Ternate dan Tidore.⁶

Bagian tengah kepulauan ini yang produksinya lebih banyak daripada bagian utara sebaliknya tidak memiliki kekuatan politik yang dominan. Tanaman rempah yang subur dan tersebar di sejumlah pulau, seperti Ambon, Seram, Banda, hingga bagian di sebelah selatannya seperti Tanimbar dan Kei, lebih menunjukkan kekuatan sosial yang ditopang oleh kelompok-kelompok dengan ikatan adat sebagai pemersatunya. Hal ini mengakibatkan posisi tawar mereka lebih lemah dibandingkan dengan kesatuan-kesatuan politik di Maluku Utara ketika mereka menghadapi para pedagang pendatang yang menawarkan rempah-rempahnya. Dengan demikian, ketika kekuatan dagang Eropa muncul di perairan ini dengan kepentingan untuk melakukan perdagangan dan kemudian diikuti semangat dominasi dan eksploitasi, Kepulauan Maluku tengah lebih parah dan lebih cepat menjadi korban ambisi imperialis Eropa daripada Kepulauan Maluku di utara, yang relatif mampu mempertahankan eksistensinya.⁷

Namun, tidak selalu pola tersebut berlangsung seperti itu. Bagi produk rempah tertentu, khususnya yang tidak ditemukan di Maluku, suatu pola berbeda dan menarik bisa dilihat. Lada, yang tidak tumbuh di Maluku, tetapi di sejumlah daerah lain di Indonesia, menjadi komoditas rempah lain yang juga menarik pangsa pasar dunia pada abad

Kalimantan Barat

6 Dominasi politik para sultan Tidore dan Ternate yang begitu besar memungkinkan mereka memaksakan kekuatannya dalam perdagangan lewat monopoli, bukan hanya dalam penjualan, melainkan juga dalam produksi, yakni memaksa kawula taklukannya hingga di Pulau Papua untuk menanam dan menyetorkan produk rempah dalam jumlah tertentu secara rutin kepadanya. Alfred Russell Wallace, *The Malay Archipelago: The Land of the Orang-utan, and the Birds of Paradise* (New York: Harpers and Brothers, 1869), hlm. 315.

7 Misalnya sejumlah kepala desa Ambon yang merupakan pimpinan satuan sosial lokal tertinggi dalam kehidupan komunitas Ambon, tunduk dan patuh pada tuntutan para pedagang VOC pada tahun 1605 seperti yang juga mereka alami dengan orang-orang Portugis sebelumnya, saat orang-orang Eropa ini menuntut mereka memasok sejumlah produk cengkih, pala, dan fuli serta kayu dalam jumlah tertentu. Doreen E Greig, *The Reluctant Colonists: Netherlanders Abroad in the 17th and 18th Centuries* (Assen: van Gorkum, 1987), hlm. 154.

Pertengahan itu. Keberadaan lada kebetulan selalu berada di bawah kontrol langsung pusat-pusat dominasi politik lokal.⁸

Aceh, Banten, Banjarmasin, Palembang dan pantai Kalimantan Timur pada abad XV–XVI dikenal sebagai pasar lada. Di sini terdapat struktur dan pola yang berbeda dengan pusat produksi rempah di Maluku, seperti cengkih, fuli, dan pala. Lada ditanam di pedalaman dan memerlukan lahan terbentang luas, bukan di petak-petak sempit seperti di pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya. Dengan bentang lahan yang demikian, produksi lada bisa berlimpah dan pelabuhan yang terletak di dekatnya menjadi pusat penjualan dan pemasaran ekspor. Pada saat yang sama, selain sebagai pasar, pelabuhan-pelabuhan juga menjadi pusat-pusat kekuasaan politik para penguasa lokal yang tumbuh dari syahbandar dan menjadi dinasti.

Perpaduan kekuatan politik dan ekonomi, yang juga mewarnai dominasi pasar terhadap daerah produksi di pedalamannya, menjadi suatu struktur yang berbeda dibandingkan dengan pusat-pusat produksi rempah di Maluku. Meskipun Ternate dan Tidore menegakkan kekuatan politik dan kontrol ketat atas daerah produksinya, baik di pedalamannya secara langsung maupun di pulau-pulau sekitar yang menjadi tklukannya, kedua kerajaan ini tidak bisa menjadi pasar yang besar. Para penguasa Ternate, Tidore, dan Bacan seperti halnya penduduk Ambon, Seram, dan Banda menjadi produsen sekaligus konsumen. Akibatnya, meskipun mereka memiliki posisi tawar yang baik dengan ditopang oleh produksi rempahnya, ketergantungan mereka pada impor juga sangat besar dan terutama pada nilai jual produknya di pangsa pasar.⁹

Posisi tawar di pusat-pusat perdagangan lada lebih besar dipegang oleh para penguasa politik. Hal ini disebabkan selain memiliki produk yang potensial untuk ditawarkan, mereka juga ditopang oleh kekuatan

8 Lada lebih banyak ditemukan dan tumbuh di Jawa dan Sumatra, tetapi bukan merupakan tanaman asli daerah itu, melainkan dibawa oleh para pedagang Hindu dari India sejak tahun 600 Masehi dan diakui sebagai komoditas rempah tertua dalam perdagangan dunia saat itu. Keampuhan dan manfaat lada telah terkenal, baik sebagai ramuan obat maupun makanan yang dikonsumsi oleh elite politik di Cina dan India hingga Asia Barat. Joanna Hall Brierley, *Spices: The Story of Indonesian Spice Trade* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 26.

9 Sebelum kedatangan orang Eropa pada abad XVI awal, konsumen rempah dominan adalah pedagang dari Gujarat, Timur Tengah, dan Cina. Mereka mengambil rempah dalam jangka waktu tertentu sesuai musim pelayaran yang membawa armada kapal mereka dari para sultan yang memerintahkan kawulunya mempersembahkan upeti pengganti pajak dalam bentuk rempah. Arthur Stuart Walcott, *Java and Her Neighbours: A Traveller's Notes in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1914), hlm. 143.

politik bersenjata dan sekaligus pasar yang dinamis di pusat-pusat kekuasaannya. Akibatnya, para penguasa pelabuhan lada ini mampu menciptakan suasana kompetisi di antara para pedagang pendatang yang membutuhkan lada meskipun ketergantungan pada impor para penguasa lokal ini juga cukup signifikan.¹⁰ Keberadaan pasar di pusat-pusat pelabuhan dan produksinya menjadikan para penguasa lokal mampu mengontrol harga dan menolak tawaran yang dianggap mereka merugikan dibandingkan dengan tawaran lain yang lebih menguntungkan.

Kedua pola perdagangan rempah ini mewarnai dinamika transaksi perdagangan pada masa abad Pertengahan di Nusantara yang menjadi corak utama fenomena di atas. Selama beberapa abad milenium pertama, berbagai pelaku perdagangan di Nusantara terikat pada kedua pola dagang tersebut, baik sebagai produsen maupun konsumen. Namun, ada sesuatu yang perlu dicermati dalam hal ini, khususnya mengenai konsumen. Konsumen rempah bukan selalu menjadi konsumen pertama, melainkan bisa menjadi perantara bagi konsumen berikutnya. Dengan kata lain, konsumen yang berkunjung dan membeli ke daerah produsen rempah, tidak selalu mengonsumsi komoditas yang dibelinya, tetapi menjualnya kembali kepada konsumen lain, baik yang langsung membutuhkan atau menjualnya kembali. Hal ini tidak hanya terbatas di kawasan Nusantara, tetapi juga bisa terjadi dalam perkapalan di perairan ke luar Nusantara, bahkan ke Benua Asia.

Proses perdagangan berantai demikian tidak selalu ditentukan oleh harga di pasar, tetapi juga oleh kebutuhan produk. Dengan kata lain, rempah tidak selalu dibeli dengan uang tunai, tetapi ditukar dengan produk yang dibutuhkan oleh produsen atau pemilik rempah. Melalui pertukaran ini (barter), rempah memiliki pasangan dalam transaksi, yakni produk lain. Beberapa produk yang sering dijadikan sarana pengganti adalah beras, kain, kayu, logam, logam mulia, dan produk

10 Terutama para pedagang dari Cina sangat berperan dalam perdagangan lada ini. Kebutuhan lada yang tinggi dan keberanian mereka menawarkan harga menarik dan kompetitif menjadikan para penguasa pelabuhan lada memberikan prioritas kepada para pedagang dari Cina untuk penjualan lada mereka. Akibatnya, para pedagang Cina yang sering datang dengan jung-jung besar mereka menjadi konsumen yang langsung berhubungan dengan produsen lada di Nusantara tanpa harus melewati proses barter. Els M. Jacobs, *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), hlm. 70.

jadi seperti peralatan.¹¹ Beras sebagai komoditas pangan merupakan produk terpenting bagi penukar rempah dan ini dipegang oleh daerah yang tidak memproduksi rempah. Sebaliknya, daerah produsen rempah tidak menghasilkan padi yang akan menjadi beras. Jawa dan beberapa bagian di Sumatra yang dikenal sebagai daerah persawahan menjadi lumbung beras untuk Nusantara, dan akibatnya para pedagang Jawa sangat berperan sebagai pedagang barter dalam pola transaksi rempah di Nusantara pada abad Pertengahan.¹²

Seperti yang telah disampaikan di atas, ada dua faktor penting yang muncul dalam perdagangan rempah itu: perdagangan itu sendiri dan perkapalan. Keduanya saling berpadu dan tidak bisa dipisahkan. Perkapalan menjadi penentu perdagangan dan mengalami fluktuasi. Meskipun produksi rempah tinggi, ketika perkapalan mengalami kemunduran, perdagangan tidak akan berjalan. Sebaliknya, rendahnya produksi rempah akan diimbangi dengan tingginya dinamika perkapalan sehingga perdagangan tetap akan hidup dan dinamis.

B. PERMASALAHAN

Perkembangan perdagangan rempah yang menjadi bagian penting dari historiografi Indonesia, khususnya pada abad Pertengahan, mendominasi kehidupan sosial politik dan ekonomi kepulauan itu. Pola itu menyebar di segala penjuru kawasan kepulauan dan perairannya selama beberapa abad Pertengahan pertama milenium kedua. Dinamikanya meningkat tajam dengan kehadiran para pelaku baru dalam transaksi yang akhirnya mengalihkan hubungan ekonomi di antara para pemain bisnis rempah dan produk terkait lainnya, menjadi hubungan politik dan bahkan di sejumlah tempat diwarnai dengan konflik serta dominasi paksa.

Kalimantan Barat

11 Benda-benda yang digunakan sebagai barter dengan rempah ini tidak selalu berasal dari Indonesia, tetapi bisa juga dari luar negeri. Kain India dan batu permata digunakan oleh pedagang Gujarat dan kemudian Inggris pada awal abad XVII sebagai sarana untuk barter dengan rempah dari Maluku. John Irwin, *Studies in Indo-European Textile History* (New Delhi: Calico Museum of Textile, 1966), hlm. 28.

12 Sebelum abad XVI pedagang beras Jawa sangat terkenal di samudra Nusantara yang berperan sebagai pedagang perantara. Meskipun ada kemunduran setelah dominasi Portugis di Malaka pada tahun 1511, pada pertengahan abad XVI mereka bangkit kembali melalui kerja sama dengan para pedagang Gujarat yang mereka pasok dengan rempah dan lada dari hasil pembelian pedagang Jawa di pelabuhan transit. Akhir keberadaan mereka justru sebagai akibat dari ekspansi raja Mataram di Jawa atas kawasan pesisir dan penghancuran semua bandar dan elite maritim di sana selamanya pada awal abad XVII. Arun Das Gupta, "The Maritime Trade of Indonesia: 1500–1800" dalam Paul H. Kratoska, *Southeast Asia: A Colonial History* (London: Routledge, 2001), hlm. 119–120.

Meskipun terjadi penyebaran aktivitas tersebut di mana-mana, tidak semua tempat menganut pola yang sama. Perkembangan di pusat-pusat produsen rempah sendiri menunjukkan keragaman, seperti pusat rempah cengkih dan pala di Maluku dan pusat lada di Jawa dan Sumatra. Bahkan di Maluku sendiri, antara Maluku Tengah dan Utara terdapat perbedaan besar. Demikian juga di jalur-jalur perdagangan rempah yang menjadi penghubung pusat produksi dan pusat pasaran, dinamika yang berbeda-beda terjadi.

Wilayah perairan di sebelah utara dan timur laut Kalimantan, yang menjadi wahana langsung antara Malaka di barat sebagai bandar terbesar perdagangan Nusantara atau bahkan Asia Tenggara dan Maluku sebagai sumber produksi rempah, selayaknya menjadi jalur utama bagi transaksi perdagangan. Akan tetapi, pada kenyataannya jalur tersebut tidak menunjukkan dinamika yang tinggi dibandingkan dengan Laut Jawa atau jalur selatan. Kapal-kapal dagang yang berperan dalam perkembangan transaksi rempah dan produk lain lebih banyak memanfaatkan Laut Jawa sebagai lalu lintas utama antara Maluku dan Malaka, yang jaraknya lebih jauh dan lebih lama ditempuh, sementara faktor alam tidak berperan mengingat di seluruh jalur Nusantara ketergantungan pada angin musim bagi pelayaran di mana-mana tetap sama.

Permasalahan penelitian ini, yaitu sejauh mana dinamika aktivitas maritim dan perdagangan produk rempah serta produk lain yang terkait selama rentang waktu puncak perdagangan ini yang berlangsung di perairan Kalimantan bagian utara, sebagai jalur yang menghubungkan langsung Malaka-Maluku, untuk membandingkannya dengan jalur pelayaran utama yang berlangsung di perairan Laut Jawa.

Adapun sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa pelaku perkapalan yang memegang peran dominan dalam dinamika perdagangan di wilayah perairan Kalimantan; pola pelayaran yang berlangsung di kawasan perairan; dan kontribusi apa yang diberikan oleh kawasan tersebut bagi dinamika perdagangan rempah Nusantara.

C. BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian disiplin ilmu sejarah, karena mengangkat peristiwa di masa lalu sebagai fokusnya. Dalam penelitian sejarah, ada tiga batasan yang diambil, yaitu sebagai berikut.

1. Temporal

Batasan temporal atau rentang waktu menjadi salah satu ciri utama penelitian sejarah, karena peristiwa sejarah berkaitan dengan periodisasi. Penelitian ini akan menggunakan rentang waktu dua abad, yaitu abad XVI dan XVII. Pertimbangan yang mendasari pengambilan batas temporal ini adalah kedatangan bangsa Eropa, khususnya kejatuhan Malaka akibat serangan dan pendudukan oleh orang Portugis pada tahun 1511 yang telah menciptakan perubahan besar dalam pola perdagangan rempah, tetapi tidak menghapuskannya. Sebaliknya, kehadiran bangsa Barat ini, Portugis dan kemudian Belanda, justru menjadi fenomena baru karena strategi niaga yang mereka terapkan sama sekali berbeda dibandingkan dengan bangsa Timur, dan akhirnya akan menghasilkan pola interaksi baru. Sementara itu, abad XVII menampilkan Belanda sebagai pemain baru dalam perdagangan rempah, setidaknya sampai pertengahan kedua abad itu yang menjadi bagian penutup periode temporal ini. Pada saat itu, rempah mulai bergeser dari posisi dominannya dalam perdagangan domestik dan internasional, ketika muncul produk baru yang bersumber dari eksploitasi agraria di luar pusat produksi rempah, seperti kopi dan gula, yang dihasilkan oleh politik monopoli dan eksploitasi VOC di Nusantara.

2. Spasial

Batasan spasial atau geografis yang digunakan di sini adalah kawasan perairan timur dan timur laut Kalimantan, yang terletak antara Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina Selatan. Perairan tersebut tidak kalah dibandingkan dengan Laut Jawa, khususnya menyangkut kekuatan maritim yang mendominasinya. Selayaknya, jalur ini menjadi wahana lalu lintas yang marak bagi pengiriman rempah-rempah dari pusat produksinya di Maluku, dengan beberapa tambahan produk lada dari bagian lain Nusantara. Lokasi ini masih belum banyak diteliti oleh para peneliti, khususnya terkait dengan perdagangan rempah selama periode penelitian.

3. Tematis

Meskipun objek utama penelitian ini adalah perdagangan rempah, penelitian ini lebih dipusatkan pada tema perkapalan dan pelayaran serta interaksi maritimnya di kawasan penelitian. Rempah dan produk lain lebih banyak dijadikan sebagai objek dari aktivitas manusia, dan bukan

sebagai tema utamanya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkapalan dan kegiatan maritim lainnya menjadi dinamika kehidupan sosial pada masa itu, yang marak terjadi di puncak perdagangan rempah.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Untuk mengangkat daerah penelitian sebagai bagian dari kawasan perairan Nusantara yang selama ini masih belum mendapatkan banyak perhatian dari para peneliti historis, yakni perairan Kalimantan Timur.
2. Untuk menunjukkan kontribusi kawasan ini bagi dinamika perdagangan rempah pada abad Pertengahan.
3. Untuk menemukan fakta apa yang terjadi selama rentang waktu itu agar bisa diketahui pola interaksi yang muncul di sana.

Sementara itu manfaat penelitian terdiri atas dua hal berikut.

1. Manfaat praktis: penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi historiografi Indonesia dengan menambahkan hasil penelitian mengenai kawasan Kalimantan Timur. Dari situ diharapkan bisa diketahui bahwa kawasan yang menjadi wahana bagi perdagangan rempah periode itu tidak ditentukan oleh batas-batas negara modern sekarang, antara Indonesia dan negara tetangga. Dengan penelitian ini akan diketahui perbedaan batas kewilayahan yang terjadi dengan tiap-tiap pihak yang dominan sehingga bisa membantu memberikan penjelasan historis bagi potensi sengketa perbatasan masa kini dengan negara tetangga.
2. Manfaat akademis: penelitian ini dimaksudkan untuk membuka peluang lebih lanjut bagi penelitian lain. Dengan masih sedikitnya karya penelitian untuk kawasan ini, diduga banyak potensi historis ilmiah yang bisa digali lebih lanjut, baik untuk studi kawasan maupun sejarah lokal, agar semakin melengkapi rekonstruksi historis yang terjadi di kawasan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dewasa ini. Penelitian ini lebih terbatas pada kawasan maritim, sementara peran darat yang cukup besar bisa ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya.

E. KAJIAN SUMBER

Sebagai suatu karya penelitian sejarah, data arsip sebagai bentuk kesaksian tekstual dari masa lalu menjadi sumber informasi utama untuk menyusun laporan akhir. Dengan melakukan penelusuran, pengumpulan dan pengkajian arsip, diharapkan peristiwa yang telah terjadi dari masa lalu bisa direkonstruksi dan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

Akan tetapi, mengingat periodisasi yang dijadikan sebagai batas temporal dari penelitian ini berlangsung pada abad XVI–XVII, tidak banyak dokumen yang tersedia, khususnya di Indonesia, sebagai peninggalan kegiatan administrasi pada masa itu. Lemahnya tradisi tekstual yang ada pada penduduk asli Nusantara menjadi salah satu kendala utama bagi penelusuran data, meskipun hal ini bisa ditanggulangi dengan mengarahkan perhatian pada dokumen tertulis yang diwariskan oleh bangsa asing, khususnya Eropa.

Meskipun demikian, kendala besar dihadapi dalam melakukan penelusuran terhadap sumber arsip Eropa, baik dari Portugis, Belanda maupun Inggris sebagai bangsa-bangsa Barat yang pada periode tersebut ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan rempah. Laporan langsung sebagai kesaksian pertama dari para pelaku di kalangan bangsa-bangsa Barat tersebut sangat sulit diperoleh di Indonesia, tetapi tersimpan di khazanah dokumentasi masing-masing di negara mereka. Oleh karena keterbatasan dalam bidang teknis, tidak mungkin bisa mendapatkan akses ke sana, di samping juga belum tersedianya data tersebut dalam bentuk digital yang bisa dijangkau.

Ketergantungan utama penelitian ini adalah pada sumber dokumen asli yang berada di khazanah dalam negeri Indonesia, khususnya di Arsip Nasional RI. Akan tetapi, situasi pandemik yang berlangsung selama rentang waktu penelitian mengakibatkan tidak memungkinkannya penelitian dan penelusuran arsip di lembaga tersebut, mengingat aturan formal dalam hal pelayanan menjadi kendala utama bagi maksud itu. Hal serupa juga berlaku bagi institusi Perpustakaan Nasional RI yang diharapkan menyimpan koleksi pustaka pendukung utama, termasuk penerbitan naskah sumber.

Walaupun ada kendala tersebut, penelitian ini berusaha sejauh mungkin memperoleh sumber informasi tekstual yang objektivitas dan validitasnya berusaha dicapai semaksimal mungkin, meskipun mungkin persyaratan originalitasnya tidak mudah dipenuhi. Hal ini dilakukan

lewat pelacakan sumber arsip dengan akses ke sejumlah pusat penyimpanan dalam bentuk digital lewat jaringan internet. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ketersediaan koleksi jarak jauh, penelitian ini berusaha memperoleh sumber informasi yang layak dan tepercaya sebagai materi rekonstruksi karya laporan akhirnya.

Salah satu hasil penelusuran lewat jalur ini adalah sejumlah karya berbahasa Portugis yang menyebutkan tentang kondisi pelayaran dan perdagangan rempah di sekitar Borneo pada masa kedatangan mereka di Nusantara. Tulisan J. M. Pereira da Silva, *Obras Litterarias e Politicas* yang terbit pada tahun 1862 dalam dua jilid memberikan penjelasan tentang pengalaman langsung sejumlah orang Portugis tentang perdagangan rempah dari Maluku ke Malaka pada abad Pertengahan. Di situ bisa diperoleh keterangan dari kesaksian pertama mengenai pengangkutan dan perkapalan rempah yang berlangsung di Nusantara.

Keterangan Portugis lain yang menyinggung Kalimantan pada era perdagangan rempah adalah karya Manuel Bernardes Branco, *Portugal e Os Estrangeiros* yang diterbitkan secara publik pada tahun 1879. Karya ini juga memuat kesaksian sejumlah petualang Portugis yang berlayar di Kepulauan Maluku dari arah barat dan menyinggahi Pulau Borneo. Di sana mereka membuat keterangan dan menuliskannya dalam laporan asli mereka.

Laporan lain yang muncul dari sumber Portugis adalah *Elementos da Historia: Traduzida da lingua Franceza* yang disusun oleh Pedro de Sousa yang diterbitkan pada tahun 1767 di Lisabon. Dalam laporannya ini, de Sousa menuliskan kesaksiannya mengenai kondisi Kalimantan pada saat kunjungannya dalam satu bagian tersendiri, bersama Jawa dan Sumatra. Di situ, ia menyinggung rempah-rempah yang telah diperdagangkan di sekitar pulau tersebut.

Bentuk kesaksian lain yang ditulis oleh orang Portugis sezaman adalah *Summa Oriental of Tome Pires*, sebagai suatu bentuk laporan perjalanan dari Malaka ke Maluku pada tahun 1513 yang disusun oleh Armando Cortesao. Karya yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa ini memberikan kesaksian asli dari Tome Pires sebagai seorang musafir yang mengikuti pelayaran Francisco Rodriguez mulai dari Laut Merah ke Kepulauan Maluku.

Sumber dari kalangan para penulis Belanda juga digunakan sebagai informasi utama. Karya P.A. Tiele tentang kesaksian orang-

orang Portugis yang berlayar dari Eropa sampai ke Maluku menyebut juga jalur-jalur pelayaran mereka, diterbitkan dalam sejumlah artikel dan dimuat oleh majalah *De Gids* tahun 1879 jilid III dengan judul "De Europeers in den Malaischen Archipel 1519–1618". Karya ini menjadi tulisan tentang orang Portugis dari sudut pandang orang Belanda, yang menjadi kompetitor mereka saat itu. Meskipun mengandung subjektivitas, laporannya tentang kegiatan perdagangan dan jalur-jalur perkapalan sangat berguna sebagai informasi.

Sementara itu, karya P. J. Veth dalam majalah *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* tahun 1867 jilid 1 yang berjudul "De Onderhoorigheden van Madjapahit buiten Java" menunjukkan gambaran tentang kondisi pelayaran dan perdagangan di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa. Karya ini menjadi informasi penting untuk mengetahui bagaimana pola perdagangan dan hubungan ekonomi di Nusantara sebelum terjadinya perubahan struktural yang muncul akibat kehadiran dan penerapan strategi Eropa dalam perdagangan rempah.

Sumber yang khusus memberikan kesaksian tentang orang Belanda di Nusantara sejak awal abad XVII bisa diperoleh dalam *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia*, yang diterbitkan antara 1610 dan 1683. Karya yang berisi catatan harian dan surat-surat pribadi dan formal dari kalangan petinggi VOC ini bisa memberikan informasi tentang kebijakan Belanda dalam perdagangan rempah serta tindakan mereka terhadap para penguasa pribumi. Juga perkapalan yang menjadi tulang punggung utama kegiatan Belanda di Nusantara pada abad itu banyak dikupas dalam terbitan naskah sumber ini. Karya ini terdiri atas beberapa jilid dan akan dilakukan seleksi sebelum penggunaannya sebagai naskah sumber utama untuk mengupas tentang periode dominasi VOC dalam perdagangan rempah di Indonesia.

F. KONSEPSI

Sesuai dengan aspek tematis yang telah disampaikan dari penelitian ini, yaitu perdagangan rempah, dalam hal ini perlu dijelaskan definisi yang dimaksudkan dengan rempah dan perdagangannya. Hal ini perlu dilakukan dengan maksud agar fokus rekonstruksi ini terarah oleh objek penelitian yang ingin dibahasnya. Di samping itu, pemberian konsep yang jelas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bias dan penyimpangan mengingat kegiatan perdagangan yang berlangsung dari masa lalu bisa

berubah dan berbeda dengan pola yang berlangsung pada masa kini. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi anakronisme dalam memandang fenomena masa lalu.

Berdasarkan makna harfiahnya, kata “rempah” menurut kosakata dalam kamus Amerika pada pertengahan abad XIX bisa didefinisikan sebagai berikut

*Spice is a vegetable production, fragrant or aromatic to the smell, and pungent to the taste.*¹³

Rempah adalah suatu produk tanaman dengan bau yang harum dan mengandung aroma, dan rasanya tajam.

Dalam makna harfiah di atas, rempah dimaksudkan sebagai suatu hasil dari proses tanam tumbuh yang muncul dari suatu bentuk tanaman. Rempah memiliki bau yang harum dan beraroma serta memiliki rasa. Dengan demikian, ciri-ciri fisik rempah tampak dari sesuatu yang dinikmati oleh manusia. Namun demikian, makna itu masih cukup luas karena buah dari pohon lain juga memiliki sifat yang sama.

Dalam sebuah kamus ensiklopedi yang terbit pada akhir abad XIX, penyempitan fokus berdasarkan klasifikasi jenis tentang konsep rempah ditemukan, yaitu

*A general name for vegetable substances possessing aromatic and pungent properties such as cinnamon, cloves, ginger, pepper, etc.*¹⁴

Sebuah sebutan umum bagi zat tumbuhan yang memiliki sifat beraroma dan mencolok, seperti kayu manis, cengkih, jahe, lada, dan sebagainya.

Dalam kamus ensiklopedi tersebut, rempah difokuskan pada sejumlah produk tanaman yang mengandung sifat-sifat beraroma dan berasa tajam, dengan sebutan beberapa contoh. Hal ini lebih menegaskan produk tanaman tertentu yang diklasifikasikan sebagai rempah.

Konsep ini dipertajam kembali dalam sebuah ensiklopedi yang disusun di Amerika Serikat pada pertengahan abad XIX terkait dengan rempah, yaitu

13 Noah Webster, *An American Dictionary of English Language* (Philadelphia: J. B. Lippincott and Co, 1857), hlm. 953.

14 Robert Hunter, *The Encyclopaedic Dictionary, Vol. VI* (London: Cassell & Company, 1887), hlm. 525.

All the substances classed as spices are the produce of tropical climates only; the most valuable of these natural productions were originally found in the islands situated in the Indian Ocean, called the Spice Islands of Moluccas, and probably conveyed from there in the most distant ages. The delicious aromatics of tropical regions were highly prized by the ancient nations; and as ranking among their most esteemed luxuries. As navigation and the means of intercourse between distant nations improved, from the facility of transport, they found their way, as articles of traffic, to countries very remote from the places of their production.¹⁵

Semua zat yang dikelompokkan sebagai rempah merupakan hasil hanya dari kawasan tropis; produk alami yang paling berharga ini awalnya ditemukan di pulau-pulau yang terletak di Samudra Hindia, disebut Kepulauan Rempah Maluku, dan mungkin dibawa dari sana pada zaman dahulu. Aroma yang enak dari kawasan tropis ini sangat dihargai oleh bangsa-bangsa masa lalu dan dikelompokkan di antara benda paling mewah. Ketika pelayaran dan sarana hubungan antara negeri-negeri yang jauh membaik, dari kemudahan pengangkutan, mereka menemukan jalan sebagai komoditas perhubungan ke negara-negara yang terletak jauh dari sumber produksinya.

Ensiklopedi di atas menggambarkan bagaimana proses mulai dari penemuan rempah, penghargaannya, hingga pengangkutannya berlangsung sebagai suatu pola perkembangan di masa lalu. Tanpa menyebutkan aspek geografis kecuali sumber produksinya, ensiklopedi ini telah menggambarkan konsepsi pola yang terjadi.

G. METODOLOGI

Dengan mengambil tema dan disiplin penelitian dari ilmu sejarah, rekonstruksi yang akan dilakukan terhadap fenomena yang terjadi pada masa lalu menggunakan metode penelitian ilmu sejarah. Hal ini dimaksudkan agar rekonstruksi yang dihasilkan bisa mencapai suatu laporan yang objektif dan valid, dengan dilengkapi kesimpulan sebagai hasil analisis yang tepat dan setidaknya mendekati kebenaran.

Metode ini terdiri atas empat tahap. Tahap pertama terdiri atas heuristik atau penelusuran dan pengumpulan data.¹⁶ Pada tahap ini, data yang menjadi objek penelusuran adalah data tekstual. Oleh karenanya, upaya dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di lapangan serta

15 F. M. Chapman and Charles C. Chapman, *The American Encyclopaedia of Practical Knowledge Containing Practical and Sistematic Treatises* (Chicago: Law, King and Law Publ, 1887), hlm. 1170.

16 Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1946), hlm. 34.

lewat jaringan internet yang bisa dijangkau melalui akses sejumlah situs bank data, baik di dalam maupun di luar negeri. Kunjungan ke lapangan yang akan dilakukan selama beberapa saat dan di sejumlah titik bukan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan data, melainkan juga berusaha melihat situasi lokal tempat terjadinya peristiwa yang diharapkan mampu memberikan gambaran tentang masa lalu.¹⁷

Tahap kedua adalah kritik data. Kritik berlangsung terhadap data yang telah terkumpul, dan dilakukan secara ekstern dan intern. Kritik data ekstern dilakukan terhadap fisik data yang mencakup sejumlah unsur, seperti autentisitas dan originalitas data,¹⁸ sementara kritik intern lebih difokuskan pada isi data untuk menemukan relevansi atau kekontekstualan informasi yang dikandung di dalamnya dengan tema penelitian.¹⁹

Tahap ketiga adalah interpretasi data. Setelah melewati tahap kritik, data yang lolos dari tahap ini akan mengalami proses interpretasi, yang berlangsung dalam dua fase. Fase pertama adalah analisis data untuk mengambil fakta, yaitu pokok pikiran yang dimuat dalam informasi sebagai makna teks tersebut. Setelah itu, fase kedua yakni sintesis data dimulai, dalam arti merangkai fakta yang telah diambil dari data sehingga membentuk suatu kesatuan utuh.²⁰

Kesatuan utuh dari rangkaian fakta hasil sintesis ini disusun dalam suatu bentuk laporan tertulis yang disebut proses rekonstruksi. Dalam proses ini, analisis dilakukan dengan dukungan teori agar bisa dicapai kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian secara tepat dan seobjektif mungkin. Penggunaan teori dalam menganalisis kesimpulan tidak hanya bisa memberikan aspek objektivitas, tetapi juga menjadikan kesimpulan sebagai tesis bagi penelitian baru.

Selain metode, penelitian ini juga menggunakan metodologi. Karena tema yang diambil yaitu tentang perdagangan rempah, dalam hal ini fokusnya adalah suatu peristiwa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Fenomena yang melibatkan aspek waktu, ruang,

17 Dalam hal ini tekanan diberikan pada penemuan sumber nontekstual atau artefak. Umumnya, artefak bisa memberikan informasi tentang struktur sosial tempat terjadinya peristiwa, seperti kehidupan masyarakat setempat dan perilaku sosial kehidupan mereka. Martha Howell and Walter Prevenier, *From Reliable Resources: An Introduction to Historical Methods* (Ithaca: Cornell University, 2001), hlm. 23.

18 Fred Morrow Fling, *Outline of Historical Method* (Lincoln: J. H. Miller, 1899), hlm. 49.

19 Fred Morrow Fling, *ibid.*, hlm. 63.

20 N. Jayapalan, *Historiography* (New Delhi: Atlantic, 2008), hlm. 124. Proses analisis dan sintesis sebenarnya menjadi pokok utama dari tugas metode sejarah dan membedakannya dengan kajian ilmu lain.

dan kejadian ini dengan berbagai komponen yang berperan di dalamnya dipandang sebagai suatu struktur. Oleh karenanya, dalam rentang waktu tertentu telah terjadi dinamika struktural yang terjadi dalam batas-batas ruang. Hal ini mengarahkan penggunaan metodologi struktural dalam rekonstruksi akhir peristiwa tersebut dalam bentuk laporan.²¹

Dalam metodologi struktural, aspek geografi seperti yang menjadi batasan spasial penting dalam penelitian ini, sangat menentukan bagi suatu perubahan sosial komunitas manusia. Batas-batas geografi terutama dalam jangka waktu lama (*longe duree*) akan menentukan arah perubahan itu dan menciptakan batas-batas yang menghasilkan struktur baru dari proses perkembangan atau perubahan.²²

Untuk melihat proses perubahan itu dan menganalisisnya dalam konteks peristiwa sejarah yang akan direkonstruksi, diperlukan teori. Penggunaan teori bisa memunculkan bukan hanya struktur sosial, melainkan juga sejauh mana perubahan sosial itu terjadi sehingga tampak perubahan dari satu struktur ke struktur lain.²³ Dengan demikian, perbedaan penerapan teori terjadi antara penelitian ilmu sosial dan penelitian ilmu sejarah, karena dalam ilmu sosial teori difungsikan untuk menguji hipotesis, sementara dalam ilmu sejarah teori dipakai untuk menerapkan bagaimana (rekonstruksi) dan mengapa (kesimpulan), yakni pada tahap rekonstruksi akhir.²⁴

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini teori yang digunakan terkait dengan topik penelitian. Kawasan perairan Kalimantan Timur yang menjadi batas spasial dari terjadinya fenomena perdagangan rempah bukan menjadi sentra perdagangan rempah itu sendiri. Namun, perubahan dan dinamika yang terjadi disebabkan oleh perubahan yang berlangsung di pusat produsen seperti Maluku atau pusat pemasaran

21 Metodologi struktural dalam ilmu sejarah dikembangkan oleh sejarawan Prancis Fernand Braudel, yang terpengaruh oleh dominasi strukturalisme pada dekade kedua abad XX. Dalam konteks ini, struktur merupakan sistem yang dibentuk oleh mekanisme unsur kehidupan sosial dan manusia tunduk kepadanya. Khususnya bagi Braudel, unsur geografi sangat menentukan bagi struktur yang berlaku dalam suatu masyarakat dan perubahannya. Oleh karenanya untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat peristiwa sejarah, metodologi struktural digunakan. Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Oxford: Blackwell, 1989), hlm. 80.

22 Menurut sejarawan struktural Fernand Braudel, geografi menjadi "sarana mencapai tujuan perubahan". Mark Charles Fissel, *Amphibious Warfare 1000–1700: Commerce, State Formation and European Expansion* (Leiden: Brill, 2006), hlm. 328.

23 Agus Mulyana, "Pergumulan Elite Sunda pada Masa Revolusi: Kasus Berdiri dan Bubarnya Negara Pasundan 1947–1950" dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996: Subtema Pemikiran dan Analisis Teks Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 146.

24 Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan Karangan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 192.

seperti di Malaka. Oleh karenanya, kawasan ini lebih banyak terletak di pinggiran yang terpengaruh oleh dinamika di pusat. Dalam hal ini teori hubungan pusat-pinggiran (*center-periphery*) akan digunakan untuk mendukung analisisnya.

Hubungan antara pusat-pusat peristiwa (Maluku dan Malaka) dan kawasan perairan Kalimantan Timur ini bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung ketika kejadian yang berlangsung di Kalimantan Timur diakibatkan oleh pergolakan atau perubahan di pusat, jadi menimbulkan efek “menetes” (*trickle down*).²⁵ Sementara itu, hubungan tidak langsung terjadi ketika perubahan atau dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur tidak diakibatkan secara langsung oleh kejadian di pusat, tetapi bisa muncul sebagai respons atau reaksi.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini terdiri atas beberapa bagian yang akan dikelompokkan dalam bab untuk setiap bagian.

Bab satu atau pertama merupakan pendahuluan bagi karya laporan ini yang mencakup latar belakang, permasalahan, ruang lingkup atau batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian sumber yang digunakan, konsepsi yang berlaku, metodologi penelitian, dan sistematika.

Bab dua mencakup peristiwa dan kondisi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur sebelum kedatangan bangsa Eropa, yang dalam hal ini menunjukkan dominasi atau campur tangan dari penguasa luar wilayah non-Barat dan pengaruh perdagangan rempah di Maluku.

Bab tiga menjadi bab yang akan menjelaskan dominasi orang Portugis pasca-kejatuhan Malaka oleh mereka pada tahun 1511 dan upaya mereka untuk menerobos ke Kepulauan Maluku dalam kaitannya dengan interaksi Portugis-Ternate.

Bab empat merupakan bab yang memberikan gambaran peristiwa selama abad XVII dengan kemunculan orang Belanda di perairan ini dan aktivitas mereka di sana dan dominasi perdagangan rempah dalam perkapalan dan perekonomian Nusantara pada akhir abad XVII

²⁵ Stanford Research Institute, *City Size and Quality of Life* (Washington: National Science Foundation, 1975), hlm. 73.

dan pengaruhnya pada perairan di Kalimantan Utara dan Timur yang ditandai dengan munculnya struktur atau tatanan baru.

Bab lima merupakan penutup laporan yang akan memuat kesimpulan dari hasil analisis penelitian.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 2

PERAIRAN KALIMANTAN SEBELUM KEDATANGAN BANGSA BARAT

Perairan Kalimantan, khususnya sepanjang pantai Kalimantan Timur dan Utara yang menjadi objek spasial penelitian ini, telah menjadi wahana bagi kegiatan kemaritiman manusia sejak milenium pertama Masehi. Dinamika kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bisa diduga telah ada di kawasan itu berdasarkan sejumlah bukti yang bisa disaksikan hingga sekarang. Meskipun dalam penelusuran tidak ditemukan bukti tertulis sebagai sumber primer bagi kesaksian sejarah awal Masehi untuk kawasan ini, setidaknya ada tiga sumber yang bisa digunakan untuk mendukung dugaan dinamika di atas.

Sumber kebendaan atau material yang berupa peninggalan fisik membuktikan bahwa daerah ini telah menjadi lokasi bagi interaksi umat manusia, dan bisa diduga mencakup sejumlah aspek kehidupan, termasuk budaya dan terutama juga perekonomian. Selain kebendaan itu, berita lisan (*oral tradition*) juga menjadi saksi turun-temurun tentang tumbuhnya peradaban di kawasan tersebut yang diwariskan oleh umat manusia pada zaman itu. Dan akhirnya, sumber tertulis sebagai hasil penelitian para ilmuwan pada masa sesudahnya, terutama laporan dari penulis ilmiah kolonial pada abad XIX dan awal abad XX telah memberikan gambaran lebih jelas dari rekonstruksi mereka.

A. DOMINASI KUTAI

Dari tiga sumber informasi di atas, Kerajaan Kutai yang diduga telah berdiri pada abad pertama Masehi di Kalimantan Timur sekarang ini bisa memenuhi semua persyaratan. Statusnya sebagai suatu kerajaan dan memiliki struktur pemerintahan tidak bisa diragukan lagi dengan adanya bukti peninggalan fisik, yaitu sejumlah prasasti bertuliskan huruf Pallava, yang dari situ bisa diketahui adanya hubungan antara wilayah ini dan wilayah di India Selatan, khususnya Kerajaan Pallava yang berkuasa pada abad IV–VII Masehi.¹

Empat potong batu bertulis yang ditemukan pada tahun 1870-an di kampung Muara Kaman, di aliran Sungai Kaman dan Mahakam,² ini menjadi sumber informasi utama bagi terungkapnya sejarah masa lalu Kutai, khususnya pada peralihan abad Masehi. Lokasi penemuan ini pada awalnya juga menjadi perdebatan, khususnya adanya sejumlah keterangan yang berbeda dari sejumlah tenaga ahli. Selain Muara Kaman, Kutei Lama diduga menjadi tempat penemuan lokasi ini seperti yang disebutkan oleh Asisten Residen Samarinda pada saat itu.

S. W. Tromp, yang melakukan perjalanan penelitian di pedalaman Kutai antara 11 Agustus dan 15 September 1885 membuat keterangan tentang kunjungannya ke Muara Kaman. Di sana ia melihat bukan hanya empat prasasti tertulis, melainkan juga ada beberapa patung dan benda perhiasan dari emas yang menghubungkan fungsinya dengan fungsi upacara kenegaraan dan keagamaan, dan diduga dipakai oleh raja sebagai penguasa agama dan politik. Hal itu menunjukkan bahwa

Balai Pelestarian Nilai Budaya

- 1 Kerajaan Pallava menjadi salah satu kerajaan besar dan berperadaban maju di India Selatan pada awal era Masehi, dan mampu bertahan sampai delapan abad. Diketahui bahwa Pallava memiliki kota pelabuhan besar dan armadanya, sehingga bisa diduga bahwa kerajaan ini memainkan peranan aktif dalam pelayaran dan perdagangan laut pada era itu yang menjangkau hingga Asia Tenggara dan Asia Timur.
- 2 Penelitian dilakukan oleh arkeolog Belanda S.C. Knappert yang menyebutkan bahwa batu-batu itu ditemukan di Muara Kaman yang diduga merupakan tempat strategis karena Kampung Kaman terletak di perpaduan dua aliran sungai besar di Kalimantan Timur. Asisten Residen saat itu melaporkan pada 26 Agustus 1880 bahwa batu-batu itu ditemukan di Kampung Kutai Lama yang di masa lalu menjadi pusat Kerajaan Kutai sebelum dipindahkan ke daerah Tenggarong. Namun, dari putra Sultan Muhammad Salehudin yang menyerahkan keempatnya kepada Knappert, tidak disebutkan Kutai Lama, tetapi Muara Kaman. Oleh karenanya, ada dugaan bahwa Muara Kaman pada masa lalu menjadi lokasi penting dalam struktur politik Kerajaan Hindu Kutai, S.C. Knappert, dalam *BKI*, tahun 1905, hlm. 576.

Muara Kaman merupakan lokasi yang penting pada masa lampau dalam pemerintahan Kutai.³



Sumber: Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya

Gambar 2.1 Prasasti Yupa Nomor Inventaris D2A, D2B, D2C, D2D

Keterangan Tromp ini diperkuat oleh kesaksian seorang insinyur perminyakan yang ditugaskan di Kalimantan Timur untuk melakukan eksplorasi minyak, H. Witkamp. Dalam kunjungannya ke Muara Kaman dan Kutai Lama, Witkamp memberikan kesaksian bahwa Kutai Lama tidak menyimpan peninggalan pra-Islam sama sekali, meskipun mungkin lokasi ini menjadi pusat pemerintahan penting yang diduga baru berasal dari awal masuknya Islam di Kalimantan Timur. Sebaliknya, Muara Kaman dianggap lebih sesuai, melihat struktur lapisan tanahnya yang menyimpan benda-benda yang terkait dengan kerajaan.⁴

Selain kedua tempat itu, ada tempat lain yang diduga berkaitan dengan penemuan prasasti Pallava ini. Carl Bock, seorang peneliti arkeolog menyebutkan Sangkulirang, yang terletak di sebelah utara sungai Mahakam, merupakan tempat asal prasasti dan diduga merupakan pusat pemerintahan Kutai pada masa itu.⁵ Akan tetapi prasasti yang ditemukan Bock di Sangkulirang bersama dengan sebuah patung Buddha dari Kota Bangau menunjukkan perbedaan orientasi, mengingat raja-raja Kutai adalah pemeluk agama Hindu. Oleh karenanya, ada dugaan bahwa benda-benda yang ditemukan Bock ini berasal dari tempat lain

3 S. W. Tromp Jr, "Een reis naar de bovenlanden van Koetei (11 Augustus–15 September 1885) dalam *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap*, tahun 1889, vol. XXXII, hlm. 276.

4 H. Witkamp, dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, tahun 1914, vol., XXXI, hlm. 587.

5 Carl Bock, "Reis in Oost en Zuid Borneo" dalam *Notulen Bataviaasch Genootschap*, tahun 1880, vol. XVIII, hlm. 98.

yang kebetulan dibawa ke sana, terutama karena patung dan bentuk batu bertulis lebih mirip dengan penemuan di Bogor dan Jambu di Jawa.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, bisa diduga dengan jelas bahwa pada masa lalu, khususnya di era Kerajaan Hindu Kutai, sejumlah tempat telah disebutkan sebagai lokasi penting. Muara Kaman, Kutai Lama, Kota Bangau, dan Sangkulirang semuanya terletak di tepi laut Selat Sulawesi sekarang atau setidaknya dekat muara sungai besar, yaitu Kaman dan Mahakam. Ini membuktikan bahwa dari kajian geografis, kota-kota ini telah memegang peranan penting dalam percaturan kehidupan ekonomi dan politik Kutai, yang akan dibahas dalam subbab berikutnya.



Sumber: Koleksi Tim Peneliti

Gambar 2.2 Situs Lesong Batu di Muara Kaman

Kini pembahasan akan dipusatkan pada isi prasasti tertulis yang ditemukan. Dalam salah satu prasasti itu disebutkan beberapa nama raja yang memerintah di Kerajaan Kutai dan merupakan genealogi turun-temurun. Raja pertama yang memerintah Kutai disebut bernama Kundunga, sementara raja kedua bernama Aswawarman dan raja ketiga adalah Mulawarman. Keempat prasasti ini dibuat pada masa Mulawarman berkuasa, sehingga tidak ada keterangan mengenai penggantinya atau masa sesudah pemerintahannya.

Dari keterangan berdasarkan prasasti ini terdapat beberapa hal menarik yang perlu dicermati. Nama ketiga raja yang ada menunjukkan perbedaan besar, terutama yang dikaitkan dengan pengaruh Hindu atau India di sana. Nama dua raja terakhir, yakni Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan kesamaan tambahan kata *varman* atau *warman* di belakangnya. Hal ini membuktikan adanya kesamaan dengan

nama raja-raja yang bertakhta di kawasan India Selatan pada masa itu, seperti di Cola, Pallava, dan Calukya, yang semuanya memakai kata *varman*, untuk membedakan dengan raja-raja di India Utara yang memakai gelar *swara* (Iswara, Parameswara).⁶

Berdasarkan identifikasi gelar tersebut, bisa diketahui adanya hubungan erat antara Kutai dan kerajaan-kerajaan di India Selatan pada kurun waktu tersebut. Mengingat kesamaan nama ini dipakai oleh elite politik yang berkuasa, tidak mungkin hal itu terjadi tanpa kesengajaan atau tanpa perhitungan yang mendalam, khususnya menyangkut legalitas dan hegemoni kekuasaan. Identifikasi nama pada elite penguasa setidaknya menyangkut dua hal: hubungan kekerabatan atau ikatan kekuasaan yang mengarah pada jalinan kerja sama.

Kedua bukti, kesamaan nama gelar raja (setidaknya dua orang raja) dan huruf serta bahasa yang digunakan di Kutai dan Kerajaan Pallava di India Selatan menunjukkan adanya interaksi yang jelas berlangsung. Interaksi ini pasti bernilai strategis karena kedua aspek itu langsung menyentuh dominasi kekuasaan: nama penguasa dan karya sastra atau bahasa resmi. Karakter yang pasti bisa diduga adalah kesamaan ideologi atau keyakinan yang dianut oleh keduanya, yaitu agama dan peradaban Hindu dari India yang menyebarkan bukan hanya nilai-nilai spiritual, melainkan juga struktur politik dan norma-norma kebudayaannya.

Kini pertanyaan muncul, bagaimana dengan kondisi Kutai sebelum adanya pengaruh Hindu ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatian dicurahkan pada petunjuk tentang Raja Kundunga atau Kudungga yang memerintah sebelum kedua raja berorientasi Hindu India Selatan. Berkaitan dengan pertanyaan itu, Kundunga yang bukan merupakan nama Hindu lebih menyiratkan nama asli Kalimantan. Dengan bertolak dari asumsi seperti ini, persoalannya adalah penduduk asli Kutai adalah penduduk asli Kalimantan yang sudah menghuni pulau tersebut sebelum kedatangan peradaban Hindu atau berinteraksi dengan kekuatan budaya Hindu.

Dalam prasasti pertama dari empat batu bertulis di Muara Kaman, nama raja ini disebutkan pada bait kedua tetapi hanya memberikan keterangan singkat. Dalam prasasti itu, Kundunga hanya menyerahkan kekuasaan kepada putranya Asvavarman atau Aswawarman, dan

6 J. Ph. Vogel, "The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo)" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, hlm. 171.

kemudian dilimpahkan kepada Mulawarman atau Mulawarman. Pada prasasti kedua, ketiga, dan keempat nama Mulawarman banyak disebut sebagai raja yang memberikan kelimpahan ternak, tanah dan "pohon kebijaksanaan" kepada rakyat Kutai. Terlepas dari dugaan bahwa dengan interpretasi yang dilakukan bisa diduga semua prasasti ini dibuat pada zaman Mulawarman, informasi itu menegaskan bahwa Kutai sebenarnya bukan kerajaan yang miskin, melainkan kerajaan yang memiliki kelimpahan dan rakyatnya makmur.

Setelah Mulawarman, memang tidak ada lagi keterangan mengenai siapa yang langsung menggantikannya memerintah Kerajaan Kutai. Akan tetapi, setidaknya ada dua hal yang masih tetap bisa dijadikan asumsi. Pertama, Kerajaan Kutai tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kekuatan yang dominan dengan menaklukkan dan memerintah daerah-daerah sekitarnya, seperti Pasir dan Berau. Kedua, dinasti yang berkuasa di Kutai sampai abad XV bisa diduga merupakan raja-raja yang memeluk agama Hindu.

Seorang peneliti Belanda menyampaikan tentang hal ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1870 sebagai berikut

Voor zoo ver ik weet komt de vroegste vermelding van Koetei voor in de beneden lijst der onderhoorigheden van Madjapahit op Java, in de Maleische kroniek van Pasei. Dat zich hier een kleine kolonie van Hindoe Javanen gevestigd, enkele Dajaksche stamen eenigermate geciviliseerd, en er een soort van staatje gesticht heeft, dan later, na den val van Madjapahit, als onderhooridheid van het eveneens door Hindoe- Javanen gestichte rijk van Bandjermasin werd beschouwd, kan inderdaad niet met recht betwijfeld worden. De vorstelijke of adellijke titels van oudsher in Koetei in gebruik Ratoe, Adji, Pangeran, verraden alleen een Javaansche afkomst.⁷

Sejauh yang saya ketahui, keterangan tertua tentang Kutai muncul dalam daftar daerah taklukan Majapahit di Jawa, dalam hikayat Pasei Melayu. Di sini didirikan suatu koloni Hindu Jawa, beberapa suku Dayak yang telah menjadi beradab, dan membangun semacam negara, yang setelah kejatuhan Majapahit diakui sebagai bawahan dari Kerajaan Banjarmasin yang juga dibangun oleh orang-orang Hindu Jawa, yang memang tidak bisa diragukan. Gelar raja atau bangsawan sejak dahulu di Kutai menggunakan Ratu, Aji, Pangeran, yang menunjukkan semuanya keturunan Jawa.

7 P.J. Veth, "De Koeteisch Vorstenhuis" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1870, jilid 1, hlm. 455.

Kesaksian di atas membuktikan bahwa di Kutai suatu struktur politik telah terbentuk dengan dasar Hindu dan ditopang oleh orang-orang Hindu. Namun, berbeda dengan periode Mulawarman dan sebelumnya yang menyiratkan hubungan langsung dengan India, kesaksian ini menegaskan adanya pengaruh Jawa (yang saat itu juga Hindu) di Kutai. Bertolak dari pandangan tersebut, bisa diduga bahwa pengaruh Hindu Jawa terjadi pada puncak kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Hindu hingga Majapahit yang berlangsung antara abad IX dan XV. Dengan demikian, ada dugaan bahwa selama periode ini Kutai telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa, khususnya Majapahit.

Hubungan dengan Jawa ini mengarahkan orientasi analisis pada sumber informasi kedua yang memberikan keterangan tentang masa kejayaan kerajaan klasik Kutai, yaitu legenda atau sumber kesusastraan. *Hikayat Kutai* atau *Silsilah Kutai* yang terkenal memberikan gambaran tentang bukan hanya struktur kekuasaan yang ada di kerajaan ini, melainkan juga hubungan dinasti yang berkuasa dengan pusat kekuasaan di luar Kutai, khususnya Jawa. Di samping itu juga karya ini menggambarkan bagaimana dinamika internal terjadi di kalangan elite penguasa Hindu di Kutai, dan jangkauan kekuasaan Kutai di wilayah Kalimantan sekarang. Dari uraian yang ada dalam *Silsilah Kutai* tersebut, bisa diduga bahwa periode yang dicakup jauh setelah Mulawarman berkuasa dan mengisahkan raja-raja Hindu yang berkuasa di Kutai antara abad VIII dan abad XV.

— Di samping informasi tentang hubungan dengan Jawa, *Salasila Kutai* juga memberikan gambaran tentang struktur pemerintahan yang berlangsung di Kutai sebelum kedatangan Islam; dengan demikian, ketika Hinduisme masih dominan sampai abad XV. Kerajaan Kutai diperintah oleh seorang raja yang menjadi pucuk pimpinan dan sesuai dengan kosmologi Hindu, menjadi sentra mandala kosmologis. Meskipun dianggap sebagai titisan dewa (kultus *devaraja*) dan memegang kekuasaan tertinggi yang bersifat absolut, dalam memerintah raja didampingi oleh lembaga penasihat yang terdiri atas para pangeran sebagai kerabat dekatnya dan berada di lingkungan istana.

Di samping raja dan lembaga penasihat adat ini, dalam struktur di bawahnya terdapat kelompok *Tanah* atau yang disebut *banuwa*. Mereka terdiri atas para mantri atau pejabat tinggi pelaksana perintah dalam kerajaan, atau para kepala daerah yang menjadi taklukan Kutai, seperti

wazir di Berau. Para mantri di kerajaan yang menjadi pelaksana perintah raja terdiri atas empat orang, dan mereka wajib menyampaikannya kepada para kepala daerah yang bergelar *punggawa*. Punggawa akan meneruskannya kepada rakyat untuk dilaksanakan. Para mantri yang tergabung dalam kelompok *Tanah* ini memiliki posisi strategis karena bersama raja dan kerabatnya ikut menyusun kebijakan dalam kerajaan.⁸

Selain struktur pemerintahan, informasi yang diberikan oleh sumber itu adalah adanya perpindahan ibu kota. Meskipun sebelumnya dikatakan bahwa Muara Kaman menjadi kedudukan raja, pada generasi berikutnya tampaknya Kutai Lama semakin berperan. Namun demikian, posisi ibu kota ini juga tidak permanen karena beberapa kali perpindahan terjadi, dan diduga perpindahan ini berlangsung bersama dengan pergantian raja yang memerintah atau dinasti. Nama Kerajaan Kutai Kartanegara juga mulai digunakan ketika kedudukan raja berada di Kutai Lama, yang terletak di dekat Gunung Jaitan Layar serta tidak jauh dari muara sungai Mahakam.

Lokasi kedua yang disebut pernah menjadi kedudukan raja adalah Pamarangan, di muara Sungai Jembayan yang tidak jauh dari Samarinda. Selanjutnya, Tenggarong dipilih karena lokasinya yang lebih tinggi daripada Pamarangan di muara Sungai Mahakam memberikan jaminan keamanan secara geografis. Akhirnya, Gresik disebut-sebut sebagai lokasi yang juga pernah dijadikan pusat kerajaan. Semua ini masih tidak terlepas dari hubungannya dengan muara sungai besar dan khususnya jalan ke luar yang paling mudah menuju laut sebagai sarana komunikasi ke luar dan masuk utama bagi Kerajaan Hindu Kutai Kartanegara.

Selain bukti prasasti, bukti legenda juga menunjukkan bahwa pada masa keberadaannya Kerajaan Kutai dan daerah taklukannya di sepanjang pantai timur dan utara Kalimantan berada dalam suatu struktur yang tersusun baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kehidupan sosial di Kutai diatur oleh suatu bentuk stratifikasi pemerintahan yang berbentuk kerajaan dan terbagi antara elite politik dan kalangan masyarakat. Sementara itu, secara horizontal, ada hubungan antara individu, baik yang terjadi di kalangan elite maupun di kalangan masyarakat umumnya. Keduanya membentuk suatu sistem kehidupan sosial budaya yang lengkap dengan nilai-nilainya.

8 S. W. Tromp, "Eenige Mededeelingen omtrent de Boegineezen van Koetei" dalam *Bijdrage Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1887, vol. 36, hlm. 170.

Legenda yang dimaksudkan di atas tertuang dalam bentuk tertulis sebagai suatu karya sastra yang disebut *Kronik Kutai*. Dalam hal ini *Kronik Kutai* jangan hanya dilihat sebagai suatu bentuk karya sastra yang dipenuhi dengan legenda fiksi, tetapi harus dipandang sebagai salah satu pandangan historis penulis tentang zamannya atau tentang proses yang berlangsung di negeri tersebut.

Het ligt voor de hand, dat de kronieken een genre geworden zijn, waar langzamerhand zekere geijkte normen voor ontstonden. Geen vorstenhuis, dat zich zelf respecteerde, kon het ten slotte zonder kroniek doen. Een dergelijk geschrift vormt als het ware een der peilers van het koningschap. Met de primitieve eerbied voor het geschreven boek beschouwde met dit al seen ontbetwistbaar testimonium voor de echtheid, de adeldom, de verhevenheid van het vorstelijk geslacht.⁹

Telah jelas bahwa hikayat menjadi suatu aliran yang perlahan-lahan memunculkan norma yang baku. Tidak ada dinasti raja-raja yang dihormati akhirnya bisa bertahan tanpa hikayat. Suatu tulisan demikian menjadi salah satu pilar kerajaannya. Dengan penghormatan primitif kepada kitab yang ditulis, orang menganggapnya sebagai kesaksian tak terbantahkan bagi keunggulan, kemuliaan, dan keaslian keturunan raja.

Dari pernyataan di atas bisa diketahui bahwa hubungan timbal balik muncul antara hikayat dan pembuatnya atau dinasti. Hikayat ada karena dinasti, sementara dinasti tidak ada tanpa keberadaan hikayat. Dari situ bisa diketahui nilai-nilai validitas dan objektivitas historis terkait dengan keberadaan dinasti dan dinamika sosial yang dialami oleh dinasti tersebut, meskipun bukan kebenaran yang terkandung pada perilaku atau kebijakan yang diambil oleh para tokohnya.

Sebagai sumber historis, tentu saja kronik atau hikayat perlu digunakan secara cermat mengingat selain unsur-unsur legenda dan subjektivitas yang disebutkan di atas, era pembuatannya berbeda jauh dengan peristiwa yang dikisahkannya. *Hikayat* atau *Kronik Kutai* dibuat di Kerajaan Banjarmasin yang berkedudukan di Martapura, atas perintah penguasanya Pangeran Sinum Panji Mendapa. Penguasa ini hidup pada pertengahan pertama abad XVII dan menurut informasi, ia memerintahkan penulisan *Hikayat Kutai* untuk mengenang peristiwa

⁹ Cornelis Alting Mees, *De kroniek van Koetai: Tekstuitgave met toelichting* (Santpoort: N.V. Uitgeverij van het C.A. Mees, 1935), hlm. 29.

politik, yaitu kemenangannya atas daerah Muara Kaman yang dianggap sebagai pusat Kerajaan Kutai Hindu.

Unsur legenda yang paling tidak bisa dibantah dan berkaitan dengan tujuan penulisan setiap hikayat yang berhubungan dengan legitimasi kekuasaan raja-raja yang menyuruh penulisannya adalah pada keturunan. Asal-usul dinasti atau raja pertama yang berkuasa umumnya selalu digambarkan sebagai berada dalam lingkup gaib, termasuk di Kutai. Menurut *Kronik Kutai* ini, raja pertama Kutai berasal dari sebuah bola emas. Anak yang lahir dari bola ini menggenggam keris dan ayam jantan, yang selalu menang dalam aduan. Dari situ kesaktian dan keabsahannya untuk menonjol dan akhirnya berkuasa diperoleh dan diakui oleh masyarakat sekitarnya di daerah Kutai.

Keris juga disimbolkan sebagai senjata yang identik dengan kesaktian dan keperkasaan dalam berperang. Pemegang keris melambangkan sosok yang mampu berperang dan pantas menjadi penguasa.¹⁰ Dengan ayam dan keris ini, dilambangkan bahwa leluhur dinasti Kutai memiliki keunggulan dalam bertempur, baik pada bentuk hewan maupun manusia. Akibatnya, kedua benda itu selalu menyertai raja-raja Kutai ke mana pun pergi seperti yang diungkapkan dalam *Hikayat Kutai* dan mereka selalu memenangkan pertarungan, baik melawan hewan (adu ayam)¹¹ maupun melawan manusia.

Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa raja pertama Kutai, yang bernama Maharaja Dewa Agung Sakti, diturunkan langsung dari langit atas permintaan terus-menerus dari seorang punggawa besar yang berkedudukan di Kutai (*op aanhoudend smeeken van eenen in Koetei gezetennen Panggawa Besar*).¹² Menurut versi itu, Dewa Agung Sakti memiliki keturunan yang banyak dan menghuni Kutai serta memerintah mereka sebagai seorang raja. Dengan demikian, dalam versi ini bisa diketahui bahwa Kutai sudah dihuni oleh orang dan mungkin sudah memiliki struktur yang berlaku karena ada pejabat yang disebut Panggawa Besar, meskipun selain itu tidak jelas lagi.

10 Di dunia Melayu keris menjadi identik dengan status kekuasaan, sementara di Jawa keris identik dengan sifat jantan atau ksatria. Edward Frey, *The Kris: Mystic Weapon of Malay World* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. xii.

11 J. Kreemers, "De Javaans en zĳn hoenders" dalam *Mededeelingen van Nederlandsch Zendinggenootschap*, tahun 1893, nomor, hlm. 14.

12 A.L.W. Weddik, "Extract van de dagelijksche aantekeningen van den civielen gezaghebber voor Koetei en de Oostkust van Borneo, H. von Dewall", dalam *Indisch Archief*, tahun 1848, jilid I.

Selain identitas, juga ada unsur penting lama dalam unsur *Hikayat Kutai* yaitu sebutan nama tempat. Menurut legenda, nama Kutai sendiri bukan berasal dari istilah asli di Kalimantan, melainkan diberikan oleh seorang bangsawan Jawa yang berkunjung ke sana yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nama ini diberikan karena kegiatannya berburu dalam mengejar seekor tupai yang bersembunyi di pohon tebu (*kumpai*). Dari perpaduan kedua kata tersebut muncul nama Kutai untuk lokasi itu.¹³

Dari kejadian ini bisa diduga bahwa Aji Batara Agung Dewa Sakti yang konon datang dari Jawa adalah nama Hindu. Oleh karenanya, kejadian tersebut pasti berlangsung di era dominasi dinasti-dinasti Hindu di Indonesia. Selain itu, pemberian nama ini juga menggambarkan bahwa di lokasi yang disebut Kutai, yang terletak di pantai karena Aji Batara Agung melihat tupai dari kapal dan pergi memburunya, menandai lokasi yang masih kosong sehingga belum ada nama. Oleh karenanya, jika dikaitkan dengan keberadaan prasasti dan Raja Kundunga yang bertarikh tahun 400 Masehi, kunjungan Aji Batara Agung ini pasti berasal dari masa sebelumnya.

Dalam *Salasila Kutai*, juga disebutkan bahwa para elite penguasa Kutai bukan hanya dikenal sebagai para tokoh yang sakti dan berkuasa di daerahnya, melainkan juga disegani oleh daerah sekitarnya dan ketenaran mereka tersebar luas bahkan hingga ke Banjar dan Tanah Jawa. Sementara itu, dalam struktur pemerintahan kewilayahan Kutai disebutkan bahwa daerah ini didominasi oleh empat kampung utama: Jahitan Layar, Hulu Dusun, Binalu, dan Sembaran. Keempatnya diperintah oleh empat orang bersaudara keturunan Dewa Agung Sakti dan kemudian mereka bersepakat untuk memperluas kekuasaannya ke daerah sekitarnya. Kerajaan-kerajaan kecil yang disebutkan ditaklukkan oleh mereka adalah Markaman, Kota Bangun, dan Pahu yang sekarang berada di daerah hilir Kutai.¹⁴

Bukan hanya perluasan wilayah, melainkan juga hubungan keluarga dan hubungan politik telah membuat kekuasaan Kutai dikenal luas. Hubungan perkawinan dengan sejumlah penguasa daerah lain mengakibatkan interaksi dan ketenaran sosial dinasti dan Kerajaan Kutai menjadi berkembang. Interaksi dengan penduduk yang tinggal di pedalaman, khususnya di sepanjang aliran sungai besar seperti Mahakam dan Barito disebutkan dalam *Salasila* sebagai sarana bagi

13 S.C. Knappert, *Beschrijving van Onderafdeeling Koetei* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1905), hlm. 1.

14 S. W. Tromp, *Uit de salasila van Koetei* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888), hlm. 5.

perluasan pengaruh. Begitu juga dalam *Hikayat* yang menyebutkan kepergian para bangsawan Kutai ke Jawa dan berjumpa dengan elite penguasa Majapahit menjadi pertanda bahwa pada saat itu hubungan antara kedua kerajaan ini telah terbentuk.

Hubungan dengan Jawa dalam *Salasila* itu bisa ditempatkan dalam kurun waktu setelah abad X karena kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai dari Mataram, Kediri, dan Singasari hingga Majapahit telah ada setelah abad itu. Hal ini tampak dari penggunaan nama-nama yang terpengaruh oleh Jawa pada para bangsawan Kutai, seperti Raja, Raden, Aji, Pangeran, dan sebagainya. Begitu juga unsur lokal mulai menonjol, khususnya dari budaya Dayak Bahau, yang melalui hubungan perkawinan memasuki dunia elite Kutai, meskipun tidak diketahui hubungan kerohanian antara keduanya.¹⁵ Hubungan dengan Dayak dan dengan Jawa, keduanya akan memainkan peranan penting dalam dinamika historis perdagangan dan percaturan sosial ekonomi di Kalimantan Timur.

B. PERDAGANGAN DAN PELAYARAN AWAL

Hubungan yang ditunjukkan oleh Kutai dengan India dan Jawa seperti yang disampaikan di atas membuktikan bahwa interaksi telah terjadi antara bagian dari Pulau Kalimantan ini dengan kawasan luar, yang berlangsung baik secara geografis maupun secara kultural. Kesamaan agama, tradisi, dan budaya yang berkembang menjadi hubungan perkawinan serta kekuasaan bisa dipastikan menyeret dan meluas pada hubungan lainnya, khususnya perekonomian.

Akan tetapi, suatu faktor yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini adalah sarana yang digunakan. Mengingat secara geografis, sentra-sentra yang menjalin interaksi ini terpisah oleh jarak yang jauh dalam bentuk bentang lautan luas, bisa diduga bahwa prasarana hubungan ini berlangsung dengan menggunakan fasilitas pelayaran dan perkapalan. Dengan demikian, pelayaran dengan kapal-kapal, baik dalam lingkup regional maupun global, telah berlangsung pada titik-titik tersebut pada awal kurun waktu Masehi. Dari situ bisa diketahui bahwa ada pola pelayaran yang berlangsung secara rutin.

Pelayaran yang terjadi dengan kapal-kapal yang besar, yang pasti kuat untuk berlangsung dalam jangka waktu lama dan mampu bertahan

15 P. J. Veth, "Het Koeteinsche Vorstenhuis" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1870, jilid I, hlm. 455–456.

terhadap perubahan gejala alam di lautan lepas, pasti memiliki misi dan tujuan yang penting. Tujuan tersebut berkaitan dengan kemakmuran dan kejayaan negara-negara pemilik armadanya, yang pasti memiliki arti penting tinggi sehingga berani menanamkan modal dalam bentuk kekayaan, perlengkapan, dan juga personel untuk mencapainya. Tidak lain dari semua ini adalah tujuan ekonomi yang saat itu menjadi pilar utama bagi kemakmuran negara dan kejayaan kerajaan.

Ekonomi yang dimaksudkan dalam dinamika pelayaran jarak jauh dan melewati samudra ini bisa terdiri atas berbagai cara: perdagangan, penguasaan aset, pertukaran, atau juga menjadi transit. Semua ini bergantung pada pola yang muncul dan komoditas yang ditawarkan pada awal milenium hingga pertengahan pertama milenium kedua. Sampai pertengahan milenium kedua, sekitar abad XVI, pola tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti, termasuk juga sentra-sentra penting saling berganti muncul dan memberikan kontribusinya dalam sistem perekonomian tersebut yang mencakup bentangan kawasan dari Timur Tengah hingga Papua.

Apa yang menarik dari pola perdagangan di atas adalah letak geografis Nusantara, khususnya Kalimantan dan perairan sekitarnya. Dalam pola perdagangan global di atas, beberapa titik penting terbentang dalam rangkaian belahan dunia mulai dari Eropa hingga Jepang. Dari rangkaian itu setidaknya dua kutub memiliki hubungan langsung dengan Nusantara, yaitu India di Asia Selatan dan Kekaisaran Cina di Asia Timur. Keduanya bukan hanya menjadi kutub dagang utama dalam percaturan perniagaan internasional, hubungan antara keduanya bahkan harus berlangsung melewati kepulauan dan perairan Nusantara, yaitu Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Dengan aspek geografis tersebut, sudah bisa diduga bahwa interaksi antara penduduk yang berada di Nusantara dan kedua kekuatan niaga terbesar di Asia pada milenium pertama Masehi tidak bisa dihindarkan. Namun demikian, karena faktor lain di luar perdagangan, seperti agama, budaya, dan politik, hubungan kekuatan yang berkuasa di Nusantara pada masa itu lebih banyak berorientasi ke India daripada ke Cina, seperti yang disampaikan oleh sejarawan J. C. van Leur.

Especially important historically is the fact that the Indonesian sphere came to lie to the east of the mighty Indian sub-continent with its states, ports, shipping and trade, while (probably about the beginning of the Christian era) the Chinese Empire had extended its borders into the plain of Tonkin. Even though the dates in history cannot be given with perfect precision, it can be assumed without any danger that about the same time the Indonesian Archipelago was reached by Indian trade: the powerful, wealthy, extensive overseas trade of the Indian coastal towns.¹⁶

Yang khususnya penting secara sejarah adalah bahwa lingkup Indonesia terletak di sebelah timur anak benua India yang kuat dengan negara-negara, pelabuhan-pelabuhannya, perkapalan dan perdagangannya, sementara (mungkin sekitar awal Masehi) Kekaisaran Cina memperluas batas-batasnya sampai lembah Tonkin. Meskipun angka tahun dalam sejarah tidak bisa diberikan dengan tepat, bisa diduga tanpa risiko bahwa sekitar masa yang sama Kepulauan Indonesia dijangkau oleh perdagangan India: perdagangan maritim yang luas, kaya, dan kuat dari kota-kota pesisir India.

Dari analisis van Leur di atas, bisa diketahui bahwa interaksi yang terjadi antara India dan Indonesia lebih intensif daripada dengan Cina, yang lebih memberikan fokusnya pada daratan Asia. Sementara itu, pengaruh India lebih intensif dalam penetrasinya hingga menjangkau ranah politik dinasti, seperti yang tampak pada nama raja-raja pertama Kutai di era Hindu.

Dengan orientasi demikian, perdagangan dan perkapalan diduga juga berlangsung lebih intensif dengan India daripada dengan Cina. Hal ini disebabkan oleh tingginya dinamika perdagangan ke barat dibandingkan ke timur, terutama setelah kemunculan Islam pada abad VII Masehi yang membentuk struktur politik dan ekonomi baru di Timur Tengah sebagai jalur perdagangan strategis antara Asia dan Afrika. Kemunculan para penguasa Islam pantai di Timur Tengah yang diikuti gelombang pedagang Islam yang memasuki pola perdagangan internasional peralihan milenium telah menciptakan dinamika baru pada perdagangan Asia tanpa adanya konflik yang signifikan.¹⁷

Akan tetapi, meskipun dibandingkan dengan India pengaruh politiknya lebih rendah, peran Cina dalam perdagangan di Nusantara

16 J. C. van Leur, *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History* (The Hague: W. van Hoeve, 1967), hlm. 90.

17 Bahkan Perang Salib yang berlangsung selama 300-an tahun tidak memengaruhi perdagangan maritim yang ada. Para pedagang Kristen Italia tetap saja menjalin hubungan dengan para pedagang Islam di Laut Merah demi kepentingan transaksi bisnis mereka. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies: Selected Writing, Part One* (Bandung: W. van Hoeve, 1960), hlm. 9.

pada era milenium pertama tetap besar. Hal ini tampak pada analisis dalam catatan yang dibuat oleh para musafir dan nakhoda kapal-kapal dagang Cina yang berkunjung di Nusantara. Semua kota dagang Nusantara yang menjadi bandar perdagangan pada era itu memiliki nama Cina dan tercatat dalam dokumen kekaisaran. Bahkan beberapa tempat, seperti Palembang atau *San-fo-tsi* yang dikenal sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya pada abad X di Sumatra, memiliki peran khusus dalam hubungan dengan Cina.

Sriwijaya menjadi suatu prototipe kerajaan maritim di Nusantara yang tidak hanya bisa mempertahankan perannya dalam perdagangan, tetapi juga dalam hubungan sosial-kultural dengan dua kutub utama perdagangan dunia saat itu. Dengan India, Sriwijaya menjalin kerja sama dengan Negapatnam di daerah Chola dalam hal pusat studi keagamaan, sementara dengan Guangcow yang merupakan bandar paling selatan Kekaisaran Cina, Sriwijaya mempertahankan hubungan transaksi utama.¹⁸

Posisi strategis Sriwijaya di tepi Selat Malaka dan keahlian para penguasanya menggunakan kekuatan maritim dan memanfaatkan unsur-unsur maritim lokal memungkinkan dominasinya atas jalur pelayaran laut sebagai urat nadi utama perdagangan global saat itu.¹⁹ Kekuasaan politiknya yang ditopang oleh penaklukan kekuatan perompak laut lokal antara tahun 600 dan 1100 Masehi menjadikan Sriwijaya sebagai pengontrol jalur laut utama dalam perdagangan global era itu, terutama yang mengarah ke Cina dan India sehingga menentukan pasokan komoditas bagi perdagangan dunia.²⁰

Selain Palembang, kota-kota pelabuhan di sejumlah pulau yang menjadi jalur perdagangan utama dicatat dalam catatan Cina. Pada awal milenium pertama, kerajaan-kerajaan Jawa tampil sebagai kekuatan dominan yang mampu menyaingi Sriwijaya. Meskipun kekuatan mereka awalnya bertolak dari hubungan keluarga dinasti, pada akhirnya kompetisi ekonomi maritim tidak bisa dihindari. Beberapa pelabuhan lama di Jawa yang terbentang dari Banten di barat hingga Gresik di timur mulai tampil seiring dengan perluasan komoditas dagang yang

18 Derek Heng, *Sino-Malay Trade and Diplomacy from the Tenth through the Fourteenth Century* (Ohio: Ohio University Press, 2009), hlm. 90.

19 Kathy Sammis, *The Era of Expanding Exchange and Encounter 300–1000 CE* (Portland: J. Weston Walch, 2002), hlm. 62.

20 Laura Lee Junker, *Raiding, Trading, and Feasting: The Political Economy of Philippine Chiefdoms* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1999), hlm. 213.

ditawarkan pada abad XI–XIII. Kemunculan nama-nama seperti *Pu Chia-long* (Pekalongan), *Ta-pan* (Tuban), *Jung-ya-lu* (Ujung Galuh), Lasem, Sedayu, dan Brondong dalam berita Cina menegaskan bahwa kota-kota ini berperan sebagai bandar perdagangan awal milenium kedua Masehi.²¹

Perairan Selat Malaka tetap menjadi jalur paling strategis bagi pelayaran perdagangan selama milenium pertama hingga pertengahan milenium kedua. Oleh karenanya, sejumlah bandar di sana berdiri dan berperan aktif dalam perdagangan dan perkapalan. Salah satu bandar yang paling utama adalah Malaka. Kota yang didirikan oleh seorang bangsawan Hindu dari Nusantara yakni Parameswara²² ini, memiliki nilai strategis geografisnya bagi pelayaran perdagangan sehingga dengan cepat menerima persinggahan dari para pedagang besar internasional. Karena lokasinya, pelabuhan Malaka menjadi tempat penimbunan barang-barang yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Sebagai konsekuensi dari perkembangan ini, hanya dalam waktu satu abad Malaka telah mampu menampilkan dirinya sebagai pusat kerajaan dan perdagangan paling strategis di Asia Tenggara.²³

Di samping Malaka, sebuah bandar lain yang juga tumbuh adalah Sukadana di Pulau Kalimantan. Menurut sejarahnya, Kota Sukadana ini dibangun oleh seorang bangsawan Jawa bernama Praboya yang melarikan diri ke Kalimantan karena terdesak dalam konflik politik di Jawa pada sekitar tahun 1300.²⁴ Atas usahanya untuk membangun suatu pemukiman di lokasi tepi pantai, bangsawan ini berhasil mengumpulkan penduduk dan mendirikan sebuah bandar kecil yang akhirnya dengan

21 Ujung Galuh disebut oleh pendeta Buddha Chou-yu-ka yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1178 terletak di muara Sungai Brantas. Dengan demikian, identifikasi kota ini adalah pelabuhan Gresik di dekat Surabaya. G. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1968), hlm. 186.

22 Tentang asal-usul Parameswara ini masih kabur. Ada versi yang menyebutkan dia adalah bangsawan Sriwijaya yang melarikan diri ke Tumasik dan kemudian ke Malaka, tetapi ada yang menyebutkan dia adalah bangsawan Singasari. Melihat tahun kedatangannya 1292 bersamaan dengan keruntuhan Singasari di Jawa, diduga Parameswara adalah bangsawan Singasari, meskipun mungkin keturunan dari Palembang. Di samping itu Sriwijaya pada tahun tersebut sudah bukan lagi sebagai kekuatan dominan, melainkan sebagai pelabuhan kecil. Yusoff Iskandar, *Parameswara, Pengasas Empayar Malaka* (Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 2005), hlm. 93.

23 Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the Present* (Bloomington: Macmillan Press, 1981), hlm. 18.

24 Mengingat pada tahun itu Jawa dikuasai oleh Kerajaan Majapahit yang baru pada tahun-tahun pertama tumbuh dan masih belum mencapai kestabilan politik di bawah Raden Wijaya, ada kemungkinan yang dimaksud Praboya ini berasal dari pihak lawannya yang kalah, yaitu dari dinasti Kediri. P.J. Veth, *Java: Geographisch, Ethnologisch, Historisch, eerste deel: oude Geschiedenis* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1912), hlm. 77.

memanfaatkan lokasinya bagi perdagangan, tumbuh menjadi sebuah pelabuhan laut yang berperan bagi jalur pelayaran di sebelah barat Kalimantan.²⁵

Sukadana kemudian juga tumbuh dan berkembang, selain akibat lokasinya yang strategis, tetapi juga produk lokal yang kemudian menjadi salah satu komoditas penting yang diandalkan dalam perdagangan. Pada masa itu produk yang dimaksudkan adalah manik-manik, yang kelak pada abad XVII kemudian diketahui sebagai intan Sukadana. Mengingat manik-manik pada periode perdagangan milenium pertama dianggap sebagai komoditas mewah untuk konsumsi kalangan elite, produktivitas Sukadana sebagai distributornya segera memberikan potensi keuntungan yang besar bagi daerah ini.²⁶

Banjarmasin menempati posisi penting berikutnya setelah Sukadana sebagai pelabuhan di Pulau Kalimantan, khususnya dalam perdagangan pada milenium pertama dan kedua. Seperti halnya Malaka dan Sukadana, menurut legenda Banjarmasin sebagai pelabuhan dan pusat kerajaan juga dibangun oleh seorang bangsawan Hindu dari Jawa yang bernama Raden Samodera sekitar akhir abad XV.²⁷ Akan tetapi, sebelum kemunculan tokoh ini, di Banjarmasin suatu dinasti telah terbentuk pada era peradaban Hindu. Dalam catatan hikayat, diketahui bahwa Empu Jatmaka atau Jatmika menjadi raja dengan gelar Maharaja Candi antara periode 1380–1420, dan digantikan oleh putranya, Raden Surianata atau Lambung Mangkurat, yang berkuasa sampai tahun 1460. Antara Surianata dan Samodera ini masih terdapat beberapa orang raja yang berkuasa.²⁸

Meskipun dari sumber hikayat dengan perhitungan angka tahun tempat ini mulai diketahui memiliki sejarah sejak tahun 999, dinamika

Kalimantan Barat

25 Nick Salafsky, *The Forest Garden Project: An Ecological and Economic Study of Locally Developed Land-Use System in West Kalimantan* (North Carolina: Duke University Press, 1993), hlm. 10.

26 Sejumlah daerah penghasil manik-manik di luar Kalimantan kemudian memanfaatkan jalur pelayaran dan perdagangan ke serta dari Sukadana untuk menjual manik-maniknya di sana. Misalnya, Banten pada awal abad XVII mengirimkan produk manik-manik lokalnya untuk dijual di Sukadana. Peter Francis, *Asia's Maritime Bead Trade 300 BC to the Present* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002) hlm. 181.

27 Penetapan batas waktu ini disesuaikan dengan peristiwa karena tidak lama kemudian agama Islam masuk di Banjarmasin dan Raden Samodera yang tampaknya berada dalam suasana konflik di Banjar masuk Islam untuk memperoleh dukungan dari para pedagang Muslim. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Seminar Sejarah Nasional III, Seksi Pasca Kuno* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 117

28 J. Hageman, Jcz., "Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent Zuidelijk Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1861, jilid 1, hlm. 199.

mulai tampak terjadi pada akhir abad XIV. Pengaruh Hindu selama masa itu masih tetap diketahui, bahkan tercatat pada tahun 1400 masih ada pendirian sebuah kerajaan Hindu di pedalaman Banjar yang disebut Kerajaan Negara. Keberadaan kerajaan Banjar Hindu ini tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi yang menopangnya, dan tidak terpisahkan dari keterlibatannya dalam perdagangan perkapalan yang berlangsung di Laut Jawa.

Selain Banjarmasin yang terletak di muara Sungai Barito dan menjadi tempat tujuan akhir pelayaran perahu yang berasal dari sepanjang aliran sungai ini di pedalaman Kalimantan Tengah, suatu pola geografis serupa ditemukan di Kalimantan Utara, yaitu Brunei. Kota pelabuhan ini terletak di muara Sungai Brunei dan seperti halnya Banjarmasin juga memanfaatkan lokasinya sebagai titik temu pelayaran pantai dan laut dengan pelayaran sungai dari pedalaman. Dari pertemuan ini dinamika ekonomi tumbuh yang membuat ramai perdagangan dan memberikan keuntungan bagi penguasa setempat. Dari hasil keuntungan yang diperoleh, elite Melayu Kalimantan yang berkuasa di Brunei membangun istananya yang terletak beberapa kilometer dari muara sungai.²⁹

Selain rangkaian pelabuhan atau bandar yang berperan dalam dinamika perdagangan dan perkapalan niaga pada era milenium pertama, produk perdagangan juga berperan dan ikut menentukan fungsi dari rangkaian pelabuhan ini. Salah satu sifat dari sistem ini adalah ketergantungan pada produk komoditas yang memiliki tingkat penawaran tertinggi dalam komersialisasi global saat itu. Dengan ketergantungan itu, keberadaan dan sumber produksi ini menentukan tumbuh dan berkembangnya pelabuhan serta juga kemunculan pelabuhan baru.

Dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh van Leur berikut ini perlu diperhatikan

*In Indonesia, as elsewhere, the trade was one in valuable high-quality product. In it spice, expensive sorts of wood, forest products, animal products, and exotic birds and other curiosities were shipped out from Indonesia and similar Indian and Near Eastern wares were brought in. There as elsewhere it was a trade splendid and trifling.*³⁰

29 J. H. Kernkamp, *De reis om wereld van Olivier van Noort 1598–1601* (Amsterdam: P. N. van Kampen en Zoon, 1937), hlm. 146.

30 J. C. van Leur, *op.cit.*, hlm. 90.

Di Indonesia, seperti di tempat lain, perdagangan marak dalam produk berkualitas tinggi yang berharga. Di dalamnya rempah, jenis-jenis kayu mahal, produk hutan, produk hewan, dan burung yang menarik serta keragaman lain dikapalkan ke luar dari Indonesia dan barang-barang yang mirip dari India dan Timur Dekat dibawa masuk. Di sana, sebagaimana di tempat lain, perdagangan ini cukup indah dan sederhana.

Dalam pernyataan van Leur di atas tampak bahwa sejumlah produk yang dihasilkan di Indonesia merupakan komoditas utama dalam perdagangan. Produk itu bernilai tinggi dan menguntungkan, yang diduga bisa terjadi karena kelangkaan dan tingginya kebutuhan permintaan dunia terhadapnya.

Rempah yang saat itu menduduki posisi penting sebagai komoditas dalam transaksi mencakup produk tanaman cengkih, pala, fuli, dan lada. Tiga yang pertama tumbuh di Kepulauan Maluku dengan Ambon, Ternate, dan Tidore sebagai pusat-pusat penimbunan produk bagi penjualan dan perkapalannya.³¹ Sementara itu, lada bisa ditemukan di sejumlah tempat lain yang kemudian juga berperan dalam perdagangan, seperti Banten, Palembang, Sukadana, dan Banjarmasin. Berbeda dengan pusat-pusat di Maluku, pelabuhan lada umumnya juga berfungsi sebagai pelabuhan transit dan bukan hanya pusat penimbunan produksi dari daerah pedalamannya. Oleh karenanya, kota-kota pelabuhan lada ini tumbuh menjadi pasar transaksi yang bukan hanya melayani kebutuhan lokal, melainkan juga sebagai pasar domestik.³²

— Di Eropa kebutuhan rempah yang tinggi bisa ditunjukkan dalam tulisan berikut ini.

*Wel zijn deze vereenigeningen opgericht om geneeskrachtige kruiden te zoeken voor de vele kwalen waaraan de geheele maatschappij leid, doch juist daar, waar medewerking noodig is, waar door gezamentlijke krachtsinspanning het zoeken vergemakkelijkt zour worden, daar trekken de verschillende Nederlandsche vereenigeningen zich terug en bemoeielijken door hunne isoleering de bereiking van het doel, ten gevolge waarvan zeer zeker de oplossing der quaestie wordt vertraagd.*³³

31 G. W. W. C. Baron van Hoevel, "Over de middelen tot herstel van de welvaart en tot ontwikkeling der Ambonsche bevolking" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1871, jilid 1, hlm. 389.

32 Salah satunya adalah Banten yang menjadi pasar bagi produk lada daerah kekuasaannya di Lampung hingga awal abad XIX dan dengan lada itu berhasil tumbuh menjadi bandar terbesar di bagian barat Jawa selama abad XV–XVII. P.H. van der Kemp, "Raffles' Bezetting van Lampongs in 1818" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1899, hlm. 39.

33 "Maar blijf hier niet staan" dalam *De werkmansbode*, tanggal 15 Januari 1879, lembar ke-1.

Organisasi dibentuk untuk mencari rempah-rempah yang menyembuhkan bagi banyak penyakit yang melanda seluruh masyarakat, tetapi bila kerja sama diperlukan, bila melalui pencurahan tenaga bersama pencarian itu akan dipermudah, di sana berbagai organisasi Belanda menarik diri dan kesulitan akibat isolasi mereka akan memperlambat pencapaian tujuan itu, yang jelas mengakibatkan tertundanya penyelesaian masalah.

Dalam pernyataan di atas jelas bahwa rempah selain sangat dibutuhkan, juga menjadi pertaruhan dalam kehidupan sosial. Begitu penting nilai rempah ini sebagai sarana pengobatan, sehingga kehidupan sosial masyarakat berubah hanya untuk mendapatkannya. Perubahan ini tampak dengan munculnya organisasi atau kongsi yang diserahi dan dipercaya oleh masyarakat untuk memperoleh rempah-rempah tersebut dan hal ini akan menciptakan perubahan dalam sistem ekonomi perdagangan komoditas tersebut di Indonesia pada abad XVII.

Selain rempah, produk hutan juga menjadi salah satu komoditas ekspor dari Nusantara ke luar negeri. Produk hutan ini terdiri atas berbagai unsur tanaman hutan, seperti jelutung, getah, damar, rotan, lilin, madu dan berbagai jenis akar-akaran, di samping juga berbagai produk kayu, seperti kayu cendana, kayu besi, kayu hitam, kayu jati, dan semua yang berfungsi bagi pembangunan. Di Kalimantan, bentang lahan hampir semuanya didominasi oleh hutan sebelum abad XVI kecuali di sepanjang pantai yang mulai berkembang sebagai pelabuhan dan pusat-pusat kekuasaan. Kekayaan alam hutan Kalimantan sudah dikenal sejak dahulu dan memasok komoditas yang hampir tanpa batas.

Borneo's forest is the most species rich on Earth. It is thought to have fifteen thousand species of higher plants, ten thousand of which are endemic; they evolved in Borneo and are found nowhere else.³⁴

Hutan Kalimantan merupakan hutan yang paling kaya di atas bumi. Diduga hutan ini memiliki lima belas ribu spesies tanaman yang tumbuh tinggi, sepuluh ribu di antaranya bersifat endemis; mereka berevolusi di Kalimantan dan tidak ditemukan di tempat lain.

Dari situ tampak bahwa Kalimantan sendiri memiliki kekayaan alam yang bisa diperhitungkan sebagai komoditas dalam transaksi niaga regional dan global di Nusantara pada era Pertengahan di samping rempah. Dalam sejumlah laporan niaga yang dibuat oleh VOC pada awal abad XVII, sejumlah produk hutan seperti lilin, damar, dan madu,

³⁴ Alex Shoumatoff, *The Wasting of Borneo: Dispatches from a Vanishing World* (Boston: Beacon Press, 2017), hlm. 106.

di samping beberapa produk kayu yang berasal dari Kalimantan, tercatat sebagai komoditas ekspor ke Eropa.³⁵ Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa produk hutan memiliki posisi, nilai, dan status yang sama, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dibandingkan dengan produk rempah sebagai komoditas ekspor.

Dengan kondisi geografi demikian, Kalimantan periode milenium pertama dan milenium kedua menjadi pemasok produk hutan utama. Melalui alamnya yang didominasi hutan dan aliran-aliran sungai besar yang tidak tersentuh oleh manusia, setidaknya sampai pertengahan pertama abad XIX,³⁶ siap memasok komoditas yang dibutuhkan dan diminta oleh pangsa pasar internasional lewat agen-agen perdagangan dan para pemilik armada kapal. Mereka juga menjadi penerima pasokan komoditas impor yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan dibawa oleh agen-agen perdagangan tersebut. Dengan demikian, Kalimantan menjadi pusat barter domestik meskipun tidak sebesar pusat-pusat barter regional seperti di Malaka, Banten, Tuban, dan Makassar yang memiliki potensi pelabuhan dan kekuatan daya tarik lebih besar bagi perdagangan.

Kunci dari keberadaan dan pertumbuhan pelabuhan transito ini adalah adanya komoditas yang dibutuhkan oleh para pedagang pendatang dan komoditas yang digunakan sebagai sarana pertukaran (barter) dengan komoditas produk lokal. Kain dari India dan beras dari Jawa sebagai kebutuhan primer manusia masa itu, termasuk lapisan elite, menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatra bisa mencapai status perdagangan transito, yang tidak bisa dicapai oleh pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan dan bahkan Maluku sendiri sebagai sumber komoditas termahal, yaitu rempah.³⁷

Proses tersebut juga terjadi di Kalimantan. Kalangan elite penguasa menggunakan beras sebagai bahan pangan mereka, sementara kawulanya lebih banyak menggunakan produk hutan atau produk sawah lain yang ditanam di sepanjang aliran sungai, seperti jagung, ubi, dan

35 R. Bos, *Oost Indie en de Wereldeelen: een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van de landen buiten Europa* (Groningen: P. Noordhoff, 1897), hlm. 30.

36 H. A. Krooneman, *Aardrijkskunde der Nederlandsche bezittingen buiten Europa* (Utrecht: J. J. H. Kemmer, 1860), hlm. 36-37.

37 Sampai awal abad XVII beras masih digunakan sebagai barter bagi rempah. VOC setelah pengepungan Mataram pada tahun 1629 mengangkut 264 *last* beras dengan sejumlah besar ternak ke Ambon untuk membeli rempah dari sana. Rempah dari Ambon yang ditukar dengan beras itu kemudian dibawa ke Batavia dan dijual sebagai komoditas ekspor. J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, vijfde deel* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1870), hlm. 169.

sebagainya. Beras digunakan sebagai alat pembayaran bagi produk hutan, termasuk kayu yang terkenal dari pedalaman dan diekspor lewat pelabuhan di pesisir utara dan timur, seperti Brunei, Sarawak, dan Kutai.³⁸

C. KEKUATAN TRANSNASIONAL

Memasuki abad XIV yang merupakan periode transisi dalam historiografi Indonesia, setidaknya ada dua peristiwa penting yang terjadi dan memengaruhi seluruh struktur kehidupan sosial, khususnya perdagangan yang ada selama ini. Meskipun secara politik dominasi Hindu sangat terasa dengan pengaruh peradaban dan hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan besar Hindu dan Buddha di Nusantara dengan kerajaan-kerajaan di India, dalam aspek ekonomi hal ini tidak begitu terlihat. Kehidupan ekonomi Nusantara tidak terikat dan tidak bergantung pada pelabuhan-pelabuhan dan kerajaan pantai di India, tetapi lebih berorientasi pada bandar-bandar domestik, seperti Malaka, Palembang era Sriwijaya, dan Banten. Begitu juga tidak tampak jelas adanya ketergantungan kehidupan bandar-bandar di Nusantara pada kota-kota pelabuhan di Cina, meskipun kekaisaran ini merupakan konsumen dan produsen penting dalam pola dan sistem perdagangan yang terbentuk sepanjang milenium pertama.

Selama satu milenium ini, khususnya pada abad XIV, suatu pola perdagangan perkapalan yang berlangsung di Kepulauan Nusantara membentuk jalur perkapalan. Perkapalan ini bisa tumbuh bukan hanya menghubungkan daerah produsen dengan daerah konsumen melainkan juga menghubungkan antar-pelabuhan konsumen dan transit sehingga membentuk suatu rantai perdagangan timbal balik yang hidup dan dinamis. Peran para pedagang yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan etnis ini terintegrasi dalam sistem perdagangan, baik berdasarkan pada moneter maupun barter, yang memberikan peran dan fungsi masing-masing.

Sistem ini mengalami sedikit perubahan pada abad XIV dengan adanya dua faktor utama yang menentukan: pertama, meningkatnya peran pedagang dari Asia Barat yang menggeser peran pedagang India

³⁸ Beberapa jenis kayu yang diekspor dari pelabuhan-pelabuhan ini adalah kayu krusi, kayu sonokeling, kayu agila, kayu cendana, dan kayu sapan yang digunakan untuk pembuatan perahu, rumah, dan perabotan. "Houthandel in China" dalam *De Ingenieur*, tanggal 12 Desember 1896, hlm. 536.

dan fungsi mereka sekaligus sebagai penziar agama³⁹, dan yang kedua adalah tampilnya Majapahit sebagai suatu kekuatan domestik pertama yang mampu menegakkan hegemoni atas semua lokasi perdagangan mulai dari sentra produksi ke pelabuhan-pelabuhan konsumen dan sebaliknya. Dengan pusatnya di Jawa, Majapahit bisa menegakkan keseragaman dalam perdagangan meskipun tidak mengubah pola yang terjadi dan tidak melakukan intervensi yang terlalu dalam.

Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu raja terakhir Singasari, Kartanegara, dari puing-puing baik Kerajaan Singasari maupun Kerajaan Kediri pada tahun 1293. Dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Jawa dan dengan didukung oleh pamannya, Adipati Madura, Wijaya berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah bekas kekuasaan Singasari yang kemudian bersatu di bawah dirinya dan mengakuinya sebagai raja Majapahit pertama. Meskipun pada awal pemerintahannya banyak penguasa daerah yang menentangnya, dan juga pemerintahan penggantinya Jayanegara pada awal abad XIV, Majapahit berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan hingga pada pertengahan abad XIV mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk.

Melalui Mahapatih Gajah Mada, kekuasaan Majapahit diperluas bukan hanya di Jawa, melainkan juga ke luar Jawa. Hampir semua pulau di Nusantara ditundukkan dan mengakui kekuasaan Majapahit dan berada di bawah taklukannya setidaknya selama hampir satu abad. Bukti dari luas dan besarnya kekuasaan Majapahit ini dilukiskan dalam sebuah karya sastra yang disusun oleh pujangga kerajaan Empu Prapanca, dengan nama *Negarakertagama*⁴⁰. Di dalam kitab ini dikisahkan bagaimana daerah-daerah di luar Jawa ditundukkan oleh Majapahit dan Majapahit menegakkan hegemoninya, baik di darat maupun di laut, dengan kekuatan armadanya untuk mengontrol semua kegiatan perekonomian, termasuk jalur-jalur perdagangan.⁴¹

39 Peran para saudagar Arab dan Islam lainnya sebagai penziar agama Islam secara langsung perlu diragukan karena selain kedalaman ilmu agama mereka, juga waktu mereka untuk khusus melakukan syiar agama tersita oleh kepentingan mereka secara ekonomi. Namun demikian, interaksi yang mereka jalin dengan penduduk lokal, khususnya mereka yang tidak termasuk dalam kasta tinggi dalam stratifikasi sosial memudahkan penyebaran ide-ide Islam lewat transaksi dan interaksi ini dan akibatnya proses diversifikasi perlahan-lahan terjadi. P. Simon Buis SVD, "Het Mohammedanism in Floers" dalam *Het Katholieke Missien*, tahun ke-50, Juli 1925, hlm. 176.

40 H. Kern, "Eenige plaatsen uit de Negarakertagama betreffende Hayam Wuruk" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1905, vol. 58, hlm. 363.

41 Haris Sukendar, *Perahu Tradisional Nusantara: Tinjauan melalui Bentuk dan Fungsi* (Jakarta: 1998, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 75.

Di Pulau Kalimantan, proses ekspansi Majapahit dan daftar daerah yang ditundukkan olehnya segera diketahui dari *Negarakertagama*. Nama Kalimantan disebut dalam kitab ini sebagai Tanjungpura, sementara beberapa tempat yang merupakan kerajaan dan ditaklukkan oleh Majapahit disebutkan. Di antara tempat-tempat ini adalah Kutai, Permatapura (kemudian menjadi Martapura), Sukadana, Mempawa, Bulungan, Pasir, Banjar hingga Brunei menjadi daerah taklukan Majapahit. Dengan demikian, seluruh pesisir Kalimantan dikuasai dan dikontrol oleh armada laut Majapahit yang mendominasi perdagangan.⁴²

Hubungan dengan penguasa-penguasa setempat dipertahankan terbatas pada pola patron-klien. Penguasa pusat Majapahit tetap memercayakan kekuasaan dan pemerintahan kepada raja-raja setempat dan keturunannya, dan sebagai bukti kepatuhan mereka adalah pemungutan upeti setiap tahun. Pusat juga tidak mencampuri persoalan internal tiap-tiap kerajaan. Hal ini juga berlaku di kerajaan-kerajaan Kalimantan Timur seperti Pasir yang selama di bawah kekuasaan Majapahit tetap diperintah oleh para penguasa Hindu yang merupakan keturunan Dayak setempat, yang menurut legenda menikah dengan seorang putra penguasa Jawa dari daerah Giri (Jawa Timur).⁴³

Kasus Brunei juga serupa dengan Pasir. Dalam catatan sejarahnya, Brunei ditaklukkan pada tahun 1365 dan pada tahun 1368 mengirimkan upeti kepada penguasa pusat Majapahit di Jawa dalam bentuk 40 kati kapur barus dan air buah segar setiap tahun dengan kapalnya. Namun demikian, hubungan dagang Brunei dengan Kekaisaran Cina masih tetap berlangsung dan kapal-kapal Cina juga datang berkunjung ke Brunei setiap tahun.⁴⁴

Begitu juga di Kerajaan Kutai atau Tanjung Kutei, atau juga disebut Tanjung Kuti, intervensi Majapahit tidak banyak memengaruhi perubahan struktural. Kutai tetap berfungsi sebagai pelabuhan di jalur

42 Anonim, "De Onderhoorigheden van Madjapahit" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1867, jilid-1, halaman 90. Keterangan ini juga tercatat dalam *Hikayat Melayu*, selain dari *Negarakertagama*. Pengakuan *Hikayat Melayu* tentang kekuasaan Majapahit menjadi penegasan bahwa daerah-daerah yang disebutkan benar-benar taklukan Majapahit, mengingat *Negarakertagama* sendiri baru ditemukan di Selaparang, Lombok pada tahun 1897, sementara *Hikayat Melayu* ditulis pada abad XVII.

43 Dalam legenda, putra raja Hindu di Giri disebut-sebut menikahi putri Tumenggung Tokkio dari Pasir. Mengingat tidak ada kerajaan di daerah Giri, maka bisa diduga bahwa yang dimaksudkan adalah seorang bangsawan Majapahit karena letak Giri tidak jauh dari Majapahit. Di samping itu, tidak ada kerajaan Hindu di Giri karena Giri kelak setelah keruntuhan Majapahit merupakan pusat penyebaran Islam yang dikenal dengan pesantrennya. Anonim, "Het landschap Pasir" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, tahun 1905, vol. 58, hlm. 566.

44 Brunei, *Brunei Darussalam* (Bandar Sribegawan: Ministry of Finance, 2004), hlm. 77.

perdagangan dan aktivitas perdagangan tetap berlangsung. Ini terbukti dalam *Salasila Kutai* yang menyebutkan bahwa pelabuhan Kutai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang Cina (wangkang). Nakhoda dan para pedagang Cina ini bersahabat dengan penguasa Kutai yang bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti, suatu nama Hindu, yang membantu mereka saat mengalami badai sehingga wangkang mereka kandas. Akibat lain dari kecelakaan itu adalah layar kapal mereka semua robek, sehingga harus dijahit atas bantuan Aji Batara. Dari situ muncul nama tempat Jahitan Layar. Ini membuktikan bahwa hubungan dagang Kutai dengan Kekaisaran Cina tetap berlangsung.⁴⁵

Meskipun tidak mengalami kekuasaan langsung dari Majapahit, tradisi Hindu yang ada di Majapahit tetap berpengaruh pada kehidupan di Kutai dan sekitarnya. Sesaji Gunung Kombeng merupakan salah satu tradisi yang diwariskan oleh Majapahit bagi Kutai dan diikuti oleh para penguasa Kutai dan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan upacara dan bentuk-bentuk peradaban lain, tradisi lokal dipadukan dengan unsur-unsur kebudayaan yang dibawa dari Majapahit.⁴⁶

Bukan hanya di jalur pelayaran Pulau Kalimantan saja, kekuasaan Majapahit juga menjangkau sumber produksi rempah di Kepulauan Maluku, dan bahkan *Negarakertagama* menyebutkan lebih jauh ke timur di Tanah Papua. Beberapa sebutan tempat seperti Wanda (Banda), Ambwan (Ambon), Maloko (Ternate), dan Muar (Kei) membuktikan bahwa seluruh kepulauan produksi rempah itu menjadi taklukan Majapahit. Peneliti Belanda Ph. Rouffaer menemukan istilah tempat Wwanin yang kemudian diejanya menjadi Onin di pantai barat Papua.⁴⁷

Akan tetapi, para peneliti Barat yang saat itu melakukan kajian ini menggunakan pandangan yang anakronis, mengingat mereka menempatkan peristiwa itu dari kacamata era kedatangan orang Barat yaitu Portugis seabad kemudian, dengan menekankan arti penting Kepulauan Maluku sebagai sumber produksi dan titik awal jaringan perdagangan rempah. Terutama mereka menghubungkannya dengan

45 C. Knappert, "Beschrijving van Onderafdeeling Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1905, vol. 58, hlm. 577.

46 W. H. Rassers, "Kutai" dalam M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset, dan R. Hartmann (eds.), *Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913–1936)* (Leiden: Brill, 2012).

47 C. van Fraassen, "Drie Plaatsnamen uit Oost Indonesie in Nagara Kertagama: Galiyao, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1976, vol. 132, hlm. 294.

peranan penting rempah pada era perdagangan itu yang mendorong Majapahit menaklukkannya. Sementara itu, tidak ada sumber lain yang menyebutkan bahwa rempah menjadi sasaran utama penaklukan oleh Majapahit, termasuk juga dalam *Negarakertagama* dan *Pararaton*. Diduga bahwa ambisi Majapahit menaklukkan tempat tersebut bukan karena sumber produksi rempah, melainkan keberadaan penguasa lokal yang bertahan dan pusat kunjungan kapal-kapal asing, karena di pelabuhan utama Majapahit di Jawa Timur rempah juga tidak termasuk komoditas yang dominan, begitu juga penggunaan rempah di pusat Kerajaan Majapahit.⁴⁸

Namun demikian, dominasi lautan dipertahankan oleh Majapahit. Selain menggunakannya bagi ekspedisi penaklukan ke luar Jawa, jalur-jalur pelayaran, baik di laut, selat maupun sungai, dikontrol dengan ketat. Terutama setelah kegagalan serangan armada Sunda di aliran Sungai Brantas pada tahun 1357 dan ekspedisi penghukuman terhadap Palembang pada tahun 1377, pimpinan Majapahit memandang perlu memperkuat kontrol atas laut. Terutama Selat Sunda dan Selat Malaka menjadi fokus utama karena tujuannya bukan hanya mengontrol perdagangan yang melewati kedua jalur utama ini, melainkan juga untuk menekan pertumbuhan kota-kota dagang yang akan berpotensi memperkuat posisi ekonomi dan politik para penguasa lokal dan bisa membahayakan hegemoni pusat di wilayahnya.⁴⁹

Selain itu, armada Majapahit juga difungsikan untuk menjaga jalur-jalur pelayaran yang rawan terhadap perompakan laut. Pada pertengahan abad XV ancaman perompakan mulai muncul, terutama di wilayah pinggiran kekuasaan Majapahit, yaitu di perairan perbatasan Kalimantan Utara dan Kepulauan Filipina yang diketahui banyak dilakukan oleh orang-orang dari Kepulauan Sulu. Ada informasi yang menyebutkan bahwa para perompak ini bekerja sama dengan orang-orang yang datang dari wilayah kekuasaan Majapahit, apakah pelaut Jawa dari Tuban atau pelaut Bugis dari Sulawesi Selatan. Mereka memulai operasinya di pelayaran Kalimantan Utara dan mengganggu pelayaran di sana sehingga pimpinan Majapahit di Jawa perlu mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan ekspedisi untuk menumpasnya.⁵⁰

48 Jill Forshee, *Culture and Custom of Indonesia* (Westport, Conn: Greenwood Press, 2006), hlm. 11.

49 Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2019), hlm. 267.

50 Kennon Breazeale, *From Japan to Arabia: Ayutthaya's Maritime Relations with Asia* (Bangkok: Toyota Foundation, 1999), hlm. 144.

Namun, ancaman perompakan yang lebih serius terjadi pada awal abad XV dari daerah Palembang. Sejak Kerajaan Sriwijaya berakhir, daerah ini kembali dikuasai oleh kelompok-kelompok perompak lokal. Namun, mereka juga memiliki jalinan dengan perompak yang beroperasi jauh dari perairan Sumatra Selatan, yakni di Laut Cina Selatan. Oleh karenanya, sampai masa itu mereka kemudian menyatukan kekuatan di bawah seorang pimpinan perompak bangsa Cina dan memperluas daerah operasinya. Selain perluasan operasi ini, mereka juga meningkatkan intensitas serangan terhadap kapal-kapal dagang, bahkan kapal dagang negara lain, sehingga mengganggu hubungan ekonomi Majapahit. Untuk itu pada tahun 1405 Raja Majapahit memerintahkan pengiriman armada laut yang kuat ke Palembang dengan tujuan menghancurkan pusat kekuatan perompak ini.⁵¹

Akan tetapi ancaman terbesar yang menghancurkan dominasi Majapahit justru bukan berasal dari internal, melainkan dari eksternal, khususnya di sektor perekonomiannya. Ini adalah kehadiran para pedagang Muslim yang semakin intensif sejak milenium kedua seiring dengan keberhasilan penyebaran Islam yang pesat dan menguasai jazirah Timur Tengah hingga perbatasan India bagian barat. Melalui dominasinya, kawasan yang terbentang dari Afrika Utara hingga Afganistan, termasuk beberapa jalur perdagangan internasional ke Eropa, berada di bawah pengaruh dan kekuasaan mereka.⁵²

Akumulasi politik yang terjadi di Timur Tengah dengan pengukuhan Kekhalifahan Abasiyah pada awal milenium pertama dan orientasinya pada perdagangan internasional mendorong terobosan yang semakin kuat para pedagang Islam ke arah Timur, khususnya Asia, ketika orientasi mereka ke Barat terganggu oleh Perang Salib yang memutuskan hubungan ke Eropa lewat Turki tetapi tetap menjamin komunikasi laut lewat kekuasaan Islam di Spanyol.⁵³

51 Pimpinan perompak ini disebut Liang Tau-Ming yang sering juga diakui sebagai penguasa *de facto* daerah Palembang, Felipe Fernandez-Armesto, *The Global Opportunity* (London: 1995, Routledge), hlm. 232. Menurut keterangan saat itu, Liang Tau-Ming berani memberontak dan menyingkirkan penguasa yang diangkat atau direstui oleh Majapahit. Setelah itu, dia mengumpulkan kekuatan yang terdiri atas para nelayan dan perompak yang aktif di sekitar perairan Palembang. Richard Winstedt, *Malaya and Its History* (New York: Hutchinson, 1958), hlm. 32.

52 Helen Howe dan Robert T. Howe, *The Medieval World* (Harlow: Longman Publishing Group, 1992), hlm. 43.

53 Lefen Stavros Stavrianos, *The World to 1500: A Global History* (London: Prentice Hall, 1988), hlm. 198.

Di kawasan Timur, kekuatan perdagangan Islam ini semakin terasa pengaruh dan kehadirannya pada milenium kedua awal dan mereka berhasil menggantikan pengaruh para pedagang Hindu India. Bersama dengan jung-jung Cina yang masih berdatangan di perairan Asia Tenggara, para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, Aden, dan Timur Tengah memenuhi pasaran domestik Nusantara. Mereka menjadi pedagang perantara komoditas ekspor impor yang memainkan peranan penting dalam melakukan transaksi dengan pedagang domestik Nusantara. Perbedaan dengan pedagang Cina adalah bahwa para pedagang Islam ini menjadi pedagang perantara yang membawa produk Nusantara ke berbagai negara ke sebelah barat sampai Afrika, sedangkan pedagang Cina lebih banyak langsung kembali ke negaranya.⁵⁴

Ketika pada tahun 1368 pemerintahan Kekaisaran Cina melarang perdagangan langsung bagi kawulanya ke luar negeri,⁵⁵ peran para pedagang Cina di Nusantara dan jung-jungnya berkurang tajam. Kesempatan ini dimanfaatkan seluas mungkin oleh para pedagang Islam dari Asia Barat untuk memperluas peran dan koneksi mereka dengan para pedagang lokal yang ditinggalkan oleh para pedagang Cina. Akibatnya, sampai abad XV–XVI praktis para pedagang Islam memonopoli perdagangan ekspor impor bagi produk dan jalur perdagangan di Nusantara, tetapi ironisnya mereka masih menyerahkan penetapan harga pada kesepakatan antara produsen dan konsumen.

Meskipun kemudian perdagangan Cina dibuka kembali setelah muhibah Laksamana Zeng He pada tahun 1405 ke Asia Tenggara, perdagangan ini tidak lagi sebesar sebelum penutupan oleh dinasti Ming. Di samping itu, Zeng He menemukan bahwa posisi yang ditinggalkan oleh para pedagang Cina telah dikuasai oleh para pedagang Muslim dari Gujarat dan Asia Barat sehingga tidak mungkin lagi untuk mengambil alihnya dari mereka.

54 Kebijakan dinasti Yuan pada masa pemerintahannya adalah ingin mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Cina Selatan yang menjadi pintu gerbang perdagangan dengan Asia Tenggara. Oleh karenanya, mereka cenderung memanggil para pedagang asing termasuk pedagang Islam, India, Asia Tenggara, dan akhirnya juga Eropa untuk meramaikannya. Michal Biran, "Introduction" dalam Michal Biran, Jonathan Brack, dan Francesca Fiaschetti (eds.), *Along the Silk Roads in Mongol Eurasia: Generals, Merchants, and Intellectuals* (Oakland: University of California Press, 2020), hlm. 14.

55 Rita Rose di Meglio, "Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 8th Century" dalam D. S. Richard (ed.), *Islam and the Trade of Asia: A Colloquium* (London: Spottiswoode, Ballantyne & Co., 1970), hlm. 122.



Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/Junk_\(ship\)#/media/File:Kangxi-Reise.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Junk_(ship)#/media/File:Kangxi-Reise.jpg), akses 11/17/2021 pukul 20:30

Gambar 2.3 Kaisar Kang Xi (1654–1722) dan kapal jung Cina

Selain pengalihan peran dalam perdagangan ini, para pedagang Islam ini juga berhasil menanamkan nilai-nilai agama mereka kepada masyarakat asli, termasuk elite penguasa mereka. Proses Islamisasi terjadi secara intensif pada peralihan abad XIV–XV di Nusantara, terutama di beberapa pusat perdagangan utama yang paling banyak berinteraksi dengan pedagang Gujarat. Dengan diawali oleh Aceh pada akhir abad XIII, beberapa kerajaan Melayu, termasuk Malaka, memeluk Islam pada awal abad XV.⁵⁶

Langkah penguasa Malaka ini segera diikuti oleh sejumlah penguasa Nusantara lain, khususnya yang tempat kedudukannya memiliki fungsi perdagangan yang langsung berinteraksi dengan para pedagang Islam, seperti Demak, Banten, Gresik, Tuban, dan Palembang. Tujuan mereka adalah untuk menarik para pedagang Islam semakin banyak yang saat itu terbukti menguasai pangsa pasar domestik dan global, serta untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan mereka dari dominasi

⁵⁶ Kenneth R. Hall, *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100–1500* (Plymouth: Rowman and Littlefield, 2011), hlm. 308.

Majapahit yang pada pertengahan pertama abad XV mulai menunjukkan kemerosotannya akibat konflik internal.⁵⁷

Pola Islamisasi di atas tampaknya merupakan gelombang pertama, yang berlangsung selama abad XV–XVI. Dalam gelombang ini tidak semua penguasa Nusantara otomatis menjadi Islam demi kepentingan ekonomi. Di beberapa tempat, termasuk para penguasa bandar terkenal yang strategis, penerimaan Islam berlangsung lebih belakangan, seperti di Banjarmasin, Makassar, dan juga di Ternate. Di samping itu, tidak selalu peran pedagang Islam memiliki fungsi untuk itu. Setelah abad XVI Islamisasi lebih banyak dilakukan oleh para ulama, yang datang mengunjungi para penguasa lokal dan memberikan ajaran Islam kepada mereka sehingga proses islamisasi terjadi.⁵⁸

Namun, ada juga perpaduan dua pola itu yang terjadi. Brunei yang kemudian pada abad XV tumbuh dari bandar menjadi suatu kesultanan menunjukkan hal tersebut. Proses islamisasi lewat jalur perdagangan telah dimulai sejak awal milenium kedua, yakni dengan ditemukannya nisan Muslim berangka tahun 1048. Nisan itu milik seorang perempuan dan diduga bukan pedagang karena namanya menunjukkan seorang putri bangsawan. Oleh karenanya, ada dugaan bahwa pada tahun itu interaksi dengan kalangan elite penguasa Muslim dari Gujarat telah terjadi dan pasti berurusan dengan elite penguasa lokal.⁵⁹

Namun demikian, selama sekitar 400 tahun tidak terdengar berita tentang adanya suatu basis kekuatan Islam di Kalimantan Utara yang menegaskan bahwa daerah itu telah berubah menjadi Islam. Baru pada

57 Ada perdebatan di antara para ilmuwan apakah penyebab utama keruntuhan Majapahit adalah serangan kekuatan Islam yang sudah mengkristal pada para penguasa bandar perdagangan. Tidak pernah ada bukti langsung tentang hal itu, tetapi yang jelas Majapahit diperlemah oleh dua hal. Secara internal, perang saudara yang terjadi di antara para pewaris takhta yang berlangsung sejak kematian Hayam Wuruk. Secara eksternal, pelepasan bandar-bandar yang kemudian menunjukkan karakter Islam dan tidak bersedia tunduk kepada penguasa Hindu Majapahit, telah melemahkan secara ekonomi. Victor M. Fic, *From Majapahit and Sukuh to Megawati Sukarnoputri: Continuity and Change in Pluralism of Religion, Culture and Politics of Indonesia from the XV to XXI Century* (New Delhi: Shakti Malik Abhinav Publications, 2003), hlm. 309.

58 Georg Stauth menyebutkan bahwa pola ini berbeda karena pelaku penyiaran memiliki latar belakang yang berbeda juga. Jika pada pola pertama pelakunya memiliki latar belakang sebagai pedagang dan lebih berorientasi pada tujuan dan motif ekonomi bagi penyiaran agama, pada kelompok kedua Stauth melihat lebih banyak para ulama musafir yang berlatar belakang aliran Sufi. Akibatnya, model penyiaran agama (dakwah) yang digunakan lebih mendalam dengan orientasi kepada religius-politik daripada ekonomi. Wali sanga di Jawa dan Dato ri Bandang di Makassar menjadi prototipe pola penyiaran Islam kedua, berbeda dengan proses yang terjadi di Malaka. Georg Stauth, *Politics and Cultures of Islamization in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in the Nineteen-nineties* (Bielefeld: Verlag, 2002), hlm. 46.

59 Bilcher Bala, *Thalassocracy: A History of Medieval Sultanate of Brunei* (Sabah: University Malaysia Sabah, 2005), hlm. 55.

tahun 1425, ada peristiwa politik penting yang membuktikan bahwa Brunei merupakan daerah Islam. Peristiwa ini adalah pengangkatan seorang keturunan Melayu-Arab bernama Syarif Ali Bilfalih⁶⁰ sebagai penguasa yang bergelar sultan di pusat Kerajaan Brunei di Pulau Chermin. Sejak pelantikannya, Brunei dinyatakan sebagai negara Islam dalam bentuk kesultanan.

Kutai tampaknya mengikuti pola yang berlangsung di Makassar dan Banjarmasin, yakni islamisasi menyusul kunjungan ulama atau tokoh Islam besar yang berhasil memengaruhi elite penguasa lokal. Meskipun *Kronik Kutai* menyebutkan bahwa ada upaya islamisasi pada pertengahan abad XVI oleh orang-orang dari Makassar, diduga ini bukan orang Makassar, melainkan ulama-ulama dari kawasan Melayu yang berusaha menyiarkan proses islamisasi di Makassar dan ketika kembali, mereka singgah di Kutai. Sebab, Makassar sendiri baru tercatat bisa diislamkan pada akhir abad XVI.

Diduga islamisasi Kutai ini mulai terjadi pada sekitar tahun 1575 ketika dua orang ulama besar kembali dari Makassar singgah di Kutai, dan salah satunya tinggal di sana yaitu Tuan Tunggang Parangan. Di Kutai, Tuan Parangan ini berdiskusi dengan raja setempat, yaitu Raja Mahkota sehubungan dengan agama. Karena Raja Mahkota kalah ujian, maka dia menerima agama Islam dan mengumumkan bahwa sejak itu Kerajaan Kutai berubah menjadi Kesultanan Kutai atas dasar Islam dan dia sendiri menjadi sultan pertama.⁶¹

Dengan berakhirnya proses islamisasi pada pertengahan abad XVII di seluruh jalur perdagangan, setidaknya ada dua hal penting yang muncul dari perkembangan yang berlangsung sampai kedatangan bangsa Barat. Perkembangan pertama adalah terbentuknya jalur perkapalan yang menjadi penopang utama aktivitas perdagangan. Perkapalan ini bertolak dari kepulauan rempah di Maluku yang memasok komoditas utama bagi perdagangan dan terbentang ke arah barat menuju Malaka, yang menjadi bandar dagang besar setelah proses islamisasi. Jalur ini melewati dua rute, yaitu Laut Jawa yang ditopang oleh perdagangan beras sebagai komoditas penting dalam transaksi dan jalur utara melalui pantai Kalimantan Timur

60 Menurut dugaan karena faktor keturunan dari daerah Taif di Saudi Arab, Syarif Ali telah menjadi pemeluk Islam sebelum menjadi sultan. Begitu juga dari faktor perkawinan, karena ia memperistri putri Sultan Ahmad Barakat yang juga berasal dari Brunei. Syarif Ali Bilfalih sendiri memerintah sampai wafatnya pada tahun 1432. Ranjit Singh, *The Making of Sabah, 1865–1941: The Dynamics of the Indigenous Society* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2000), hlm. 81.

61 Constantinus Alting Mees, *Kroniek van Koetei, op.cit.*, hlm. 102.

dan Utara untuk mengambil produk hutan yang dipasok oleh daerah pedalaman Kalimantan.

Perkembangan kedua adalah hegemoni Islam yang menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu sebagai pemegang urat nadi utama perkapalan dan perdagangan pada masa itu. Berbeda dengan pola dominasi Hindu yang ditegakkan oleh satu kekuatan besar seperti Majapahit, hegemoni Islam dibentuk lewat kerja sama kerajaan-kerajaan dan bandar-bandar di sepanjang jalur pelayaran yang menjadi tempat persinggahan dan transaksi lokal, dan disatukan oleh kesamaan ideologi dan kepentingan. Kedua perkembangan ini terbentuk dan dijumpai oleh bangsa Barat yang datang ke perairan Nusantara pada awal abad XVI, yaitu bangsa Portugis.



Sumber: Koleksi Tim Peneliti

Gambar 2.4 Makam Habib Hasim bin Musaiyah (Tunggang Parangan)

The background features a faded historical map of Southeast Asia, showing the Malay Peninsula, Sumatra, and the Indonesian archipelago. A sailing ship is visible in the upper right corner. A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page, depicting a white bird with its wings spread, holding a yellow flame in its beak. The text 'TU WURI HANDAYANI' is written in a circular path around the bird. Below the bird, the text 'Balai Pustaka dan Negeri Budaya Kalimantan Barat' is visible in a smaller font.

BAB 3

PERAIRAN KALIMANTAN DI ERA PORTUGIS

Dominasi pengaruh Islam atas Nusantara yang berlangsung sejak abad XIV lebih menentukan pembentukan pola dan jalur perdagangan daripada kekuasaan Majapahit, meskipun hegemoni politik dan keamanan lebih banyak ditegakkan oleh Majapahit daripada kekuatan ekonomi Islam. Hubungan dari sumber produksi rempah di Kepulauan Maluku menuju pusat konsumen di luar Nusantara yang dihubungkan lewat jaringan bandar laut di pelabuhan-pelabuhan Laut Jawa dan Selat Malaka semakin terwujud lewat peran para pedagang Islam dan Asia Barat yang menggantikan pengaruh India. Sementara itu, kekuatan Majapahit tidak membentuk atau mengubah pola dan jalur pelayaran ini, kecuali memanfaatkannya untuk menegakkan monopoli dan eksploitasi ekonomi mereka lewat hubungan patron-klien politik.

Dengan melihat kondisi di atas, bisa diduga bahwa orang Eropa, khususnya Portugis dan kemudian juga Spanyol yang hadir di perairan Nusantara pada awal abad XVI, telah menemukan pola dan jalur perdagangan rempah yang telah mapan dan terbentuk, yang menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim internasional dari sumber produksi rempah di Maluku hingga Eropa. Kehadiran di perairan Nusantara ini dengan mudah mereka lakukan karena para navigator mereka menelusuri jalur perdagangan maritim rempah tersebut dalam arah terbalik, khususnya orang Portugis yang menyusurnya dari Eropa

melalui Afrika Selatan dan Asia Selatan, dibandingkan dengan orang Spanyol yang melewati belahan bumi barat.¹

Kehadiran bangsa Barat, khususnya orang Portugis ini menjadi faktor penentu ketiga yang memengaruhi eksistensi dan akhirnya perubahan dominasi pada jalur rempah, setelah Majapahit dan kekuatan Islam. Keberadaan orang Portugis dengan kekuatan militer dan ekonominya telah menciptakan dinamika baru dalam perdagangan rempah yang akan membuka era bagi dominasi Barat di Nusantara sampai awal abad XX.

A. DOMINASI MALAKA-MALUKU OLEH PORTUGIS

Sampai pertengahan pertama milenium kedua, jaringan perdagangan rempah yang dimulai dari Kepulauan Maluku telah menghubungkan daerah produsen di belahan bumi timur dengan konsumen akhir di belahan bumi barat melalui jaringan pusat-pusat dagang di sepanjang pantai. Eropa yang menjadi konsumen utama sekaligus terakhir jaringan perdagangan rempah tersebut berada di ujung barat setelah melewati berbagai pelabuhan dan pusat dagang di Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Oleh karenanya, selain permintaan yang tinggi akan rempah di benua ini, juga jarak jauh dan lama yang harus ditempuh serta melewati berbagai pusat perdagangan di Asia, mengakibatkan harga rempah yang tiba di Eropa menjadi sangat tinggi. Di samping itu, sering juga komoditas yang harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun di lautan ini tiba dalam kondisi yang tidak lagi segar dan berpotensi rusak sehingga tidak memiliki nilai maksimal bagi penggunaannya.²

Kedua faktor itu memunculkan motivasi bagi kalangan elite Eropa, baik elite feodal maupun ekonomi, untuk mencari alternatif bagi perolehan dan penguasaan rempah yang menjadi komoditas unggulan di pasaran benuanya dan bahkan pangsa pasar internasional. Beberapa penguasa, khususnya yang menjadi bandar utama pasaran distribusi

1 Pembagian kawasan ini ditetapkan melalui mediasi kepausan pada tahun 1494 dan menghasilkan Perjanjian Tordesillas atas prakarsa Paus Alexander VI. Damien Simonis, *Spain* (Tennessee: Lonely Planet, 2003), hlm. 254.

2 Jarak yang ditempuh dari Maluku ke Eropa mencapai 15.000 kilometer lewat Laut Merah atau Teluk Persia. Selain rempah, konvoi itu juga membawa berbagai jenis kain mewah, produk hutan, emas dan perak, serta juga produk hewan, seperti gading dan cula badak. Struan Reid, *The Silk and Spice Routes: Invention and Trade* (Halifax: Maritext, 1994), hlm. 6.

rempah di Eropa, mencoba menelusuri informasi mengenai sumber produksi rempah dan bermaksud menemukan dan memperolehnya dari produsen. Dengan demikian, mereka berharap agar kedua kendala di atas dapat dihindari.

Karena posisi negaranya, orang-orang Portugis dan Spanyol menjadi perintis langkah ini. Pelabuhan Lisabon yang menjadi distributor rempah di Eropa karena terletak di Jazirah Andalusia yang menjadi pintu gerbang masuk lewat Selat Gibraltar bagi perkapalan dagang dari luar Eropa menjadi pihak yang paling berkepentingan untuk itu.³ Oleh karenanya, berdasarkan berita yang mereka peroleh dari kalangan para pedagang perantara, mereka mengetahui bahwa pusat produksi rempah berada di Maluku, salah satu kepulauan yang terletak di kawasan Hindia.

Setelah mendapatkan jaminan dari kepausan yang menetapkan pembagian wilayah seperti di atas, orang-orang Portugis menjadi perintis pertama dengan mengirimkan armadanya ke timur pada tahun 1497 dengan perintah dari Raja Manuel I untuk mendapatkan sebanyak mungkin produk Timur, bukan hanya rempah, melainkan juga emas, permata, perak, dan semua komoditas lain. Armada pertama di bawah Vasco da Gama meninggalkan Lisabon dan berlayar menyusuri pantai Afrika dan Asia menuju ke Maluku.⁴

Namun, konteks pelayaran pertama ini didominasi oleh nuansa permusuhan antara orang-orang Eropa Kristen melawan kekuatan politik dan ekonomi Islam sebagai akibat dari Perang Salib yang telah berlangsung selama hampir lima ratus tahun. Perang yang awalnya berpusat di Timur Tengah ini segera meluas seiring dengan penyebaran Islam ke Afrika Utara dan akhirnya memasuki ujung barat Eropa. Pada abad XII kekuatan Islam berhasil menguasai Spanyol dan Portugis sebagai satu-satunya wilayah di Eropa barat yang berada di bawah dominasi Islam.⁵ Oleh karenanya semangat melawan terhadap kekuatan Islam menjiwai orang-orang Portugis dan Spanyol bahkan setelah kebebasan mereka pada abad XIV, dan ini tetap dibawa oleh mereka yang tergabung dalam armada Vasco da Gama ke timur untuk mencari rempah.

3 E. A. Weiss, *Spice Crops* (Wallingford, Oxon: CABI Publishing, 2002), hlm. 156.

4 Katherine Bailey, *Vasco da Gama: Quest for the Spice Trade (In the Footsteps of Explorers)* (New York: Crabtree Publishing Company, 1980), hlm. 4.

5 Antonio Henriques, "The Reconquista and Its Legacy, 1000–1348" dalam Dulce Freire and Pedro Lains (eds.), *An Agrarian History of Portugal, 1000–2000; Economic Development on the European Frontier* (Leiden: Brill, 2017), hlm. 22.

Dominasi perkapalan dan perdagangan yang membawa rempah dari Maluku serta produk penting lain dari Asia oleh para pedagang Islam dan pusat-pusat perdagangan mereka di sepanjang pantai Asia⁶ menjadikan nuansa konflik politik dan agama meluas pada kompetisi ekonomi saat armada Portugis ini menyusuri pantai Samudra Hindia. Mereka menemukan kenyataan bahwa penguasaan produk yang mereka butuhkan oleh kekuatan ekonomi Islam menjadi penghalang utama tujuannya dan sekaligus ditopang oleh misi Perang Salib yang masih dikobarkan.⁷ Oleh karenanya, selama akhir abad XV dan awal abad XVI kompetisi dagang dan konflik bernuansa agama mewarnai pelayaran pertama orang Eropa ke jalur rempah.



Sumber: Robert Cribb, 2000

Gambar 3.1 Lokasi-lokasi utama di Kalimantan pada abad XV dan XVI

6 Dalam jalur perkapalan rempah serta produk Timur lainnya ke Eropa, sejumlah pelabuhan antara India dan pantai timur Afrika memegang peranan penting khususnya dalam memasok produk ini ke Eropa. Teluk Persia dan Teluk Aden menjadi kunci utama pasokan produk dan di kedua pelabuhan itu para pedagang Muslim Arab dan India menguasai perdagangan dan perkapalan tersebut. Struan Reid, *The Silk and Spice Routes: Culture and Civilization* (Halifax: Maritext, 1994), hlm. 13.

7 Theodore P. C. Gabriel, *Hindu-Muslim Relations in North Malabar, 1498-1947* (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1996), hlm. 56.

Dengan menghadapi kenyataan ini, sampai tanggal 20 Mei 1498 ketika da Gama mendarat di Pantai Malabar, India, dia harus melewati serangkaian pertempuran melawan armada dagang Islam. Pertempuran ini bukan hanya dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan lawan, melainkan juga untuk merebut rempah dan komoditas lain yang dibawanya, termasuk juga menangkap awak kapalnya untuk dijadikan sebagai budak. Di Malabar, yang merupakan pusat perdagangan lada dari Asia Tenggara, Vasco da Gama mendengar informasi tentang Kepulauan Maluku dan juga beberapa bandar perdagangan rempah di Malaka serta sejumlah pelabuhan lain di Nusantara. Oleh karenanya, pada tahun 1503 setelah memantapkan posisinya di Goa dan Calicut, Vasco da Gama dan para pemimpin Portugis lainnya memutuskan untuk mengirimkan kekuatan armada dan militernya ke Nusantara.⁸

Di Goa yang menjadi pangkalan dan sekaligus pusat pemerintahan Portugis untuk India, persiapan melakukan pelayaran lebih lanjut ke Nusantara dilakukan. Akan tetapi saat ini Vasco da Gama tidak lagi ditunjuk sebagai pimpinan dan tanggung jawab untuk itu dialihkan kepada Diogo Lopes de Sequeira. Dari informasi yang diperoleh para pedagang non-Islam dan juga beberapa catatan orang Eropa yang pernah berkunjung ke Nusantara seperti Duarte Barbosa yang pernah tinggal di Jawa dan kemudian pada awal abad XVI berada di Malabar, Sequeira mengetahui bahwa bandar dagang sekaligus pangkalan maritim dan niaga utama yang berada di kepulauan itu sekaligus menjadi titik tolak menuju kepulauan rempah adalah Malaka.⁹

— Setelah melakukan persiapan yang memadai dan dibekali dengan informasi yang lengkap, Sequeira berangkat dari Goa pada tanggal 5 April 1508 dengan menyinggahi Cochin dan Pedir di Sumatra Utara pada tanggal 8 September 1509, dan setelah itu menyinggahi Pasir. Tampaknya kunjungan Sequeira menunjukkan sikap permusuhan terhadap para pedagang dan penguasa Muslim di kota-kota pelabuhan Sumatra ini menyebarkan berita tentang niat orang-orang Portugis untuk menyerang Malaka kepada Sultan Mahmud Syah di Malaka. Malaka yang terletak di muara sebuah sungai memiliki pelabuhan yang memadai

8 Kavalam Madhava Panikkar, *Malabar and the Portuguese: Being a History of the Relations of the Portuguese with Malabar from 1500 to 1663* (Bombay: D.B. Taraporevala Sons and Co., 1929), hlm. 31.

9 Selain Marcopolo, Fra Odorico dari Pordenone seorang pastor Venesia pada tahun 1323 berkunjung ke Jawa dan Malaka. Catatan mereka dikenal lewat jalur gereja sebagai informasi bagi para pelaut Eropa Katolik seperti Portugis dan Spanyol. Namun, keterangan terperinci yang khusus memuat berita tentang perdagangan dan jalur-jalurnya adalah laporan Barbosa yang berjudul *Colleção de noticias para a historica a geografia das nações ultramarinas que vivem nos dominios Portuguezes*.

untuk berlabuh banyak kapal dari berbagai ukuran yang dimiliki oleh berbagai bangsa di Asia, sehingga pelabuhan ini menjadi bandar dagang paling dominan di Asia Tenggara khususnya bagi penimbunan rempah dari Maluku yang akan diekspor ke luar sekaligus distribusi produk perdagangan strategis, seperti beras, produk hutan, dan produk impor.¹⁰

Setibanya di Malaka, Sequeira tidak melakukan tindak kekerasan, tetapi berusaha membuat perdamaian dengan Sultan Mahmud Syah berdasarkan instruksi Raja Portugal, Don Manuel, yakni agar Malaka menyerahkan sebanyak mungkin rempah yang dibutuhkan oleh negara Portugal. Untuk itu Sequeira mengutus komandan kapalnya, Heronimo Texeira, untuk menyampaikannya kepada Sultan Mahmud di istana.

Meskipun Sultan Mahmud mengizinkan pengangkutan sejumlah rempah, beberapa hari kemudian konflik mulai muncul yang bertolak dari kecurigaan para pedagang Asia terhadap maksud Portugis, terutama mengingat perlakuan orang-orang Portugis ini terhadap mereka di sepanjang jalur perdagangan Asia Barat dan Asia Selatan.

Atas hasutan orang-orang ini, Sultan Mahmud berubah menolak permintaan lebih lanjut dari Sequeira dan dalam sengketa yang terjadi, pertempuran tidak bisa terelakkan. Orang-orang Portugis yang berada di daratan Malaka segera dibunuh, sementara Sultan Mahmud yang telah menyiapkan armada perahunya menyerang kapal-kapal Sequeira yang masih berlabuh. Meskipun berhasil meloloskan diri dan kembali ke India pada bulan November 1509, banyak korban dari awak Sequeira yang jatuh dan peristiwa ini menjadi pemicu bagi aksi Portugis berikutnya terhadap Malaka.¹¹

Kepemimpinan Portugis di Goa memutuskan bahwa tidak ada cara lain untuk menghadapi perdagangan dan kekuatan ekonomi Islam di Asia Tenggara kecuali dengan merebut dan menaklukkan Malaka, serta menjadikannya sebagai pangkalan maritim Portugis. Langkah ini akan diambil untuk melumpuhkan kekuatan perdagangan laut Islam

10 Pada saat Sequeira tiba, Malaka sedang berada pada puncak kejayaannya. Di sana terdapat komunitas pedagang Arab, Persia, Gujarat, Bengala, Pegu, Siam, Jawa, Cina, dan Luzon da Lequise (Filipina Selatan). Ini membuktikan bahwa Malaka merupakan kota perdagangan internasional dan pusat transaksi global. J. Hageman Jcz., *Geschiedenis van verovering der Malacca en der oorlogen tusschen Portuguezen en Maleijers* (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1852), hlm. 4.

11 Kegagalan Sequeira tampaknya tidak memberikan hukuman terhadapnya, baik dari Raja Manuel maupun dari gubernur di Goa. Bahkan Diogo Lopes de Sequeira mendapatkan penghargaan dan kepercayaan atas komitmennya kepada Raja Portugal dengan pengangkatannya menjadi gubernur di Goa antara 1518–1522. Matthias Meyn, *Die Grossen Entdeckungen* (München: C.H. Beck, 1984), hlm. 232.

di Asia sekaligus menjadi titik tolak untuk menaklukkan kepulauan rempah bagi kepentingan Portugal di Eropa. Dengan strategi demikian, bisa disimpulkan bahwa Portugis bukan hanya ingin merebut sumber produksi, melainkan juga menguasai jalur pelayaran rempah yang ada selama ini.¹²

Dengan alasan untuk membebaskan beberapa orang Portugis yang masih ditawan di Malaka, mereka sepakat menunjuk Afonso d'Albuquerque untuk membentuk suatu armada dan melengkapinya dengan 800 orang serdadu Portugis dan 600 orang serdadu bayaran India yang akan disiapkan berangkat ke Malaka. Tugas mereka bukan hanya membebaskan para tawanan, melainkan juga memaksakan monopoli dagang rempah kepada Sultan Mahmud dan melarang para pedagang lain, khususnya pedagang Islam, untuk berniaga di Malaka. Dengan dibekali instruksi dari Raja Manuel yang dibawa bersama armada dari Portugal oleh Diogo Menez de Vasconcelos dengan empat kapal perang, d'Albuquerque bertolak menuju Malaka lewat Cochin pada tanggal 2 Mei 1511.¹³

Dalam pelayaran ke Malaka, Albuquerque mulai menyusuri jalur pelayaran rempah yang menghubungkan antara Malaka dan India, seperti lewat Cochin, Pedir, dan Pasai. Dalam pelayaran itu, ia merampas atau menghancurkan kapal-kapal milik para pedagang Islam dan membebaskan orang-orang Portugis yang ditahan di kota-kota itu atau tertinggal dari armada Sequeira. Dari mereka, Albuquerque mendengar informasi tentang perairan dan perdagangan di Selat Malaka, dan khususnya pergolakan politik yang terjadi di Kesultanan Malaka.¹⁴

Pada tanggal 1 Juli 1511 Albuquerque dengan armada tempurnya yang terdiri atas delapan belas kapal perang muncul di Bandar Malaka dan mengirimkan utusan kepada Sultan Mahmud. Meskipun saat itu Sultan Pahang siap mendukungnya, Mahmud yang diperlemah oleh konflik internal merasa tidak mampu melawan Albuquerque dan menawarkan pembebasan tawanan, termasuk Ruy d'Araujo yang merupakan orang

12 H. Boek, "Algemeen Geschiedenis van Java" dalam *Indisch Tijdschrift*, tahun 1850, jilid II, hlm. 379.

13 P. A. Tiele, "De Europeers in den Malayschen Archipel 1509-1529" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1876, vol. 24, hlm. 376.

14 Salah satu dari mereka yang melarikan diri adalah Joao Viegas yang melarikan diri dari penahanan di Malaka. Pelariannya dimungkinkan karena dibebaskan oleh bendahara Nakhoda Baguaya yang sebelumnya menghasut Sultan Mahmud Syah untuk menyerang Sequeira tetapi kini berkomplot dengan para pedagang Gujarat untuk merebut kekuasaan Sultan. Dengan demikian, situasi di Malaka sedang berada dalam krisis politik. Laurence A. Noonan, *John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque* (Lisabon: Instituto de Investigaçao Cientifica Tropical, 1989), hlm. 176.

kepercayaan Albuquerque.¹⁵ Namun, Albuquerque menolak tawaran itu dan sebaliknya menuntut Mahmud Syah untuk memberinya tanah bagi pembangunan benteng dan ganti rugi, baik atas kematian orang-orang Sequeira maupun biaya kedatangannya ke Malaka. .

Setelah tidak terjadi kesepakatan, akhirnya Albuquerque yang mendapatkan informasi dari seorang saudagar Jawa bernama Utimuta sebagai sahabat Nakhoda Baguaya dan lawan Sequeira, menyiapkan pendaratan pasukan pada tanggal 11 Agustus 1511 setelah selama sebulan memblokade bandar itu dan menghancurkan beberapa kapal dagang Gujarat yang berlabuh di sana. Dengan demikian, langkah Albuquerque ini memutuskan akses dari pedalaman ke luar dan memotong bantuan dari luar yang akan dikirimkan kepada Sultan, sekaligus menghancurkan perekonomian Malaka.¹⁶

Setelah berhasil menguasai bandar dan mengamankan perkampungan pedagang asing dengan menutup akses mereka menuju pedalaman, Albuquerque memerintahkan serangannya terhadap keraton. Sultan Mahmud dan keluarganya telah melarikan diri menuju Bintang ketika mengetahui pelabuhannya telah dikuasai oleh orang Portugis dan bantuan dari kapal-kapal pedagang Islam tidak memungkinkan. Hari itu Albuquerque menduduki istana dan menjarah kekayaannya senilai 400 ribu *cruzados*.

Penaklukan dan penguasaan atas Malaka ini bukan menjadi prioritas utama dari proyek Albuquerque dan penguasa Portugis di Portugal. Ini hanya merupakan tindak pembalasan untuk melumpuhkan kekuatan ekonomi Islam yang dianggap menjadi penghambat utama maksud Portugis mendapatkan monopoli atas rempah di Kepulauan Nusantara. Tujuan utamanya tetap produsen rempah di Maluku yang menjamin pasokan komoditas yang menjadi primadona perdagangan di Eropa dan dunia pada era itu. Oleh karenanya, pada bulan Desember 1511, Albuquerque memerintahkan salah satu komandannya Antonio d'Abreu

15 H. Morse Stephens, *Rulers of India: Albuquerque* (New Delhi: Asian Educational Service, 2000), hlm. 100-101. De Araujo adalah pengikut setia Albuquerque dalam mendukungnya menjadi gubernur di Goa menghadapi saingannya Almeida. Oleh karenanya, Albuquerque berkepentingan untuk membebaskannya agar bisa memanfaatkan dia demi kepentingannya di kalangan elite penguasa Portugis di India.

16 Menurut informasi dari mata-matanya, Albuquerque mendengar bahwa kapasitas pelabuhan Malaka ini mencapai 2.000 kapal dagang yang bisa berlabuh sekaligus. Mungkin ini berita berlebihan karena dibandingkan dengan Batavia modern pada abad XIX, kapasitas pelabuhannya tidak mencapai jumlah tersebut. Atau bisa saja angka 2.000 itu sebenarnya merupakan perahu dagang kecil yang bisa ditambatkan berderet. Sarnia Hayes Hoyt, *Old Malacca* (Oxford: Oxford University Press, 1993), hlm. 31.

untuk segera menyiapkan tiga kapal berangkat menuju Kepulauan Maluku atas dasar informasi para pedagang di Malaka.¹⁷

Akan tetapi, jalur yang mereka pilih adalah jalur lama yang tetap dilewati dalam pelayaran rempah yakni dengan menyusuri pantai utara Jawa. Setelah sempat singgah di pelabuhan Gresik, d'Abreu meneruskan pelayarannya menuju Maluku lewat pantai utara Nusa Tenggara dan akhirnya tiba di Ambon dan berdasarkan berita tentang sumber rempah, d'Abreu meneruskan pelayaran ke Banda. Di Pulau Banda ia mendapatkan rempah yang dibutuhkan dan setelah memuat kapal-kapalnya ia kembali ke Malaka. Akan tetapi, badai yang menghambatnya mengakibatkan armadanya terdampar di Hitu yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate. Sultan Ternate yang mendengar berita ini memiliki harapan agar orang-orang Portugis itu bisa membantunya menghadapi Kesultanan Tidore yang saat itu menjadi kompetitor utama dalam penjualan rempah.¹⁸

Atas kesepakatan yang dibuat bersama Sultan Ternate saat itu, d'Abreu berangkat meninggalkan Maluku menuju Malaka, sementara pembantunya, Francisco Serrano, ditinggalkan di Ternate.¹⁹ Keberadaan Serrano ini menjadi jaminan hubungan Portugis-Ternate yang didasarkan pada persekutuan militer untuk menghadapi Tidore dengan imbalan pasokan cengkih dan pala secara rutin dan monopoli oleh orang Portugis atas produksi rempah di bawah Kesultanan Ternate.²⁰ Untuk pertama kalinya, orang Portugis berhasil menegakkan dominasinya di pusat produksi rempah dan memulai monopoli perdagangannya di wilayah Nusantara.

Jalur pelayaran dari Malaka yang diambil oleh d'Abreu adalah tetap melewati pesisir utara Jawa. Ini membuktikan bahwa bagi orang Portugis, kepentingan ekonomi lebih penting daripada konflik agama karena semua bandar di pesisir utara Jawa merupakan kekuatan ekonomi

17 Dalam dokumen Portugis masa itu nama Maluku tidak dikenal, dan hanya disebut kepulauan rempah atau *Ilhas de crafo*. M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950* (Jakarta: KPG, 2016), hlm. 8.

18 Anonim, "Geschiedkundig oversigt van Moluksche Eilanden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1846, volume 5, hlm. 303.

19 Serrano menjadi "duta khusus" Portugis di Ternate selama tujuh tahun. Selain menjadi penghubung antara Kesultanan Ternate dan penguasa Portugis, ia juga menjadi penasihat Sultan Ternate dalam militer dan pemerintahan. Gregorio F. Zaide, *The Philippines since Pre-Spanish Times* (Manila: R. P. Garcia, 1949), hlm. 124.

20 Albert S. Bickmore, *Reizen in den Oost-Indischen Archipel, eerste deel* (Schiedem: H. A. M. Roelants, 1873), hlm. 8.

dan politik Islam. Begitu juga dengan Kesultanan Ternate yang menjadi sekutunya adalah kekuatan Islam yang dominan di Maluku. Dalam hal ini orang Portugis tidak lagi menunjukkan kepedulian dalam hal agama, tetapi keuntungan lebih menjadi pertimbangan utama.

Yang menarik adalah bahwa dalam pelayaran d'Abreu ada laporan tentang konflik yang dialaminya. Persinggahannya di Gresik juga tidak dilaporkan sebagai suatu kunjungan perang seperti yang dialami Sequeira atau tindakan ekspedisi Albuquerque. Di pelabuhan itu d'Abreu tinggal selama beberapa hari dan bisa diduga dia melakukan interaksi dengan kalangan penguasa dan pedagang setempat yang dapat dipastikan bahwa mereka adalah kekuatan Islam. Terutama Gresik yang terletak di dekat Bukit Giri memegang peranan penting dalam proses islamisasi di Jawa.

Ini tampak dari laporan berikut ini:

Omtrent dezen tijd, zond d'Albuquerque als tegengeschenk een olifant en gelastte den scheppsbevelhebber Antonio d'Abreu, onder geleide van den Mohammedaan Nèchodo Ismael, met drie schepen koers de zetten naar Java, en van daar naar de Moluksche eilanden, ten einde overall de faam van hendendaden der Portugeezen te verbreiden. De genoemde Nachoda voor rechtstreeks naar de Molukken om de komst voor te bereiden van d'Abreu, die met eene menigte Javanen en Maleijers als wegwijzers aan boord het allereerst aankwam te Garsik (Grisse), door Portugeezen Agacin genaamd, van waar hij terstond naar de Molukken zeilde. Java was immer toen voor grootscte gedeelte tot den Islam overgaan.²¹

Sekitar masa ini, d'Albuquerque mengirimkan seekor gajah sebagai hadiah balasan dan memerintahkan seorang laksamananya Antonio d'Abreu dengan pengawalan seorang Islam Nakhoda Ismail dengan tiga kapal meluncur ke Jawa dan dari sana menuju Maluku dengan tujuan untuk menyebarkan ketenaran tindakan ksatria orang Portugis. Nakhoda itu langsung berlayar ke Maluku dengan maksud menyiapkan kedatangan d'Abreu bersama beberapa orang Jawa dan Melayu sebagai penunjuk jalan di atas kapal pada mulanya singgah di Garsik (Gresik), yang oleh orang Portugis disebut Agacin, dari sana dia segera berlayar ke Maluku. Jawa saat itu sebagian besar telah masuk Islam.

Dari kutipan di atas tampak bahwa hadiah seekor gajah diperuntukkan bagi seorang raja di Jawa yang memiliki kekuasaan atas Gresik. Dengan

21 J. Wolbers, *Geschiedenis van Java, eerste deel* (Utrecht: Kemink en Zoon, 1868), hlm. 179. Jelas yang dimaksud pada saat kunjungan d'Abreu adalah pelabuhan Gresik yang berada di bawah kekuasaan Islam, bukan di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu Majapahit atau Blambangan saat itu.

demikian diduga bahwa raja itu adalah seorang Muslim dan hubungan ini menandai persahabatan. Selain itu, pemberian hadiah seekor hewan besar pasti berlangsung cukup lama, setidaknya berhari-hari, dan itu dilewatkan oleh d'Abreu bersama armadanya di Gresik.

Bagi para pedagang Islam sendiri, khususnya pedagang Jawa, kehadiran d'Abreu dan armadanya juga tidak dianggap sebagai ancaman potensial, meskipun diduga bahwa berita tentang kejatuhan Malaka dan penguasaannya oleh Portugis sudah mereka dengar. Mungkin saja pada saat itu Portugis masih membutuhkan relasi dengan para pedagang di Jawa yang menjadi pemasok beras bagi penduduk Malaka selama ini, setidaknya ini berlaku selama beberapa bulan pertama sejak pendudukan Malaka. Untuk itu mungkin saja pengumuman d'Albuquerque yang disampaikan lewat Nakhoda Ismael memiliki pengaruh, seperti berikut ini

Alfonso d'Albuquerque gaaf order dat hij door alle de voornamste havenen zoude gaan, om het werk van Malacca aldaar bekend te maken; en dat zij haar voordeel met meerder veiligheid als ten tijde van den Koning Mohammed aldaar konden doen, nademaal zij alle de goederen van de Westelijke gedeelten, waar van hij staaltjens mede gebragt had, soudenvinden.²²

Albuquerque memberikan perintah agar dia mengunjungi semua pelabuhan penting untuk mengumumkan kondisi Malaka di sana dan mereka tetap bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak seperti juga keamanan pada saat zaman raja Islam, bahkan mereka akan menemukan barang-barang dari dunia Barat yang selama ini dibawanya.

Jelas bahwa d'Albuquerque tidak bermaksud untuk melawan semua kekuatan Islam yang ada di Nusantara, mengingat hal itu tidak kondusif bagi kekuatan Portugis yang ada dan juga demi tujuan berikutnya, yaitu keuntungan dari rempah-rempah.

Peristiwa kedua tentang bukti hubungan orang Portugis dengan para penguasa Islam Nusantara, khususnya Jawa, terjadi setahun kemudian. Pada tahun 1513 dengan keberhasilan d'Abreu bersama Nakhoda Ismael membawa rempah dari Ternate, Ruy de Brito yang menggantikan Albuquerque sebagai Gubernur Malaka, memerintahkan Joao Lopes

²² Pieter van der Aa, *Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee en Land-reysen, na Oost en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking enn soo vervolgens van Verscheyde Volkeren, meerendels door Vorsten, op Maatschappijen Derwaarts gefonden, gedaen, Zedert het Jaar 1506 tot 1508* (Leiden: St. Pieters Koorsteeg, 1707), hlm. 281.

Alvim dengan empat kapal pada bulan Maret tahun itu berlayar ke Jawa. Pelabuhan yang dikunjunginya adalah Sedayu, yang terletak tidak jauh dari Gresik yang berarti juga berada di bawah penguasa Islam. Delapan tahun kemudian, Antonio de Brito yang juga berkunjung ke Jawa, dalam pelayarannya ke Maluku pada tahun 1521 menyinggahi Tuban di pantai utara Jawa, dan kemudian tinggal di Gresik selama tujuh hari.²³

Dengan demikian, selama satu dekade setelah kejatuhan Malaka, tidak ada konflik besar yang terjadi antara orang-orang Portugis dan para penguasa Islam atau pedagang Islam Nusantara. Hubungan ekonomi tampaknya kembali normal karena adanya hubungan saling membutuhkan, setidaknya mereka yang berkepentingan dan bertahan di jalur pelayaran rempah. Portugis tetap mempertahankan jalur antara Maluku-Jawa-Malaka dan hanya mengambil alihnya dari para pedagang Asia sebagai konsumen utama rempah Maluku. Politik monopoli rempah mereka tidak langsung menimbulkan reaksi, khususnya dari penguasa Islam di Jawa yang pesisirnya tetap menjadi jalur perdagangan dan pelayaran utama, sementara komoditas mereka seperti beras dan produk hutan lain tetap diterima oleh Portugis sebagai kebutuhan domestik.

B. PELAYARAN DI KALIMANTAN

Meskipun ada suasana damai dan tenang pasca-1511 seperti yang digambarkan di atas, bukan berarti posisi orang Portugis di Malaka terjamin dan konflik bernuansa agama telah hilang. Selain itu, letak Malaka yang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan Islam penting menjadikannya riskan bagi terjadinya konflik, baik yang dipicu oleh kompetisi ekonomi maupun sentimen keagamaan.

Namun, ancaman pertama yang dialami oleh Malaka justru muncul dari kekuatan yang jauh. Penguasa Demak Pati Unus yang mendengar kabar tentang kejatuhan Malaka dari seorang pelarian Jawa Pati Quarter (menurut sebutan orang Portugis) segera menganggap peristiwa itu menjadi ancaman bagi perekonomian Demak mengingat sampai saat itu ketergantungan pangsa pasar Demak pada Malaka sebagai bandar transit sangat besar. Penguasaan oleh Portugis atas bandar Malaka dirasakan melemahkan posisi Demak. Pada tahun 1513 Pati Unus memimpin sendiri armadanya ke Malaka dan dengan dibantu oleh beberapa sekutunya di Sumatra, serangan terhadap bandar Portugis itu dilakukan.

²³ P. J. Veth, *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch, tweede deel* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1878), hlm. 229.

Meskipun serangan tersebut gagal dan kehancuran armada Jawa terjadi, peristiwa itu memberi Portugis peringatan terhadap situasinya.

Oleh karenanya, pada tahun tersebut Armando Cortesao diperintahkan untuk berlayar menyusuri pantai Sumatra dan Jawa dalam pelayarannya ke Maluku dengan maksud untuk membuka hubungan dengan raja-raja Islam dan melihat peluang perdagangan dengan mereka. Di atas salah satu kapalnya, terdapat seorang Portugis bernama Tome Pires yang membuat laporan dari hasil perjalanan tersebut dan menjadi sumber informasi bagi Portugis untuk mengambil langkah taktis.



Sumber: Armando Cortesao, 2016

Gambar 3.2 Peta Perjalanan Tome Pires

Selain Jawa, Aceh menjadi ancaman potensial terhadap Malaka. Berbeda dengan Demak yang hanya sekali mengirimkan armada ekspedisi, selama keberadaan Portugis di Malaka, Aceh beberapa kali mengirimkan armada untuk menyerang orang-orang Portugis, meskipun selama ini hubungan antara Malaka di bawah Portugis dan Kesultanan Aceh bersifat fluktuatif antara konflik dan kerja sama. Terutama sejak kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh meluaskan

pengaruhnya ke pedalaman Sumatra dan menegakkan perannya dalam perdagangan maritim. Tindakan ini mengarah pada konflik dengan Portugis di Malaka. Dalam beberapa tahun antara 1520 hingga 1570 beberapa kali konflik terjadi, baik di daratan Sumatra maupun serangan Aceh terhadap Bandar Malaka.²⁴

Menghadapi situasi demikian, Portugis mengambil dua langkah strategis: mencari sekutu baru yang non-Muslim dan mencari jalur pelayaran baru ke Maluku yang dianggap aman. Alternatif pertama menghasilkan persekutuan antara Portugis dan Kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat pada masa Prabu Seda pada tahun 1528 ketika Malaka berada di bawah Simon de Sosa. Namun, utusan Portugis Francis de Sa yang mendarat di sana tidak bisa meneruskan upayanya karena pesisir Jawa Barat telah dikuasai oleh kekuatan Islam yang berpusat di Banten dan Cirebon. Akibatnya, upaya persekutuan tersebut mengalami kegagalan.

Alternatif kedua diambil juga untuk meneruskan komunikasi antara Malaka dan Maluku yang telah menjadi sekutu dan akhirnya pangkalan Portugis, khususnya di Ternate. Ancaman yang rawan bagi pelayaran kapal dalam jumlah besar, khususnya pada saat-saat perang, mengakibatkan orang-orang Portugis mencari alternatif jalur lain. Jalur ini ditemukan di kawasan perairan Laut Cina Selatan sekarang yang melewati lautan di sebelah utara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, untuk akhirnya mencapai Ternate.²⁵

Pada jalur yang ditempuh di sini, juga terdapat beberapa kekuatan dominan yang menguasai perairan lokal. Setidaknya, dua kesultanan, yakni Brunei dan Kutai, memiliki kekuatan armada yang perlu diperhitungkan oleh orang-orang Portugis. Akan tetapi, ada sedikit pertimbangan yang melegakan mengingat kekuatan Islam belum berpengaruh kuat di kerajaan-kerajaan ini dibandingkan dengan di Semenanjung Melayu dan Sumatra. Oleh karenanya, pihak Portugis

24 Pertempuran di Sumatra terjadi di muara Sungai Muaru menghadapi persekutuan Aceh, Pahang, dan Bintan dan orang Portugis dikalahkan pada tahun 1523. Kemudian, peristiwa ini diikuti dengan blokade atas Malaka sehingga mengalami ancaman kelaparan selama setahun. Tahun 1530 dan tahun 1536 kembali Aceh mengirimkan armadanya menyerang Malaka. John Crawfurd, *De Indische Archipel, derde deel* (Haarlem: de Wed. A. Loosjes, 1825), hlm. 482.

25 Petinggi Portugis di Malaka Pero Mascarenhas mengusulkan kepada Don Jorge de Menezes yang diangkat menjadi gubernur di Ternate agar mengambil jalur lewat perairan di pantai utara Borneo selain untuk mengurangi kerawanan, juga untuk menjajaki adanya jalur pelayaran baru yang potensial. Pieter van der Aa, *De doorlugtige scheepstogten der Portuguysen na Oost Indien, Tweede Stuk* (Leiden: St. Pieters Koorsteeg, 1727), hlm. 41.

menduga bahwa tidak ada ancaman potensial untuk melewati perairan itu, atau bahkan mencari jalan untuk menjalin kontak baik dengan Brunei, Kutai, maupun kekuatan-kekuatan pribumi lokal lainnya.

Brunei telah tampil sebagai kekuatan maritim lokal sejak abad X ketika dilaporkan bahwa ada sejumlah jung Cina berlabuh di pelabuhannya. Hubungan ini semakin erat hingga abad XVI ketika banyak orang Cina, terutama yang berasal dari Provinsi Fujian, bersama para pedagang Arab dan Melayu bermukim di Brunei. Bahkan pada tahun 1375 ada catatan dari Kesultanan Sulu di Filipina Selatan yang menyebutkan bila komunitas Cina di Brunei cukup besar sehingga seorang kepala mereka diangkat oleh Sultan Brunei untuk mewakili masyarakat ini dalam sistem kekuasaan dan kehidupan di Brunei.

Tentu saja hal ini juga menarik bagi orang-orang Portugis. Dalam pemilihan jalur pelayarannya, pada tahun 1526 hubungan dengan Kalimantan untuk pertama kalinya dibuka dan sebutan Brunei diduga diberikan oleh mereka.²⁶ Kunjungan pertama oleh orang Portugis dilakukan ketika Don Jorge de Menezes yang diangkat sebagai gubernur di Ternate menyinggahi kota ini dan bertemu dengan raja di sana. Tampaknya, hasil pembicaraan ini menjadi titik awal saling kesepakatan untuk berhubungan dan bertransaksi, karena terbukti pada tahun 1527 Vasco Lorenzo ditunjuk sebagai utusan dari Portugis untuk menghadap kepada Sultan Brunei.²⁷

Meskipun kunjungan Lorenzo yang diberi instruksi untuk melakukan pembicaraan dagang dengan Sultan Brunei tidak begitu berhasil sebagai akibat ketersinggungan Sultan atas pemberian permadani dari Malaka yang bergambar manusia sehingga dianggap melanggar kaidah agama, hubungan ini tidak terputus. Pada tahun 1529 Gonzalo Pereira dikirim untuk melakukan pembicaraan pemulihan hubungan. Pereira lebih sukses dan berhasil membuat perjanjian dengan Sultan Brunei yang membuka pelabuhannya bagi kapal-kapal Portugis dan menjanjikan pasokan produk lokal Kalimantan yang berasal dari produk hutan dan perairan bagi orang-orang Portugis.

26 Daerah ini saat itu diketahui terbentang kekuasaannya dari Tanjung Datu ke Sungai Kimanis. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan beberapa wilayah kekuasaan penguasa setempat, Tidung, Bulungan, dan Berau yang mengakui kekuasaan Kutai. J. J. de Hollander, *Handleiding bij de Beoefening der Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, tweede deel* (Breda: Gebroeders NYS, 1869), hlm. 136.

27 J. K. J. de Jonge, *De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610), eerste deel* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1862), hlm. 136.

Hubungan persahabatan ini dilanjutkan lagi pada tahun 1536 dengan kunjungan resmi Louis de Andrade yang bertemu Sultan Brunei dengan membawa hadiah-hadiah. Pada kesempatan ini Louis de Andrade melayari sepanjang pantai dan mencapai suatu dataran pantai terkenal yang dia gambarkan sebagai berikut

Het volk van dit Land is wat gering van vermogen maar wel gesteld van lijf en leden, en van kleeding en taal geleek Maleyers. Het is een land dat overvloedig van vlees, rijst en veel andere levensmiddelen en kostelijke goederen is. Daar zijn mede langs de zee-strand niet verre van die stad Tandjapura, zijnder en kostelijker diamanten als in Indien te vinden en dat geheel land wast de rechte kamfer op de bomen gelijkt de hart in Europe. En dit is de eene die in Indien zeer hoog geagt wordt want de gene die uit Persien derwaarts gaat is vervalst.²⁸

Penduduk tanah ini sangat miskin tetapi berperawakan baik, dan busana serta bahasanya mirip orang Melayu. Ini adalah tanah yang berkelimpahan daging, beras, dan banyak bahan pangan lain serta barang-barang mahal. Di sana juga di sepanjang pantai tidak jauh dari kota Tanjapura, intan mahal dan indah seperti di India ditemukan dan seluruh tanah ini dipenuhi kapur barus pada pohon mirip di jantung Eropa. Ini sangat dihargai di Hindia karena tidak ada yang diangkut dari Persia kemari.

Dalam laporan di atas, disebutkan bahwa lokasi yang dimaksudkan berada di dekat sebuah kota bernama Tanjapura. Tanjapura, yang kemudian menjadi Tanjungpura, adalah sebuah kota pelabuhan milik Kesultanan Brunei yang di samping Brunei sendiri menjadi bandar utama bersama Lawai. Di kota-kota tersebut pada era kedatangan orang Portugis terdapat perkampungan pedagang Cina, Siam, dan juga Melayu.²⁹ Dengan demikian, kesaksian Louis de Andrade menyebutkan bahwa Brunei merupakan kekuatan ekonomi yang dominan di jalur perairan utara antara Maluku dan Malaka di samping juga potensi kekayaan alamnya, termasuk intan yang dikenal seperti produk Persia.

Seperti halnya Brunei, Kutai diduga pada saat kunjungan orang Portugis ke Kalimantan Utara juga sudah memeluk Islam meskipun baru pada tahap awal. Nama raja Sultan Mahkota Alam yang memerintah tahun 1525 menunjukkan bahwa gelar itu adalah suatu gelar raja Islam. Dengan demikian, pada saat itu bisa diduga sistem kesultanan atau

²⁸ Pieter van der Aa, *op.cit.*, hlm. 376.

²⁹ Donald Frederick Lach, *Asia in the Making of Europe: The Century of Discovery, Two Volumes* (Chicago: University of Chicago Press, 1965), hlm. 581–582.

aturan berdasarkan hukum Islam diterapkan di Kutai dan juga daerah taklukannya di sekitar pantai timur Kalimantan. Ada dugaan bahwa Islam masuk Kutai ini berasal dari Makassar yang saat itu justru belum memeluk Islam secara resmi. Dua ulama yang berusaha mengislamkan Makassar, salah satunya adalah Dato ri Bandang dari Minangkabau, singgah ke Kutai dalam perjalanan pulang dan kemudian mengislamkan penguasa setempat.³⁰

Berbeda dengan Brunei, dalam dokumen Portugis nama Kutai hampir tidak ada. Diduga karena letaknya yang kemudian masuk ke Selat Makassar dan bukan di sepanjang jalur pelayaran rempah utara, orang Portugis tidak merasa perlu untuk menyusurnya hingga ke pedalaman. Namun demikian, daerah pengaruh Kutai ke utara juga bersentuhan dengan gerakan dan kepentingan mereka. Ini tercatat dalam salah satu laporan mereka yang menyebutkan tentang Borneo berikut.

*E d'aqui rompe um camonho atravez do vasto archipelago das Indias para Java, Boreo, Timor, Molucas, China, Japao, ao passo, que outros naveantes tao intrepididos como habeis descubrem a Nova Hollanda, Nova Guine, ilha Mindanao e outras terras, que formam o que se chama actualmente Oceania.*³¹

Dan dari sini, sebuah jalan panjang menerobos kepulauan Hindia yang luas menuju Jawa, Borneo, Timor, Maluku, Cina, Jepang, sementara para pelaut pemberani seperti biasa menemukan New Holland, New Guinea, Pulau Mindanao dan daratan lainnya, yang berupa apa yang sekarang disebut Oseania.

Dalam tulisan tersebut disampaikan bahwa sejak rencana awal kunjungan mereka ke Nusantara, Pulau Borneo atau Kalimantan telah tercantum dalam daftar lokasi yang akan mereka kunjungi dan sejauh mungkin bisa dijalin hubungan dengan mereka.

Pedro Texeira yang diperintahkan dari Malaka untuk menyelidiki pulau ini pada tahun 1530 berhasil melakukan penelitian lebih jauh tentang potensinya. Dari ujung barat, mungkin Sukadana, dia melakukan pelayaran pantai sampai ke pelabuhan Kalimantan yang diduga adalah

30 Namun, menurut *Kronik Kutai*, Islam baru dianut benar-benar di kesultanan ini pada saat Pangeran Sinum Panji Pendapa, cucu Mahkota Alam, yang berkuasa di Martapura menyebarkannya di kalangan masyarakat. Dengan demikian islamisasi intensif baru terjadi pada awal abad XVII. Juga mungkin yang dimaksud Dato ri Bandang bukan orang yang mengislamkan Makassar pada awal abad XVII karena jaraknya cukup jauh, melainkan leluhurnya yang disebut Tuan Ribandang. Constantinus Alting Mees, *op.cit.*, hlm. 54.

31 Manoel Bernardes Branco, *Portugal e Os Estrangeiros tomo I* (Lisboa: De A.M. Pereira, 1879), hlm. 51.

Banjarmasin yang mencapai panjang 700–800 mil. Dalam pelayaran ini Texeira membawa kain dari Macao untuk dijual atau ditukar dengan produk hutan Kalimantan yang kemudian dibawanya ke Malaka.³²

Setelah dari Kalimantan, jalur pelayaran orang Portugis melalui utara menuju Ternate melewati perairan utara Pulau Sulawesi. Di jalur ini ada sejumlah lokasi penting yang juga bisa disinggahi, seperti Gorontalo dan Manado. Akan tetapi, Manado pada masa Portugis bukan merupakan sebuah kota pelabuhan, melainkan sebuah pulau yang terpisah tiga mil dari daratan Sulawesi. Karena penduduknya hanya sedikit dan lebih banyak terdiri atas hutan, tidak ada aktivitas ekonomi di sini. Dari situ bisa diduga bahwa tidak ada kegiatan perkapalan yang penting atau perdagangan.³³

Namun demikian, produk hutan lokal Sulawesi Utara menjadi penarik bagi orang Portugis untuk tetap menyinggahi tempat ini. Sejumlah kota pelabuhan yang terbentang di sepanjang pantai utara, seperti Malibagu, Kota Buna, dan Kema menjadi tempat perkapalan penting produk hutan dan produk laut.³⁴ Dalam hal ini orang Portugis yang melayari jalur perairan di sebelah utara pesisir itu berkepentingan untuk menyinggahinya, dengan menekankan motif ekonomi sebagai tujuan utama.³⁵

Laporan resmi yang tersimpan oleh arsip VOC berdasarkan keterangan penduduk setempat dan penduduk Kepulauan Siau yang terletak di sebelah utara Manado menyebutkan bahwa antara tahun 1535 dan 1542 pelayaran orang Portugis cukup intensif menuju dan dari Ternate. Kapal-kapal ini singgah di semenanjung utara Sulawesi ini dan dilaporkan adanya peristiwa pembaptisan 1500 orang Siau, termasuk rajanya, oleh pastor Portugis. Valentijn sendiri menyebutkan pada tahun 1568 umat Katolik di Pulau Siau dan Manado berada di

32 S. Keijzer, *Francois Valentijn's oud en nieuw Oost-Indien* ('s-Gravenhage: H. C. Susen, 1858), hlm. 229.

33 Menurut laporan Gubernur Ternate Robertus Padtbrugge yang berkunjung pertama kali ke Manado pada tahun 1678, Pulau Manado itu sekarang disebut sebagai Manado Tua. Pelabuhan yang berfungsi dengan baik di sana terletak di Kota Buna yang berada di pantai selatan Minahasa, karena selain lokasinya yang memungkinkan untuk merapatnya perkapalan, juga di sana terdapat tambang emas. Anonim, "Beschrijving der zeden en gewoonten van de bewoners der Minahasa door de Gouverneur der Molukken Robertus Padtbrugge in 1679" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1866, hlm. 306.

34 S. C. J. W. van Musschenbroek, "Toelichtingen behoorende bij de kaart van de Bocht van Tomoni of Gorontalo en aangrenzende landen" dalam *Tijdschrift van Aardrijkskundige Genootschap*, tahun 1880, jilid IV, hlm. 97.

35 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires, Volume 1* (London: The Hakluyt Society, 1944), hlm. 153.

bawah bimbingan rohani pastor Portugis Didacus Magellanes.³⁶ Ini berarti bahwa selama pertengahan pertama abad XVI ada interaksi yang intensif dalam kehidupan masyarakat asli Sulawesi Utara dan orang-orang Portugis, yang pasti melewatinya dalam pelayaran mereka di jalur rempah utara.

Setelah menjamin jalur pelayaran di sebelah utara melewati pesisir utara Kalimantan dan Sulawesi, orang-orang Portugis selama pertengahan pertama abad XVI tampaknya menjamin urat nadi perkapalan dan ekonomi rempah mereka antara pangkalan di Malaka dan Maluku. Dengan memadukan strategi polarisasi di barat (Malaka) dan aliansi di timur (Maluku/Ternate), Portugis mampu menjamin pasokan kuota rempahnya yang menjadi target mereka untuk ekspor ke Eropa dan tampak bahwa dominasi mereka di sumber rempah tetap terjamin selama struktur yang mereka bangun ini tidak mengalami ancaman.

Akan tetapi, seiring dengan proses tersebut, justru suatu ancaman baru muncul dari sisi yang tidak terduga. Jika selama ini dengan keunggulan teknologi dan strateginya orang Portugis mampu mengalahkan lawan-lawan Islam mereka dan sebaliknya menjamin kerja sama dengan beberapa penguasa Islam seperti di Brunei dan Ternate, kali ini lawan mereka yang baru datang dari Eropa. Sejak meninggalkan pelabuhan San Lucar de Barrameda pada bulan September 1519, Ferdinand Magellans dan armada Spanyol bertolak ke barat dengan tujuan menemukan sumber rempah seperti rivalnya orang Portugis. Setelah melewati Benua Amerika ke selatan dan 98 hari menyeberangi Pasifik, pada tanggal 6 April 1521 mereka mendarat di Pulau Cebu.³⁷

Namun, hari-hari pertama kehadiran mereka diwarnai dengan keterlibatan orang-orang Spanyol ini dalam konflik lokal yang mengakibatkan pertempuran di Pulau Subut melawan orang-orang Mactan pada tanggal 27 April 1521. Dalam pertempuran ini Magellans terbunuh dan penggantinya Duarte Barbosa memutuskan untuk membangun suatu posisi yang kuat bagi dominasi Spanyol di Filipina, yang mereka beri nama seperti rajanya, Philip. Barbosa sendiri tidak lama memimpin karena pada tanggal 1 Mei 1521 juga terbunuh dalam

36 J. G. F. Riedel, "Het oppergezag der vorsten van Bolaang over de Minahasa (Bijdrage tot de Kennis der oude Geschiedenis van Noord Celebes)" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1869, hlm. 314.

37 "Fernando de Magellan" dalam *De Java Post*, tanggal 1 April 1921, nomor 13, hlm. 1.

pertempuran, sehingga kepemimpinan dipegang oleh Juao Carvalho dan Gonzalo Gomez de Espinosa.³⁸

Namun, tujuan utama mereka bukan pertama-tama untuk menguasai Filipina³⁹, melainkan menuju pulau rempah yang telah didahului oleh orang Portugis. Untuk itu dengan bantuan petunjuk jalan pedagang Cina, pada akhir Oktober 1521 armada Spanyol ini dikirim ke Maluku Utara dan menemukan kondisi konflik antara Ternate yang didukung oleh Portugis dan Kesultanan Tidore. Untuk itu orang-orang Spanyol ini segera menemui Sultan Tidore dan melalui kesepakatan seperti yang ditawarkan oleh orang Portugis kepada Sultan Ternate, yakni pasokan rempah untuk kepentingan Spanyol, persekutuan baru dibentuk di antara mereka pada tanggal 21 Desember 1521.⁴⁰

Namun, komandan Spanyol saat itu menyadari bahwa kekuatannya yang hanya dua kapal sehingga tidak mungkin mampu menghadapi gabungan kekuatan Portugis-Ternate. Oleh karenanya, ia meminta Sultan Tidore mengizinkannya kembali ke Manila dan tahun berikutnya tiba dengan membawa kekuatan lebih besar. Sultan Tidore mengizinkan dan dengan membekali muatan cengkih beberapa bahar, orang-orang Spanyol diizinkan berlayar. Baru pada tahun 1527 di bawah Gubernur Cortez di Manila, armada Spanyol yang didatangkan dari Meksiko diperintahkan berlayar ke Tidore untuk melindungi sultannya melawan Portugis-Ternate.⁴¹

Dengan kekuatan baru ini, armada Spanyol dan Tidore siap bertempur melawan Portugis-Ternate. Pertempuran yang berlangsung ini membawa kerugian baik benda maupun nyawa pada kedua pihak sehingga tujuan orang-orang Eropa untuk bangkutkan rempah dari Kepulauan Maluku tertunda. Oleh karenanya, kemudian persoalan itu diserahkan kepada Paus yang menetapkan bahwa belahan bumi tidak lagi dibagi antara timur dan barat melainkan utara dan selatan. Spanyol

38 Antonio Pigafetta, *Magellan's Voyage: A Narrative Account of the First Circumnavigation* (New York: Dover Publ., 1994), hlm. 8.

39 Sampai pertengahan abad XVI, orang Spanyol sebenarnya tidak mampu menjamin hegemoninya di Filipina. Beberapa ekspedisi yang dipimpin Juan Garcia Jofre de Loaysa, Alvaro de Saavedra, dan Ruy Lopez de Villalobos yang datang dari Spanyol tidak mampu menundukkan perlawanan orang-orang di Filipina kecuali hanya menjamin posisi orang Spanyol di benteng Manila. Baru pada tahun 1564 posisi mereka terjamin lewat perdamaian dengan kekuatan lokal. Linda A. Newson, *Conquest and Pestilence in the Early Spanish Phillipines* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009), hlm. 5.

40 Anonim, "Geschiedkundig overzigt der Moluksche eilanden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1846, jilid 1, hlm. 305.

41 J. H. Parry, *The Spanish Seaborne Empire* (London: Hutchinson and Co, 1966) hlm. 88.

mendapatkan bagian garis meridian ke atas yang mencakup Kepulauan Maluku, sementara Portugis berada di bawahnya yang diterima oleh rajanya, Charles I. Kesepakatan ini kemudian disahkan pada tahun 1529 di Saragossa.⁴²

Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini adalah armada Spanyol kini mulai mengontrol jalur perairan di Filipina Selatan yang segera meluas ke perairan Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara pada tahun-tahun sesudahnya. Hal ini mengakibatkan kebebasan Portugis sejak pertengahan kedua abad XVI di jalur utara perkapalan rempah dari Maluku ke Malaka terganggu. Terutama hal ini terjadi ketika hubungan antara mereka dan Spanyol kembali menunjukkan ketegangan sebagai akibat salah paham tentang penarikan batas pengaruh mereka yang jelas, dan masih berlakunya hubungan persekutuan Portugis dan Ternate.

Namun demikian, kewenangan yang diberikan kepada Spanyol ini juga tidak selalu dimanfaatkan. Kurangnya kekuatan armada yang mereka perlukan untuk mengamankan perkapalan antara Manila dan Meksiko bagi pengangkutan perak untuk kepentingan pembuatan mata uang real Spanyol menuntut pengurangan armada mereka dari Tidore dan dari perairan Sulawesi Utara. Dalam situasi demikian mereka juga membatalkan pembangunan sejumlah loji di sepanjang pantai utara Sulawesi untuk memantau jalur pelayaran rempah Portugis di sana.⁴³

Tentu saja bagi Portugis hal ini menjadi kesempatan yang kembali menguntungkan karena potensi ancaman Spanyol di jalur perkapalan rempah mereka tidak lagi besar meskipun konflik insidental masih terjadi di Maluku sampai pertengahan kedua abad XVI. Konflik ini tidak hanya menjadi perhatian para petinggi Portugis dan Spanyol di Nusantara, tetapi juga di Eropa. Mengingat antara kedua raja tersebut memiliki hubungan darah, akhirnya setelah kematian Raja Portugal Sebastian pada tanggal 5 Agustus 1575 dan perwalian selama lima tahun, kalangan bangsawan kedua kerajaan menyepakati pengangkatan Philip II sebagai Raja Spanyol sekaligus Portugal. Hal ini mengakibatkan bukan hanya perdamaian melainkan juga penyatuan kepentingan Portugis dan Spanyol di Nusantara.⁴⁴

42 Evaristo Casiano Pecson, *Bitter Tears of Mother Philippines* (Stockton, CA: Muldowney, 1945), hlm. 33.

43 J. E. Mijer, "Minahasa en Noord Celebes" dalam *De Indische Gids* tahun 1909, jilid 31, vol. II hlm. 1052–1063.

44 P. A. Tiele, "De Europeers in den Maleischen Archipel, vijfde gedeelte, 1578–1599" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1881, jilid 29, hlm. 155.

C. PEROMPAKAN LAUT

Selain dua kekuatan yang muncul, Islam dan Spanyol, perkapalan Portugis di jalur rempah utara juga menghadapi tantangan lain, yaitu perompakan. Berbeda dengan jalur selatan yang melewati Laut Jawa menuju Maluku, perairan di sebelah utara Sulawesi dan Kalimantan serta Selat Makassar marak dengan aktivitas perompakan laut. Operasi mereka bahkan mencapai perairan perbatasan antara Kalimantan dan Semenanjung Melayu. Oleh karenanya, praktis sejak kapal-kapal dagang Portugis meninggalkan Melayu dan memasuki Laut Cina Selatan atau sebaliknya dari Ternate memasuki Laut Sulu, ancaman perompakan terus mengadang keberadaan armadanya.

Perompakan ini telah dikenal sejak sebelum keberadaan orang Portugis di Nusantara, karena pada era dominasi Majapahit dan bahkan zaman Kerajaan Sriwijaya, aktivitas perompakan telah tercatat dalam laporan. Bahkan Majapahit juga mengerahkan armada untuk menumpas aktivitas perompakan yang dianggap merugikan terhadap kegiatan perkapalan serta perdagangannya.⁴⁵ Menjelang keruntuhannya, Majapahit sendiri tidak mampu melindungi daerahnya dari ancaman perompak. Bahkan di beberapa tempat, daerah kekuasaan Majapahit praktis dikuasai oleh para perompak yang umumnya adalah orang-orang atau para pelaut Cina.⁴⁶

Kondisi kepulauan di Malaya, Nusantara, dan Filipina menjadi lahan yang kondusif bagi perkembangan aktivitas perompakan tersebut. Banyak selat dan pulau kecil memungkinkan kekuatan perompak ini bersembunyi dari pengejaran armada musuh terutama yang terdiri atas kapal-kapal samudra berukuran besar yang sulit bermanuver di perairan dangkal dan sempit. Selain itu, dari balik pulau-pulau, teluk, dan selat demikian, kekuatan armada perompak dengan mudah menunggu konvoi kapal dagang tanpa terdeteksi sehingga memudahkan mereka melakukan penyerangan.⁴⁷

45 Pada tahun 1386 Majapahit mengirimkan sebuah armada ke Brunei untuk mengusir para perompak yang diketahui berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Brunei kemudian berhasil dibebaskan dan Raja Majapahit mengangkat seorang bangsawan Jawa bernama Angkawijaya untuk memerintah di sana. Brunei, *Annual Report* (London: H.M. Stationery Office, 1955), hlm. 183.

46 Sumarah Adhyatman, *Antique Ceramics Found in Indonesia: Various Uses and Origins* (Jakarta: Ceramics Society of Indonesia, 1990), hlm. 15.

47 Kesaksian dari musafir Buddhis Cina Fa-Hsien yang mengunjungi Nusantara pada abad VIII tentang aksi perompakan memberikan bukti taktik perompak tersebut. Kekuatan armada perompak tersebut mencapai ratusan perahu yang langsung ke luar dan menyergap konvoi kapal dagang sehingga sulit bagi korbannya untuk menyiapkan perlawanan yang memadai. Stefan Eklof, *Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia's Maritim Marauders* (Copenhagen: NIAS Publ., 2006), hlm. 6.

Ketika Portugis menaklukkan Malaka, kekuatan perompakan laut mulai muncul tetapi bukan hanya bermotif ekonomi seperti halnya para perompak Cina yang berada di dekatnya, khususnya di perairan Bangka dan Palembang. Perompakan laut yang terutama mengancam perkapalan Portugis melalui perairan Laut Cina Selatan memiliki unsur dendam terhadap tindakan Portugis atas Malaka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian pelaku perompakan adalah sisa-sisa kekuatan Kesultanan Malaka yang bergabung dengan beberapa pedagang Arab dan Persia yang dirugikan oleh kebijakan maritim Portugis.⁴⁸

Namun ancaman perompakan terhadap perkapalan Portugis tidak terbatas pada orang-orang Melayu dan Arab yang berlatar belakang politik, perompakan Cina di perairan Laut Cina Selatan juga menjadi potensi bahaya yang signifikan bagi mereka. Daerah tempat pemukiman Cina maritim yang padat, seperti Palembang, Bangka, dan Kalimantan Barat menjadi sumber kekuatan perompak mereka, dan masing-masing telah dikuasai oleh gerombolan perompak yang memiliki daerah operasi dan kewenangan sendiri-sendiri.

Kalimantan Barat menjadi salah satu sumber ancaman perompak Cina yang potensial terhadap jalur pelayaran rempah antara Malaka dan Maluku lewat utara. Kekuatan perompak yang telah ada sejak sebelum kedatangan orang Portugis ini menjadikan sasaran perkapalan niaga yang melewati pantai timur Semenanjung Melayu dan pantai barat Kalimantan hingga memasuki perairan Laut Cina Selatan. Mereka bertahan sampai abad XIX ketika Inggris membangun bandar laut di Singapura dan James Brooke berkuasa atas Serawak, yang mulai mengurangi potensi ancaman itu meskipun tidak mampu menghilangkannya sama sekali.⁴⁹

Namun, dari semua kekuatan perompak yang ada, kelompok yang paling besar, ganas, dan ditakuti oleh orang-orang Portugis adalah kelompok perompak dari Filipina Selatan. Mereka berasal dari sebuah tempat yang disebut Illanun, dari Pantai Lanao di Pulau Mindanao. Suku ini terkenal sejak zaman dahulu sebagai pelaut yang andal dengan perahu-perahunya yang menyusuri perairan mulai dari selat sempit sampai ke samudra luas. Motivasi mereka melakukan perompakan adalah adanya tujuan memperoleh kekayaan lewat perbudakan atau

48 Stefan Ekloff Amirell, *Pirates of Empire: Colonization and Maritime Violence in Southeast Asia* (New York: Cambridge University Press, 2019), hlm. 96.

49 Angeline Lewis, *Rajah Brooke's Borneo: The Nineteenth Century World of Pirate and Headhunters, Orangutan and Hornbills and Other Such Rarities as Seen through the Illustrated London News And Other Contemporary Sources* (Canberra: UNSQ Press, 2019), hlm. 29.

perdagangan budak. Budak diperoleh lewat peperangan yang dilakukan oleh penguasa kerajaan. Bagi mereka yang di luar pusat kerajaan, perbudakan diperoleh lewat penyerangan kapal-kapal yang melintasi wilayah perairan mereka. Akibatnya, selain barang-barang dagangan, pada awalnya budak menjadi prioritas utama penyerangan para pelaut dari Illanun ini.⁵⁰

Kelompok pelaut Illanun ini sangat intensif dan meluas dalam daerah operasinya. Begitu sering serangan yang dilakukan oleh mereka terhadap armada perkapalan dagang. Akibatnya, istilah Illanun dikonotasikan menjadi *lanun* dalam bahasa Melayu yang berarti perompakan dan diterapkan bagi semua perompak, bukan hanya yang berasal dari Mindanao.⁵¹ Begitu juga dalam karya sastra Barat, istilah *lanun* kemudian dihubungkan dengan kegiatan melakukan perompakan dengan kekerasan dan kekuatan senjata yang dicirikan identifikasinya di dunia Barat.⁵²

Yang berkaitan erat dengan kelompok Illanun ini adalah para perompak dari Kepulauan Sulu, yang berasal dari kawasan Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan. Kepulauan Sulu yang terletak di perairan antara Filipina dan Kalimantan dan berpusat di Pulau Jolo sebagai pulau yang terbesar di gugusan itu, memiliki nilai strategis sejak milenium pertama Masehi pada jalur pelayaran antara Cina ke Maluku dan dari Filipina ke Sulawesi atau Kalimantan.⁵³

Berbeda dengan Illanun yang lebih merupakan kelompok sosial di suatu pulau dan menyebar di pulau-pulau lain, kekuatan perompak Sulu ditopang oleh struktur politik yang ada dan berkedudukan di Pulau Jolo. Sebelum Islam masuk ke Sulu, pulau ini pernah dikuasai oleh Majapahit melalui pangkalannya di Kalimantan, dan jauh sebelumnya

50 Karena kebiasaan ini, para perompak Illanun sering disebut sebagai *slave raiders* atau penyerang demi budak. James Francis Warren, *Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and Birth of Ethnicity* (Singapore: Singapore University Press, 2002), hlm. 39.

51 Ahmad, *Perompak Lanun* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm 35. Misalnya, dalam karya sastra Melayu disebutkan adanya perompak lanun yang terdiri atas orang Kamboja di perairan Thailand Selatan. Ini terbukti begitu terkenalnya orang-orang Illanun teridentifikasi dengan kegiatan perompakan.

52 Dewey Lambdin, *The Captain's Vengeance: An Alan Lawrey Naval Adventure* (New York: Thomas Dunne Books, 2004), hlm. 133.

53 "Sulu and the Sulu Archipelago" dalam Ooi Keat Gin, *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor* (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2004), hlm. 1269.

pernah menjadi vasal Sriwijaya melalui hubungan perkapalannya.⁵⁴ Struktur politik ini adalah Kesultanan Islam Sulu yang mulai didirikan pada pertengahan abad XV oleh Syarif Abubakar, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai sultan pertama dengan gelar Sultan al Shariful Hasyim sebagai penguasa Islam pertama di Sulu, yang berkuasa antara tahun 1450-1480.⁵⁵ Dari periodisasi tersebut tampak jelas bahwa pembentukan Kesultanan Sulu ini berlangsung bersamaan dengan proses masuknya Islam di Filipina Selatan dan Maluku Utara.⁵⁶



Balai Pelestarian Nilai Budaya

Sumber: www.sejarah-nusantara.anri.go.id

Gambar 3.3 Bajak laut Sulu membawa pedang *kampeli*, tombak, dan keris.

54 Mengingat Sriwijaya berada di Palembang dan berjarak jauh dari Filipina Selatan, diduga kevasalan ini lebih banyak berkaitan dengan ikatan antara kegiatan maritim, khususnya perompakan, karena Sriwijaya dikenal menggunakan kebijakan menaklukkan para pemimpin perompak lokal. Gregorio F. Zaide, *The Philippines since Pre-Spanish Times* (Quezon City: R. P. Garcia, 1949), hlm. 49.

55 Clemencio Montecillo Bascar, *Sultanate of Sulu the Unconquered Kingdom: A Razor Sharp and Bold Inquiry into the Dark Side of History* (Zamboanga City: The University Press, 2003), hlm. 18.

56 Ada legenda yang menyatakan bahwa Islam di Sulu dibawa oleh Sharif Kabungsuhan dari Kalimantan. Kabungsuhan sebenarnya bukan ulama, melainkan seorang bangsawan atau pelaut yang mendarat di Sulu dan merekrut banyak penduduk setempat untuk menjadi pengikutnya. Dari situ kekuasaan komunal berkembang dan menjadi kekuatan politik. Datumanong Ampaso Sarangani, *Islamic Penetration in Mindanao and Sulu* (Marawi City: University Research Center, Mindanao State University, 1975), hlm. 69.

Sultan Hasyim dan para penggantinya menganut kebijakan perluasan kekuasaan demi kepentingan agama, ekonomi, dan kewibawaan politik. Oleh karenanya, aktivitas kemaritiman yang menjadi tulang punggung kekuatan Sulu dikembangkan dan diarahkan pada perompakan terhadap kapal-kapal asing yang melalui perairannya. Dengan aktivitas perompakan ini, Kesultanan Sulu tidak hanya memperoleh kekayaan, tetapi juga budak dalam jumlah yang banyak bagi kepentingan perdagangan atau digunakan untuk kepentingan perabdian sosial di wilayahnya sendiri. Tanpa ada kekuatan berarti yang menentanginya selama akhir abad XV dan awal abad XVI, Sulu tumbuh menjadi kekuatan yang disegani dan meluaskan pengaruh kekuasaannya ke seluruh pantai Filipina Selatan, pantai utara Sulawesi, dan kemudian ke pantai timur laut Kalimantan.

Pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Sulu menyatukan kelompok-kelompok etnis yang berasal dari Filipina Selatan dan terlibat dalam kehidupan maritim di bawah kekuasaannya, seperti suku Illanun, Tausug, Balangingi, dan kemudian juga Bajau. Orang Balangingi adalah penduduk asli Pulau Samal, gugusan Kepulauan Sulu. Kelompok ini juga melakukan perompakan seperti halnya penduduk pulau-pulau lain, dan oleh penguasa kolonial modern disebut sebagai perompak Tawi-Tawi. Sebutan ini berasal dari daerah operasi mereka yang kebanyakan terdapat di Kepulauan Tawi-Tawi, sementara kelompok Illanun di Tunku.⁵⁷

Berbeda dengan kelompok lain yang memusatkan kegiatannya pada perompakan, suku Bajau yang juga berasal dari Filipina Selatan tidak selalu terlibat dalam perompakan laut meskipun mereka juga lebih banyak hidup di perairan laut. Kegiatan mereka lebih banyak difokuskan pada pencarian produk laut di perairan sekitar pulau mereka. Meskipun ada beberapa informasi yang mengatakannya bahwa asal-usul suku ini bukan dari Filipina melainkan dari Melayu atau bahkan dari daratan Asia⁵⁸, fakta historis menunjukkan bahwa penyebaran suku ini berasal dari Filipina Selatan menuju perairan Nusantara pada awal milenium kedua, yaitu menuju sepanjang pantai Kalimantan Utara dan

57 Eva-Lotta E. Hedman and John T. Sidel, *Philippine Politics and Society in Twentieth Century: Colonial Legacies, Post-Colonial Trajectories* (London: Routledge, 2000), hlm. 169.

58 H. Sjahbandi, *Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Bajau* (Samarinda: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, 1996), hlm. 38. Ada teori yang menyebutkan bahwa orang Bajau adalah penduduk asli Birma Selatan yang merantau ke Filipina Selatan lewat pelayaran mereka. Di sana mereka memiliki keturunan yang sekarang menjadi orang Moro.

Timur serta Pulau Sulawesi. Karena kehidupannya yang sangat dekat dengan laut, dan tinggal di laut dengan rumahnya baik di atas rakit maupun bambu, mereka sering disebut sebagai suku Bajau Laut.⁵⁹

Meskipun ada kelompok-kelompok perompak tersebut, Kesultanan Sulu mampu menegakkan hegemoninya atas mereka dan mengintegrasikan mereka sebagai suatu kekuatan laut dalam hal perompakan. Wilayah operasional perompakan mereka menjadi jangkauan lingkup pengaruh Kesultanan Sulu, meskipun tidak selalu menjadi bukti penegakan kekuasaannya secara langsung. Ini terjadi seiring dengan penyebaran kelompok-kelompok tersebut ke luar wilayah Kesultanan Sulu, seperti di Kalimantan Timur dan Utara.

Penyebaran ini yang awalnya dipicu oleh kegiatan melakukan perompakan, selanjutnya diikuti menjadi pembangunan permukiman yang mengarah pada pembentukan diaspora. Periode abad XVI menjadi proses pembentukan diaspora dari komunitas pelaut dan perompak Filipina Selatan di sepanjang perairan Kalimantan Utara dan Timur yang merupakan daerah operasional mereka. Umumnya, mereka menguasai muara sungai yang mengalir dari pedalaman ke laut sebagai tempat berkumpulnya nelayan atau pedagang dan tempat penimbunan produk dari pedalaman untuk ditukar dengan produk luar yang diangkut oleh perahu-perahu dagang kecil. Pemilihan lokasi diutamakan pada muara sungai kecil yang berada di luar jangkauan penguasa lokal dan mengembangkan serta meramaikannya hingga tempat-tempat itu tumbuh menjadi bandar di jalur perkapalan perdagangan Kalimantan Utara.⁶⁰ Dari situ mereka bisa ikut berperan dalam perdagangan dan pelayaran rempah dari Maluku menuju Malaka.

Salah satu dari lokasi ini adalah Tempasuk, yang terletak di muara Sungai Kadamaian dan dalam nomenklatur modern dikenal sebagai Kota Belud. Meskipun berada di bawah kekuasaan Sultan Kutai, tempat ini tidak termasuk dalam daftar pelabuhan utama kesultanan dan oleh karenanya suku Bajau dan Illanun mengunjunginya serta menghuninya. Selama abad XVI tempat ini kemudian dikembangkan menjadi pusat

59 Clifford Sather, *The Bajau Laut: Adaptation, History and Fate in a Maritime Fishing Society of South-eastern Sabah* (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 86.

60 Everett Jenkins, Jr., *The Muslim Diaspora: A Comprehensive Reference to the Spread of Islam in Asia, Africa, Europe and the America, Volume 2 (1500-1799)* (Jefferson: McFarland, 1999), hlm. 191. Jenkins menyebut bahwa penyebaran suku Bajau ke Borneo berasal dari Makassar setelah penaklukannya oleh VOC pada pertengahan abad XVII. Mungkin yang dimaksudkan adalah Borneo Selatan, sementara Borneo Timur dan Utara yang lebih dekat dengan Filipina Selatan dikunjungi suku Bajau jauh sebelum kedatangan orang Belanda ke Nusantara.

kekuatan ekonomi mereka, dan karena menjadi lokasi penjualan budak lokal, juga dianggap sebagai sarana perompak Illanun.⁶¹

Setelah Tempasuk, sarang perompak yang terkenal adalah Sekarran di pantai timur laut Kalimantan. Dengan lokasi pantainya yang berbukit terjal, Sekarran menjadi tempat yang bagus bagi persembunyian perompak serta tempat mereka dengan ratusan perahunya mengintai pelayaran kapal-kapal dagang. Kampung ini menjadi strategis untuk berinteraksi dengan penduduk pedalaman karena berada di muara dua sungai sekaligus, yakni Sungai Sekaran dan Sungai Undap. Karena keduanya bisa dilayari dengan perahu, perompak yang bersarang di muaranya akan dengan mudah melarikan diri ke pedalaman Kalimantan sehingga lolos dari pengejaran armada penyerang yang memblokade pelabuhannya.⁶²



Sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:817557>

Gambar 3.4 Sungai Undap di Peta Boelangan tahun 1891

Keberadaan para perompak ini kemudian menjadi suatu kekuatan tersendiri yang meluas dalam berbagai aspek kepentingan. Meskipun awalnya lebih ditujukan pada kepentingan ekonomi, yakni merampok

61 I. H. N. Evans, *The Religion of the Tempasuk Dusuns of North Borneo* (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), hlm. 1.

62 Anonim, "Aanteekeningen van het geen de Engelschen, Franschen en Spanjaarden onlangs verricht hebben en nog verrigten, ten aanzien van Solok en het gedeelte van Borneo, dat onder Borneo proper of Solok behoort". Dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1845, jilid 4, hlm. 68.

dan perbudakan, pada akhirnya unsur politik dan dendam ikut berperan. Beberapa pelarian pedagang Islam dari Malaka atau mereka yang dimusuhi oleh orang Portugis tiba di Brunei dan menyebar di wilayah kesultanan ini. Mereka karena kesamaan kepentingan dan diduga juga agama bergabung dengan kekuatan diaspora perompak di sepanjang pantai utara Kalimantan hingga memasuki perairan Kutai. Perpaduan keduanya ini menjadi ancaman yang potensial bagi perkapalan Portugis di sepanjang jalur rempah utara, seperti yang dilaporkan oleh Pigafetta saat kunjungannya ke Brunei.⁶³

Ketidakberdayaan orang Portugis menghadapi dan menghancurkan kekuatan perompak ini menjadikan kelompok Illanun di Kalimantan Utara menjadi semakin kuat. Mereka tidak lagi dianggap sebagai kekuatan perompak, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang ikut menentukan konstelasi politik regional di perairan Kalimantan Utara khususnya. Dalam satu abad, selama abad XVI, mereka berhasil memantapkan eksistensinya dan diperhitungkan oleh para penguasa daerah. Seiring dengan perluasan pengaruh dan lingkup operasinya, interaksi dengan para penguasa daerah semakin intensif dan juga intervensi mereka dalam persoalan internal dan eksternal para penguasa pribumi.⁶⁴

Masyarakat pribumi juga menjadi sasaran aksi perompakan ini, terutama berkaitan dengan perbudakan. Mereka yang dianggap hidup liar sering ditangkap oleh para perompak ini dan dijual untuk dijadikan budak. Akibatnya, mereka tidak membatasi diri di sepanjang pantai utara tetapi memasuki pantai timur Kalimantan di Selat Makassar.

*Onder de volkstammen, die men kan annemen dat zich in de Indische wateren aan zeeroof overgeven, moet men rangschikken de rayats, die eenige verspreide en moeilijk te naderen eilanden bewonen; de voortvlugtige en gebannen kleine vorsten of hoofden, welke hoezeer ook in geringe mate, zich onder hen zijn komen vestige met een talrijke familie en slaven.*⁶⁵

63 Dalam kunjungannya, Pigafetta melihat kenyataan bahwa di pelabuhan dan pasar Brunei, budak banyak diperdagangkan oleh orang-orang Illanun dan Bajau. Orang Portugis tidak bisa melarangnya meskipun mengetahui bahwa budak itu berasal dari hasil penangkapan penumpang dan awak kapal yang dirompak oleh mereka. Sementara itu Sultan Brunei ikut menikmati keuntungan dari penjualan budak tersebut dalam bentuk pemungutan upeti. Colonial Office, *Annual Report on Brunei for the Year 1950* (London: H.M. Stationery Office, 1950), hlm. 66.

64 Sultan Riau Mahmud pada tahun 1787 bahkan meminta kelompok Illanun dari Sabah untuk membantunya melawan VOC. Ini berarti bahwa ketenaran kelompok ini telah meluas ke mana-mana. John N. Miksic, *Early Singapore, 1300s-1819: Evidence in Map, Text, and Artefacts* (Singapore: Singapore International Museum, 2004), hlm. 39.

65 J. H. P. E. Kniphorst, "Historische Schets van de Zeeroof in den Oost Indischen Archipel" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1882, volume 1, hlm. 245.

Di antara suku-suku yang bisa diduga menjadi korban perompakan di perairan Hindia harus dikelompokkan dalam rakyat, yang menghuni pulau-pulau yang tersebar dan sulit didekati; para raja kecil atau kepala adat yang dibuang atau melarikan diri, yang meskipun jumlahnya sedikit, bisa tinggal bersama mereka bersama banyak keluarga dan budaknya.

Dari kutipan di atas tampak bahwa sasaran perbudakan oleh para perompak tidak hanya terbatas pada kalangan warga biasa, tetapi juga para penguasa yang telah dikalahkan ditawan dan diangkut sebagai budak bersama keluarganya. Ini terjadi menurut laporan tersebut di daerah Berau dan Pasir di Kalimantan Timur yang menjadi korban serangan perompak dari Mindanao Selatan, diduga dari Kepulauan Sulu.

Bukan hanya orang Portugis yang menjadi korban serangan perompak Filipina Selatan ini, orang Spanyol juga mengalami nasib yang sama. Dua kelompok perompak terbesar yaitu Illanun dan Balangnini berada dalam lingkup kekuasaannya berdasarkan pada perjanjian dengan Portugis tahun 1529. Oleh karenanya, Spanyol cukup menderita karena jalur perkapalan mereka dari Manila ke Maluku harus melewati wilayah operasi perompak tersebut. Begitu hebat serangan perompak terhadap orang-orang Spanyol, di kalangan mereka muncul fiksi mengenai perompakan ini.⁶⁶

Dengan ambisinya, orang-orang Spanyol sejak pertengahan abad XVI menguasai lautan di sekitar Kepulauan Sulu. Mereka mencegat kapal-kapal lain yang berlayar di sana dan memaksa perkapalan penduduk setempat juga dengan ancaman pembayaran upeti kepada gubernur Spanyol di Manila. Setelah tahun 1580 orang-orang Spanyol ini hanya mengizinkan perkapalan Portugis dari dan menuju Maluku yang melewati jalur utara di perairan Sulu dan Sulawesi Utara. Kebijakan ini kemudian menjadikan mereka sebagai sasaran utama serangan kapal perompak Sulu dan membunuh orang-orang Spanyol yang berada di atasnya tanpa menjadikan mereka sebagai budak atau tawanan.⁶⁷

Keresahan para pejabat Spanyol baik sipil maupun militer terhadap keberadaan perompakan di perairan kepulauannya ini tampak dari kutipan berikut ini.

66 David Cordingly dan John Falconer, *Pirates: Fact and Fiction* (London: Collins and Brown, 1992), hlm. 120.

67 Anonim, "Berigten omtrent de Zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*, tahun 1855.

El Mayor Muller visito este archipiélago, y en la relación de su viaje insto al gobierno a que mandase formar un establecimiento en la isla principal del grupo con objeto de proteger a los habitantes contra los asaltos de los piratas del norte de Borneo e impedir que estos infesten continuamente el paso directo del comercio de China.⁶⁸

Mayor Muller mengunjungi kepulauan ini, dan sehubungan dengan perjalanannya ia mendesak pemerintah untuk mendirikan sebuah pangkalan di pulau utama gugusan tersebut untuk melindungi penduduk dari serangan perompak dari Kalimantan Utara dan untuk mencegah serangan-serangan tersebut terus-menerus mengganggu jalur langsung perdagangan Cina.

Dalam kutipan itu tampak bahwa perairan di sekitar Kalimantan Utara merupakan daerah yang cukup rawan karena ancaman perompakan. Bahkan perdagangan Spanyol dari Maluku ke Cina yang mengangkut rempah terancam karena perompakan tersebut.

Selama keberadaan mereka di Nusantara, baik orang Portugis maupun orang Spanyol tidak mampu mengatasi masalah perompakan laut ini. Menghadapi lawan mereka yakni para penguasa Islam, mereka bisa menggunakan strategi kekerasan dan perundingan, begitu juga dalam kompetisi di antara mereka sendiri. Namun, menghadapi kekuatan perompak, senjata dan armada Portugis dan Spanyol sepanjang abad XVI–XVII awal tidak mampu menundukkan mereka. Hal ini diduga disebabkan oleh kenyataan berikut ini.

De macht ter zee waarover men beschikken, was er in het geheel niet op ingericht om den zeeroof met wortel en tak te vernietigen. Juist in dezen tijd zijn de van Mangindanao afkomstige Illano vloeten en de benden Zee Dajaks (Seribas) iit Serawak zeer machtig. Erger nog was omstreeks denzelfden tijd de stoutheid der zeeroovers, die ter reede van Pontianak op de prauwen loerden, welke met de lading voor de buiten liggende wangkangs de rivier afvoeren.⁶⁹

Kekuatan yang orang miliki di lautan pada dasarnya tidak ditujukan untuk menghancurkan perompakan sampai akar dan rantingnya. Pada masa ini, armada Illanun yang berasal dari Mangindanao dan gerombolan orang Dayak Laut (Seribas) dari Srawak sangat kuat. Yang lebih parah lagi sekitar masa ini adakah kenekatan para perompak laut

68 D. Miguel Sanchez, *Las posesiones holandesas en el archipiélago de la India* (Manila: De Los Amigos del Pais, 1855) hlm. 97.

69 J. Ozinga, *De economische ontwikkeling der Westerafdeeling van Borneo en de bevolkingsrubbercultuur* (Wageningen: Zomer en Keuning, 1940), hlm. 97.

yang mengintai perahu-perahu di pelabuhan Pontianak, yang bersama muatannya meluncurkan wangkang yang berlabuh di luarnya di aliran sungai itu.

Pernyataan tersebut mengakui kesulitan kekuatan armada Eropa, baik Portugis dan Spanyol maupun kemudian Belanda dalam menghadapi kekuatan perompak Mangindanao dan kemudian juga orang Dayak Laut (mungkin yang dimaksud adalah Bajau). Jelas bukan senjata yang menentukan keunggulan, melainkan strategi dan ini akan kembali terulang di abad XVII sampai berakhirnya era pelayaran rempah.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 4

AKHIR JALUR REMPAH UTARA

Periode intervensi Portugis dan kemudian Spanyol dalam percaturan perdagangan dan perkapalan rempah di Nusantara, apa pun dampak dan sifatnya, telah meramaikan jalur perdagangan, khususnya menciptakan dinamika baru pada rute pelayaran melalui perairan utara, yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Meskipun ada gangguan perompakan yang masif pada abad XVI di perairan antara Sulawesi-Filipina-Ternate dan meluas sampai Kalimantan Utara pada akhir abad itu, kenyataan menunjukkan bahwa jalur tersebut semakin ramai dan menjadi jalur kompetitif bagi pelayaran melalui Laut Jawa yang sebelum abad tersebut mendominasi jalur pelayaran rempah dari Maluku ke pusat pengekspor Malaka.

Penguasaan Malaka oleh Portugis dan Manila oleh Spanyol pada abad XVI, serta petualangan mereka di Ternate dan Tidore telah mengakibatkan daerah pelayaran di perairan utara Nusantara ini menjadi hidup dan sekaligus objek dinamika ekonomi serta kompetisi di antara pihak-pihak yang berkepentingan menguasai sumber produksi. Tampilnya Kesultanan Sulu sebagai kekuatan laut regional yang dominan pada era itu menjadikan perairan Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara sebagai "arena" dalam kompetisi kekuatan militer dan ekonomi asing di Nusantara pada era tersebut, yang membentuk poros Maluku-Malaka pada abad XVI.

Kondisi ini tiba-tiba mengalami perubahan pada awal abad XVII dengan kehadiran orang-orang Belanda dan Inggris di Nusantara, yang

memiliki tujuan sama seperti orang Portugis dan Spanyol. Dengan strategi yang berbeda dan dibekali dengan kekuatan yang lebih modern, khususnya modal yang lebih besar, orang Belanda segera mampu menegakkan hegemoninya atas perdagangan rempah dalam waktu kurang dari dua dekade sejak kedatangan mereka pada akhir abad XVI. Puncak hegemoni Belanda adalah tindakan mereka mengusir orang Portugis dan menaklukkan Malaka pada tahun 1641, yang dengan demikian mengakhiri jalur pelayaran rempah antara Malaka-Maluku. Politik monopoli VOC dan juga berakhirnya fungsi pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa mengubah struktur perdagangan dan pelayaran rempah selamanya.

A. HEGEMONI VOC

Setelah meraih kebebasannya dari penjajah Spanyol pada pertengahan abad XVI¹, Belanda menegakkan kekuasaan di negerinya di bawah pemerintahan rezim dinasti Oranje. Namun demikian, hal itu bukan berarti mereka terlepas dari ketergantungan kepada bekas penjajah mereka, karena dalam ekonomi dan khususnya perdagangan Belanda tetap saja bergantung pada pasokan produk Timur dari Spanyol dan Portugal. Terutama ini terjadi setelah kedua negara Iberia ini berhasil menemukan jalur perkapalan ke sumber produksi rempah dan menguasainya sebagai komoditas dominan dalam perdagangan Eropa. Praktis Lisabon menjadi bandar distribusi utama bagi pengiriman rempah-rempah ke Eropa, seperti Venesia, Antwerpen, Rotterdam, dan Amsterdam.²

Struktur demikian menyebabkan kerugian dan beban yang berat harus ditanggung oleh para pedagang Belanda, kelompok yang dominan dalam masyarakat Belanda pada awal kemerdekaannya. Mereka tidak hanya harus menunggu pasokan rempah dalam kuantitas tertentu yang dibutuhkan sebagai kuota kebutuhan publik, tetapi juga harus membelinya dengan harga yang tinggi yang kadang-kadang melebihi daya beli masyarakat Belanda. Oleh karenanya, dibandingkan dengan masyarakat Portugal dan Spanyol, masyarakat Eropa lainnya hanya

1 Otto Julius Bernhard von Corvin Wierbitsky, *De tachtigjarige oorlog der Nederlanders tegen Spaansche Overheersching, eerste deel* (Amsterdam: M. H. Binger, 1884), hlm. 108. Pangeran Willem van Oranje memegang kekuasaan sementara di Belanda sejak 1561 tetapi pada tahun 1575 suatu pemberontakan terjadi dan dia digantikan oleh penguasa lain.

2 J. J. Alberda, *Schets der Handelsgeschiedenis* (Amsterdam: P. N. van Kampen, 1862), hlm. 15. Selain rempah, Lisabon juga menjadi pasar budak dan kain produk Asia yang terkenal dan dibutuhkan di Eropa.

memperoleh sedikit kuota pasokan rempah dan membayarnya dengan harga mahal yang kembali memberikan keuntungan kepada Portugal dan Spanyol.

Kondisi tersebut mendorong ketidakpuasan di kalangan masyarakat Belanda, khususnya di kalangan para pedagang yang kemudian berinisiatif untuk mencari sendiri sumber produksi rempah itu. Setelah mendapatkan izin dari Raja Belanda, mereka mengirimkan armadanya lewat Laut Utara dengan maksud menghindari Jazirah Iberia, tetapi mengalami kegagalan. Pengalaman ini mengajarkan kepada mereka bahwa jalur pelayaran tetap harus dilakukan melalui jalur yang ditempuh oleh orang Portugis atau Spanyol, yaitu melewati Samudra Atlantik dan kemudian menyusuri Afrika Selatan yang akhirnya membawa mereka ke perairan Asia Tenggara.³

Selama pelayaran ini mereka tidak melakukan banyak persinggahan karena kekhawatiran akan bertemu dengan armada Portugis yang bisa mengakibatkan konflik di lautan. Mengingat semua orang Belanda yang mengikuti pelayaran ini memiliki latar belakang sebagai pelaut dan pedagang, motif ekonomi menjadi pendorong utama. Mereka tidak mempersoalkan urusan politik dan agama, seperti yang menjiwai orang-orang Portugis dan Spanyol. Dengan diilhami oleh nilai-nilai Protestan yang kuat, orang-orang Belanda ini tidak perlu meminta restu dari Paus di Roma dan tidak mempersoalkan masalah Perang Salib yang mendorong orang-orang Portugis memusuhi kekuatan Islam di Asia.

Dengan diam-diam memperoleh informasi dari para pedagang Portugis di Lisabon ketika dikirim sebagai agen dagang di sana pada tahun 1592, Cornelis de Houtman melaporkan bahwa ia telah memperoleh peta pelayaran mereka ke Nusantara dan siap berangkat.⁴ Setibanya di perairan Nusantara pada tanggal 23 Juni 1596, orang-orang Belanda ini mendarat di Banten berdasarkan informasi bahwa jalur pelayaran tersebut merupakan pasar lada terbesar di Nusantara. Lada sebagai salah satu komoditas rempah yang dicari menjadi alasan utama orang Belanda bertemu Sultan Banten dan melakukan pembelian

3 Pelayaran mereka lewat Laut Utara dilakukan pada tahun 1592, tetapi karena cuaca yang sangat dingin dan banyak lautan membeku, armada kapal mereka tidak bisa melanjutkan pelayaran dan sebagian yang selamat harus kembali ke Belanda. Untuk itu mereka kemudian memilih jalur selatan yang sudah dikenal sebagai jalur perdagangan meskipun mengandung risiko berhadapan dengan kekuatan Portugis. Ronald Prud'homme van Reine, *Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot* (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009), hlm. 24–25.

4 H. C. Rogge, *De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indie en Cornelis de Houtman* (Leiden: E. J. Brill, 1895), hlm. 9.

pertama mereka di Nusantara. Selanjutnya, orang-orang Belanda ini berlayar ke Maluku dan berhasil mendapatkan rempah lain di Ambon. Dengan bekal perolehan pertama ini mereka memutuskan berlayar kembali ke negaranya.

Setibanya di Belanda, hasil ini menjadi penemuan yang mengejutkan. Bukan hanya komoditas yang dibongkar di pelabuhan Amsterdam, melainkan juga berita dan pengalaman mereka dalam pelayaran ke Nusantara menjadi khazanah modal dasar yang diperlukan bagi petualangan berikutnya. Namun demikian, ancaman dari Portugis dan Spanyol serta potensi persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri menjadi agenda persoalan yang harus di atasi. Setelah berunding di antara mereka dan mendapatkan persetujuan Raja, tiap-tiap kamar dagang yang sebelumnya mengirimkan armada sendiri ke Nusantara memutuskan untuk bergabung menjadi suatu kongsi dagang. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602 *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) terbentuk yang mendapatkan hak-hak istimewa (*octrooi rechten*) dari Raja Belanda sebagai badan usaha sekaligus badan kekuasaan.⁵

Dengan menggunakan kongsi dagang ini, orang Belanda yang tergabung dalam VOC kembali melakukan pelayarannya ke Nusantara. Kini, dengan kekuatan modal, tenaga, dan dukungan sepenuhnya dari Kerajaan, mereka lebih siap untuk menghadapi kompetisi dari orang-orang Portugis dan Spanyol yang mereka anggap sebagai lawan utama dalam rencana menguasai kepulauan rempah di Nusantara. Selain itu, mereka juga memiliki motivasi utama untuk mendapatkan rempah sebanyak mungkin dan akhirnya dengan modal tersebut akan menjadi distributor utama rempah-rempah di Eropa menggantikan Lisabon.

Bertolak dari motivasi tersebut, dekade pertama keberadaan VOC di Nusantara mendorong mereka untuk menguasai Maluku sebagai target utama dan selanjutnya menegakkan hegemoni dalam perdagangan rempah lewat monopoli.⁶ Langkah ini bukan hanya membuat VOC harus bersaing dan berbenturan dengan orang-orang Portugis dan Spanyol,

5 Hak *octroi* yang diberikan mirip dengan kekuasaan yang dilimpahkan pada suatu negara, seperti mencetak uang, memiliki pasukan dan aparat peradilan, menjalin hubungan dengan kekuatan lokal, serta memaklumkan perang. Oleh karenanya, sering diartikan bahwa VOC merupakan negara dalam negara Belanda. J. J. Meinsma, *Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen, eerste deel* (Delft: Joh. Ijckema, 1872), hlm. 25.

6 Monopoli ini terdiri atas dua aspek: melarang penduduk menjual hasil tanaman rempah kepada siapa pun kecuali kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan dan menentukan kuantitas dan jenis tanaman rempah yang wajib ditanam oleh penduduk. J. E. de Klerk, *Batjan* (Batavia: Lange en Co, 1864), hlm. 13.

melainkan juga dengan raja-raja dan penguasa pribumi di Nusantara yang juga berperan dalam perdagangan rempah.

Konflik dengan Portugis dan Spanyol segera terjadi di Kepulauan Maluku pada awal abad XVII, yang ditandai dengan perebutan kastil *Nossa Senhora da Anucianda* milik Portugis di Ambon pada tanggal 23 Februari 1605.⁷ Dengan kekuatan teknologi senjata yang lebih baik dan strategi mereka yang melibatkan persekutuan dengan penguasa pribumi, VOC memanfaatkan situasi konflik yang terjadi antara orang-orang pribumi Maluku dan kebencian mereka terhadap orang-orang Portugis dan Spanyol. Hal ini membawa hasil yang besar dengan penguasaan VOC atas Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya hanya dalam waktu beberapa tahun sejak pendiriannya, sementara keberadaan Portugis dan Spanyol di Maluku Utara sampai pertengahan abad XVII tidak dianggap sebagai potensi ancaman bagi VOC.⁸

Dengan fokus mengeksploitasi Kepulauan Maluku bagian tengah dan Banda, VOC mengalihkan perhatian dari musuh Iberia mereka. Setelah berhasil menyingkirkan orang Inggris sebagai pesaingnya di Ambon, VOC memaksakan monopolinya untuk mengeksploitasi produksi rempah dan mempertahankan kestabilan harga lewat taktik pelayaran hongi terhadap penduduk setempat.⁹ Situasi ini mengakibatkan konflik yang sering berakhir dengan kekerasan dan pemusnahan, seperti yang terjadi di Pulau Banda, oleh VOC terhadap penduduk pribumi.¹⁰

Akan tetapi, keberhasilan VOC menguasai sebagian besar Maluku pada dekade kedua abad XVII ini justru mendorong perubahan yang

7 Gerrit Knaap, "Kora-Kora en kruitdamp: de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in oorlog en vrede in Ambon" dalam Gerrit Knaap dan Ger Teitler (eds.), *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 158.

8 Gerrit Knaap, "De Ambonse eilanden tussen twee mogendheden: De VOC en Ternate, 1605–1656" dalam Elisabeth Locher-Scholten dan Peter Rietbergen (eds.), *Hof en Handel: Aziatische vorsten en de VOC, 1620–1720* (Leiden: KITLV Press, 2004), hlm. 54. Kestabilan itu ditandai dengan perjanjian tahun 1652 antara VOC dan Sultan Mandarsyah di Ternate yang memberi hak VOC untuk membangun benteng dan membatat semua pohon cengkih di wilayahnya apabila diperlukan selama VOC melindungi Ternate terhadap musuh-musuhnya, termasuk musuh Eropa. Ini menjadi langkah awal bagi aneksasi Ambon dan sekitarnya secara resmi oleh VOC dan pelepasan kekuasaan Ternate di Maluku pada tahun 1676.

9 D. C. de Bruin, *Geschiedenis der Nederlanders in den Oost Indische Archipel, eerste stuk van 1593 tot 1723* (Batavia: G. Kolff en Co, 1863), hlm. 79.

10 Atas perintah Coen, semua penduduk pria Banda yang dituduh melawan Kompeni dan membangkang perintahnya dibunuh pada tahun 1621, sementara penduduk wanita dan anak-anak dipindahkan ke tempat lain. Untuk selanjutnya orang-orang dari pulau lain diangkut dan ditempatkan di Banda untuk menanam tanaman rempah sesuai perintah Coen. J. A. van der Chijs, *De vestiging van het Nederlandsche Gezag over de Banda eilanden, 1599–1621* (Batavia: Albrecht en Co., 1886), hlm. 167-168.

terjadi secara internal. Perubahan ini bukan disebabkan oleh peristiwa yang berlangsung di Maluku, melainkan di bagian lain Nusantara, yaitu di Jawa. Hubungan dengan Kesultanan Banten yang terbentuk sejak tahun 1596 terus dipertahankan dan menunjukkan fluktuasi juga yang bergantung pada kepentingan VOC.

Meskipun pada awalnya hubungan ini ditandai dengan transaksi perdagangan normal, sejak awal dekade kedua abad XVII eskalasi kompetisi dan konflik mulai meningkat. Hal ini dipicu oleh keinginan VOC untuk mendapatkan pijakan tetap di tanah Banten dengan maksud membangun loji di sana. Seperti halnya di Banda, di Banten VOC menghadapi saingan orang Inggris yang memiliki tujuan serupa dan awalnya harus mengalah terhadap persekutuan Banten-Inggris. Akan tetapi, dengan kekuatan lebih besar, VOC berhasil mengalahkan Banten dan memperoleh tanah di Teluk Jakarta yang kemudian dibangun menjadi loji pada tahun 1619 dan akhirnya Batavia berkembang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara.¹¹

Pada tahun-tahun pertama keberadaannya di Jawa, VOC lebih disibukkan pada dua tugas utama: maksimalisasi eksploitasi rempah di Maluku dan konsolidasi kekuatannya. Rempah tetap menjadi komoditas utama yang merupakan sasaran VOC untuk hadir dan berkuasa di Nusantara. Oleh karenanya, dengan dukungan dan perkenan dari Kerajaan, VOC menegakkan hak monopoli atas pembelian produk rempah langsung dari masyarakat dan menjualnya kepada produsen. Berbeda dengan orang Portugis yang hanya memonopoli perdagangan dan membawanya ke Eropa untuk didistribusikan di pasar-pasar di sana, VOC memonopoli produksi dan penjualannya, sementara mereka menjualnya tidak selalu harus ke Eropa. Mereka berdagang rempah sesuai dengan kebutuhannya di wilayah Nusantara, sehingga rempah hasil produksi Maluku bisa dijual di pasar-pasar Asia Tenggara atau Asia Timur tempat koloninya berada, sementara dari Asia Timur dan Asia Selatan mereka juga mengambil produk lain untuk dijual ke Nusantara. Oleh karenanya, kuota produksi yang dibawa ke Eropa bisa saja tidak maksimal dan lebih banyak sebagai hasil pembagian kuota dalam perdagangannya di Asia.

Penguasaan atas produksi ini menjadikan VOC juga bertindak sebagai penguasa di pusat produksi rempah Maluku. Jika Portugis dan Spanyol

11 Leonard Blusse, "Queen among Kings: Diplomatic Ritual in Batavia" dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas (eds.), *Jakarta: Socio-cultural Essays* (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 28.

lebih mengandalkan hubungan persekutuan dengan penguasa pribumi untuk memperoleh pasokan rempah, VOC mendapatkan langsung dari penduduk. Bahkan mereka menegakkan kontrol langsung atas kehidupan penduduk di pulau-pulau produsen rempah yang dikuasainya dengan menggunakan kekerasan atau aturan-aturan yang ketat. Pelayaran hongi dengan armada kora-koranya yang memangkas tanaman rempah penduduk (hak ekstirpasi) menjadi bukti bahwa monopoli VOC disertai dengan kekerasan senjata.¹²

Kesibukan kedua, konsolidasi kekuasaan, dituntut dari para petinggi VOC karena kehadirannya dalam struktur politik dan perdagangan Nusantara melibatkan mereka dalam situasi konflik kepentingan. Selain kompetisi bangsa Eropa dan bangsa Asia, VOC dengan proyek monopolinya juga segera berhadapan dalam konflik kepentingan dengan para penguasa pribumi setempat yang menolak tuntutannya. Meskipun bukan merupakan sumber produksi rempah, sejumlah penguasa pribumi berkepentingan dengan kebebasan perdagangan rempah. Hal ini tampak nyata sebagai pernyataan tegas mereka terhadap utusan VOC yang meminta adanya penegakan monopoli seperti di Banten dan Makassar.¹³

Hubungan dengan daerah sekitar Batavia juga menjadi rawan karena konflik kepentingan tersebut. Sejak pendirian pangkalannya di Batavia, VOC segera berhadapan dengan Kesultanan Banten yang berkepentingan pada perdagangan lada mereka. Hilangnya tanah Jakarta atau Jayakarta yang berubah menjadi Batavia menegaskan bagi Banten bahwa kehadiran VOC menjadi ancaman bagi eksistensinya. Oleh karenanya, sepanjang abad XVII hubungan antara VOC dan Kesultanan Banten tetap diwarnai oleh suasana permusuhan yang beberapa kali memuncak menjadi pertempuran bersenjata.¹⁴

Namun, peperangan besar pertama yang dihadapi oleh VOC justru terjadi melawan musuh yang tidak berkepentingan terhadap

12 J. B. J. van Doren, *Herinneringen en Schetsen van Nederlands Oost-Indie uit de reizen van drie gewesten* (Amsterdam: J. D. Sibrandy, 1860), halaman 98.

13 S. E. Harthoorn, *De grondlegging van Batavia* (Batavia: Ernst en Co, 1873), hlm. 11.

14 Sepanjang sejarahnya hubungan VOC-Banten diwarnai dengan fluktuasi konflik-damai silih berganti, setidaknya sampai tahun 1682 ketika VOC berhasil menjamin pengaruhnya lewat pengukuhan Sultan Haji di keraton Banten. Namun demikian, perlawanan rakyat dalam bentuk gerombolan terus berlangsung bahkan sampai setelah Kesultanan Banten dihapuskan oleh Daendels pada tahun 1810, perlawanan orang-orang Banten terhadap Belanda masih terus ada. M.D. Teenstra, *Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen* (Groningen: J. Oomkens en J. Zoon, 1846), hlm. 99.

perdagangan rempah, yaitu Mataram. Kerajaan Jawa di pedalaman ini mencapai puncak kebesarannya pada pertengahan pertama abad XVII dan menjadi produsen sekaligus pemasok utama beras sebagai bahan pangan di seluruh Nusantara.¹⁵ Oleh karenanya, antara VOC dan Mataram sebenarnya terjadi konflik bukan karena monopoli rempah VOC yang tidak dimiliki Mataram, melainkan lebih pada konflik perebutan dominasi strategis, yaitu menampilkan diri sebagai kekuatan yang dominan di Jawa.

Serangan Mataram dua kali terhadap Batavia, yakni pada 1628 dan 1629, membuktikan keseriusan Mataram untuk menghilangkan kompetisi dominasinya dan bukan bermaksud untuk menghancurkan kekuatan dagang VOC atau merebut monopoli rempahnya. Berbeda dengan kekuatan kontra-Portugis di Malaka yang bisa membentuk persekutuan, Mataram tidak bisa mengerahkan para penguasa lain yang berkepentingan dengan terusirnya VOC, seperti Banten dan Banjarmasin, saat itu untuk bersama-sama menyerbu Batavia. Ini membuktikan bahwa rivalitas keduanya lebih didorong oleh motivasi kompetisi dominasi daripada kepentingan ekonomi.¹⁶

Selain kegagalan usaha Mataram ini, strategi Sultan Agung di Mataram dalam membangun kekuasaannya justru sebaliknya menguntungkan bagi VOC. Selama dua dekade berkuasa pada awal abad XVII, Sultan Agung telah menghancurkan dan menaklukkan para penguasa pantai di sepanjang pesisir Jawa dari Cirebon hingga Madura. Semua bandar yang dikuasai oleh para bupati pesisir ini ditutup dan pelayaran di sana dilarang keras, sehingga kebijakan ini mengubah orientasi dari pesisir atau maritim menjadi agraris atau feodal yang bersumber pada raja sebagai kekuatan sentralnya, yang merupakan ideologi kosmologis Mataram.

Dengan kebijakan demikian, praktis tidak ada lagi kekuatan laut Jawa yang dibangun sejak Sriwijaya hingga Demak dan menguasai

15 Tingginya produktivitas beras Mataram disaksikan oleh utusan VOC ke keraton ini pada tahun 1646, Rijcklof van Goens. Anonim, *Javaansche Reyzen gedaen van Batavia over Samarangh na de Koninklijke hoofdplaats Mataram in 1646* (Doordrecht: Boekverkooper, 1666), hlm. 2.

16 Ini terbukti ketika *Oppekoopman* Vos diutus ke Batavia untuk menghadap Sultan Agung yang baru saja berhasil menaklukkan Madura pada tahun 1624. Di keraton Karta, Vos diminta oleh Sultan untuk menyampaikan kepada Gubernur Jenderal Carpentier Alting agar Batavia tunduk kepada Mataram. Vos menolak, bahwa kedatangannya bukan untuk menunjukkan ketundukan, melainkan persahabatan. Sultan Agung merasa tersinggung atas jawaban itu dan sejak itu ada rencana untuk menguasai Batavia. Wilhelmus Albertus Terwogt, *Het Land van Jan Pieterszoon Coen: Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië* (Hoorn: P. Geerts, 1892), hlm. 236.

perdagangan berasnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuatan maritim (*vacuum of maritime*) dan hal ini segera memberi kesempatan VOC untuk menggantikannya. Kegagalan blokade Mataram terhadap Batavia selama dua tahun serangannya disebabkan oleh kekuatan laut VOC yang masih bisa menguasai maritim sehingga akses kastil Batavia tetap terbuka ke arah laut dan memasukkan logistik yang tidak bisa dilakukan lewat darat. Sebaliknya, isolasi laut oleh armada VOC melemahkan kekuatan ekonomi Mataram yang tidak lagi bisa membangun kembali armada laut orang Jawa seperti yang dominan sebagai distributor beras selama satu milenium sebelumnya.¹⁷

Akan tetapi, bagi kepemimpinan VOC para penguasa pribumi bukan menjadi prioritas lawan mereka yang utama. Perhatian mereka tetap memandang kompetitor Eropa jauh lebih berbahaya dan kehadirannya di Nusantara dalam konteks perdagangan dan perkapalan rempah harus dilenyapkan. Meskipun di Maluku kekuatan Eropa yang terwujud pada orang Portugis mengalami kemerosotan tajam pada akhir abad XVI setelah konflik mereka dengan Ternate pada tahun 1575, kehadiran mereka tetap berpotensi mengancam kestabilan niaga VOC. Bandar dan benteng Malaka sebagai simbol dominasi Portugis di Nusantara masih tetap menjadi potensi kompetisi yang penting bagi pelayaran VOC dan perdagangannya. Oleh karenanya, sejak 1630, setelah hubungan dengan para penguasa pribumi Banten dan Mataram bisa diatur atau setidaknya eskalasi permusuhan mereda, kekuatan utama VOC diarahkan ke Malaka.

Proses penaklukan Malaka dimulai sejak tahun 1630-an, tetapi usaha itu tidak membawa hasil. Selain konsentrasi kekuatan VOC yang masih berada di Maluku, tidak ada usaha terpadu dan serius untuk menyerbu Malaka dari Batavia. Baru setelah konsolidasi kekuatannya berakhir pada awal 1640-an, rencana serius disusun untuk mewujudkan penaklukan itu. Dengan pengiriman armada yang kuat pada awal 1641, Malaka diblokade selama beberapa bulan sehingga hubungan ke luar, baik ke Maluku maupun pangkalan Portugis di India dan kedudukan Spanyol di Manila, terputus. Menghadapi blokade demikian, penguasa Portugis di Malaka tidak memiliki alternatif lain kecuali menyerah. Sejak penandatanganan penyerahan ini, orang-orang Portugis diusir

¹⁷ Kegagalan serangan Mataram kedua terhadap Batavia yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 1629 adalah penutupan semua muara sungai dan pesisir oleh armada VOC di sepanjang pantai dari Batavia sampai Tegal pada tanggal 11 Juli 1629 dan penghancuran lumbung berasnya. Akibatnya, pasukan Mataram yang mengepung Batavia tidak mampu bertahan lama dan menderita kelaparan dan pada bulan Oktober 1629 berhasil dipukul mundur. W. J. Knoop, "Beschouwingen over onze Indische krijgsgeschiedenis, deel I" dalam *De Gids*, volume 24, jilid II, tahun 1888, hlm. 14–18.

dari Malaka dan kembali ke India dan sejak itu Bandar Malaka berada di bawah kekuasaan VOC.

Namun, pendudukan VOC ini tidak memiliki makna ekonomi yang penting dibandingkan makna politiknya, yang berbeda dengan pendudukannya oleh Portugis seratus tiga puluh tahun sebelumnya. Dengan penguasaan sumber produksi rempah di Maluku secara langsung dan penguasaan Laut Jawa oleh armadanya pasca-penghancuran pesisir Jawa oleh Mataram pada tahun 1625,¹⁸ VOC menjamin keamanan jalur pelayaran dan perdagangan rempah dari Maluku ke Batavia yang bisa langsung melalui Selat Sunda mengirimkan armadanya ke koloninya di Ceylon dan langsung ke Eropa. Mengenai hubungan pelayarannya dari Batavia ke Deshima di Jepang, perkapalan VOC juga tidak terganggu oleh keberadaan pangkalan Portugis di Malaka karena VOC melewati Laut Cina Selatan setelah menyinggahi Sukadana.

Namun demikian, kejatuhan Malaka oleh VOC ini menandai berakhirnya jalur perkapalan rempah di utara, yaitu melewati Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara, yang tidak lagi dominan sebagai jalur pelayaran rempah karena dua hal. Pertama, VOC tidak menjadikan Malaka sebagai bandar utama seperti orang Portugis, tetapi lebih memusatkan aktivitas ekonomi dan transitnya di Batavia sesuai program kebijakannya untuk menjadikan Batavia sebagai bandar terbesar di Timur. Kedua, pola perdagangan rempah VOC berbeda dengan Portugis yang tidak selalu bergantung pada daerah produsen dan daerah transit, sehingga makna Malaka sebagai tempat penimbunan juga berakhir dan merosot statusnya hanya sebagai pangkalan transit VOC dalam hubungan antara Malaka dan Ceylon atau India.

Orientasi VOC yang tidak lagi di Selat Malaka dicurahkan pada Laut Jawa sebagai bentang geografis yang mendominasi pelayaran di Nusantara.¹⁹ Dengan letak bandar utamanya di Batavia, praktis Laut Jawa menjadi latar depan dalam rencana VOC menguasai geografis politis Hindia yang dihubungkan lewat rantai pelabuhan sepanjang pesisirnya. Penghancuran pesisir utara Jawa oleh Mataram mengakibatkan tampilnya sejumlah bandar non-Jawa di Laut Jawa, seperti Banten,

18 Pieter Jan Veth, *Java Ethnographisch, Sociologisch, Historisch, tweede deel Oud Geschiedenis* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1878), hlm. 315.

19 Singgih Tri Sulistiyono, *The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s–1970s* (Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 2003), hlm. 52.

Banjarmasin, dan Makassar di antara yang paling penting. Mengingat dengan Banten hubungan VOC diwarnai dengan pola fluktuatif dan tidak stabil, orientasi Batavia kemudian ditujukan ke Banjarmasin dan Mataram.

Hubungan pertama VOC dengan Banjarmasin ditandai dengan konflik, seperti halnya dengan Banten dan Mataram. Namun, berbeda dengan keduanya, konflik VOC di Banjarmasin dimulai oleh suatu peristiwa yang tidak terduga bisa berdampak panjang dan membuka hubungan antara keduanya. Konflik ini dipicu dengan adanya salah satu awak perahu VOC yang berdagang di Pantai Banjar pada tahun 1607 dan karena sengketa pribadi terjadi pembunuhan terhadapnya. Pada tahun 1612 Jan Pieterszoon Coen sebagai pimpinan VOC memerintahkan pembalasan dan armada VOC menembaki posisi keraton Banjarmasin. Belajar dari pengalaman ini, orang-orang Banjar kemudian memindahkan istananya jauh dari pantai ke Martapura. Hubungan antara keduanya ditandai dengan konflik yang baru berakhir pada tahun 1635 ketika perjanjian dagang ditandatangani antara kedua pihak.²⁰

Akan tetapi, hubungan baik ini hanya bertahan selama tiga tahun. Meskipun dalam perjanjian itu tercantum bahwa monopoli VOC atas perdagangan lada di Banjarmasin diakui oleh Sultan, keuntungan besar yang dijanjikan dari produk itu mendorong Kesultanan Banjar untuk tidak menghormati isi perjanjian tersebut, atau mungkin saja mereka sebenarnya tidak memahami maksud VOC dengan monopoli, atau menafsirkannya berbeda. Akibatnya, pada tahun 1638 Kesultanan Banjar menerima permintaan para pedagang Inggris yang bermaksud membeli lada dengan harga lebih tinggi daripada VOC.

Kelompok yang anti-VOC di dalam keraton memengaruhi Sultan untuk tidak bergantung pada tuntutan Belanda. Ketika perwakilan VOC di loji Banjar mengajukan protes dan bersiap melakukan tindakan penghukuman, mereka diserang oleh orang-orang Banjar dan 64 orang Belanda yang berada di sana semuanya terbunuh. Berita ini segera menyebar ke daerah lain yang berada di bawah taklukan Banjar, yaitu Kotawaringin. Di sana loji Belanda juga diserang dan 40 orang Belanda yang menghuninya dibunuh semua. Meskipun ada kemarahan Batavia terhadap peristiwa ini, pembalasan Belanda hanya bersifat terbatas. Ketegangan dengan Kesultanan Gowa di Makassar menyita perhatian

20 E. B. Kielstra, *De Vestiging van het Nederlandsche Gezag in den Indischen Archipel* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1917), hlm. 184

VOC daripada memulihkan kehadirannya di Banjarmasin yang baru terjadi pada tahun 1664 dengan pengakuan monopoli ladanya, meskipun juga hanya berumur empat tahun.

Gowa dianggap lebih berbahaya daripada Kesultanan Banjar oleh VOC karena lokasi Makassar dengan pelabuhannya yang besar menjadi kompetitor potensial bagi VOC, bahkan jauh melebihi orang Portugis di Malaka. Kebijakan Sultan Gowa dan para bangsawannya yang menarik potensi perdagangan pribumi dan asing, terutama di bagian timur Nusantara antara Batavia dan Maluku tentu saja menjadi tantangan utama bagi strategi monopoli VOC di sana. Loji Belanda yang pertama kali didirikan di Makassar pada tahun 1607 tidak menjamin penegakan monopoli di sana karena penolakan dari pihak Kesultanan Gowa yang cenderung membuka peluang bagi berbagai bangsa untuk berdagang di sana.²¹

Islamisasi yang dimotori oleh Gowa pada dua dekade pertama abad XVII²² sekaligus menjadikan Gowa sebagai kekuatan dominan di Sulawesi hingga pengaruhnya meluas ke utara sampai Gorontalo dan ke timur sampai Buton serta ke selatan hingga Nusa Tenggara. Hal ini menjadikan Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada pertengahan abad XVII sebagai simbol pesaing utama bagi kepentingan niaga VOC, terutama perdagangan rempahnya di Maluku.

Sejak 1655, ketika Gowa menolak permintaan Batavia untuk membatasi peran perdagangannya di Maluku dan mengurangi potensi pelabuhannya, hubungan antara keduanya menjadi tegang. Eskalasi konflik yang terjadi dalam perkembangan ini segera memuncak dalam agresi armada VOC ke Makassar pada tahun 1660. VOC segera menggalang kekuatan yang terdiri atas lawan-lawan Gowa, seperti Bone, Buton, dan Ternate untuk melakukan blokade terhadap Makassar dan melumpuhkan kekuatannya.²³ Namun demikian, pertempuran itu berlangsung selama tujuh tahun sebelum Gowa menyatakan tunduk kepada VOC dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun

21 Anonim, "Macassar" dalam *De Nederlandsche Hermes*, tahun 1828, nomor 7, halaman 3. Sejak awal hubungan antara orang Belanda dan Kesultanan Gowa tidak harmonis karena pemaksaan monopoli oleh VOC atas perdagangan di Makassar yang menutupnya bagi para pedagang asing.

22 Proses islamisasi ini menjadi program kerajaan yang diundangkan lewat dekrit Sultan Gowa Alaudin tanggal 9 November 1607 yang menyatakan bahwa Islam menjadi ideologi negara dan keyakinan dasar masyarakat Gowa dan taklukannya. Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai abad XVII* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 2.

23 Anonim, "Het Nederlandsch Gouvernement van Makasser op het eiland Celebes" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1843, jilid 1, hlm. 410.

1667.²⁴ Sejak itu, dan meskipun perlawanan dua tahun kemudian terjadi yaitu pada 1669, hegemoni VOC atas kawasan timur Nusantara berhasil ditegakkan dan mengawali periode baru dominasi politik serta ekonomi Belanda di Hindia Timur.

B. VOC DI KALIMANTAN TIMUR

Seperti yang telah disampaikan di atas, VOC menganut strategi dan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang Portugis terhadap koloni mereka di Hindia Timur. Jika Portugis membatasi diri pada satu sentra, yakni Malaka, dan hanya menjalin hubungan dengan Maluku tanpa berperan aktif dalam berbagai bandar kecuali terbatas perdagangan individu, VOC sebagai suatu kekuatan dagang menunjukkan kebijakan agresif sebagai suatu institusi. Dengan kekuatan modal dan senjata yang terpadu, mereka bisa berhadapan dengan raja-raja dan penguasa pribumi serta mengupayakan hubungan kontraktual yang meluas tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan. Monopoli atas produksi rempah segera meluas ke perdagangannya pada dekade pertama abad XVII, dan berkembang menjadi intervensi politik di setiap mitra kontraknya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Portugis selama satu abad.

Secara geopolitik, VOC juga memiliki pandangan yang berbeda dengan orang Portugis. Pola penguasaan teritorial VOC yang ditopang oleh kepentingan niaga adalah menempatkan Batavia sebagai sentra dari semua aktivitas perdagangan. Hal ini bisa tercapai dengan dukungan kekuatan armada yang kuat dan kontrol atas perairan yang didominasi olehnya. Oleh karenanya, perairan laut dimanfaatkan dan diintegrasikan ke dalam program kebijakannya, terutama Laut Jawa yang menjadi latar depan pangkalan utamanya di Batavia. Dominasinya atas Laut Jawa menjadikan Batavia segera menjalin interaksi dengan bandar-bandar lain yang berada di pesisirnya.

Dengan menganut strategi demikian, VOC tidak terlalu memerlukan jalur perdagangan khusus, tetapi menggunakan teritorial perdagangan. Perebutan Malaka olehnya tidak begitu berpengaruh bagi jangkauan monopoli dagangnya karena selain bandar itu sudah melemah sejak lima puluh tahun keberadaannya, lokasinya yang awalnya strategis tidak lagi menjadi sentra dalam proyek hegemoni ekonomi VOC yang telah

24 Anonim, "De Rijken en Vorsten van het Gouvernement van Makassar" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1850, jilid 1, hlm. 419.

bergeser ke Batavia. Oleh karenanya, Malaka segera bergeser menjadi daerah pinggiran yang tidak begitu berarti, seperti halnya Sriwijaya pada era awal kekuasaan Majapahit.

Akan tetapi, meskipun menjadikan Laut Jawa sebagai sentra utamanya yang bukan hanya menghubungkan Maluku dan Batavia melainkan juga mengontrol semua bandar mulai dari Banten hingga Makassar, VOC tidak melupakan selat-selat atau jalan air yang menghubungkan Laut Jawa dengan tempat lain. Selat Makassar dan Selat Malaka tetap berada di bawah kontrolnya dan VOC juga berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan para penguasa pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang pantainya. Bertolak dari kepentingan ini, beberapa penguasa pantai, seperti Palembang, Gorontalo, Jambi, dan Riau Lingga segera menjalin hubungan dengan VOC.

Kalimantan Timur yang berada di Selat Makassar juga tidak luput dari perhatian VOC. Melalui proses islamisasi, wilayah ini memiliki hubungan dengan dan berada di bawah pengaruh Gowa pada pertengahan pertama abad XVII. Banyak perdagangannya yang bergantung pada dan berinteraksi erat dengan Makassar, karena jelas Kutai lebih dahulu menerima Islam.²⁵ Dengan kejayaan Gowa di bawah Sultan Alaudin, hubungan dagang yang intensif dijalin dengan Kutai dan Pasir pada tahun 1620. Oleh karenanya, Selat Makassar juga menjadi lahan transaksi dan perdagangan yang ramai dan banyak orang Makassar yang kemudian tiba dan tinggal di Kutai.²⁶

Kerajaan-kerajaan yang ada di sini, khususnya Kutai, dikunjungi oleh utusan VOC bersama dengan pembukaan hubungan dagang mereka dengan Banjarmasin, yakni pada awal abad XVII. Utusan VOC dari Batavia Gerrit Thomassen Pool yang dikirim ke Banjarmasin untuk pembaharuan perjanjian dan hubungan tiba di sana pada bulan September 1635. Instruksi yang diberikan kepadanya oleh Gubernur Jenderal VOC tidak hanya berkaitan dengan Banjarmasin, tetapi juga untuk menyelidiki daerah pedalaman dan pesisir Kalimantan lainnya. Oleh karenanya, pada tanggal 7 Oktober 1735, Pool bersama lima kapalnya menyusuri Sungai Mahakam dan sampai ke ujungnya sebulan kemudian, pada tanggal 7 November 1635.

25 Islam disebarkan di Kutai pada masa pemerintahan Raja (Aji) di Mendirsa, dan dibawa oleh seorang Arab dari Sumatra bernama Tuan Tunggang Parangan. Tapi tampaknya ada unsur legenda dalam kisah ini karena tokoh ini datang ke Kutai dengan menaiki ikan parangan. S. W. Tromp, "Uit de salasila van Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1888, hlm. 3.

26 P. J. Veth, *Borneo's Wester-Afdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch* (Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon, 1854), hlm. 238.

Dalam laporan VOC, disebutkan bahwa keesokan harinya setelah tanggal itu, yaitu tanggal 8 November 1635 salah seorang dalam rombongan Pool yang masih tinggal di Martapura, *Onderkoopman* Pieter Pietersz bertemu dengan penguasa Kutai Pangeran Adipati Anom Panji Amodapa yang berada di Kutai. Pada saat itu pengetahuan tentang Kesultanan Kutai tidak banyak dimiliki oleh orang-orang Belanda, termasuk juga dengan Kerajaan Pasir dan yang lain di sepanjang pantai timur Kalimantan ini. Dalam perundingan itu mereka bersepakat membuat perjanjian pertama. Ada tiga pasal yang penting dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Kutai akan menolak semua pedagang asing, terutama Jawa, Makassar, dan yang lain untuk berdagang di sana, dan sebaliknya hanya mengizinkan pedagang VOC saja.
2. Kutai mengakui dirinya sebagai bagian dari atau berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banjarmasin di Martapura.
3. Hanya orang Belanda dan orang Banjar yang boleh berdagang secara bebas di Kutai.²⁷

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian di atas tidak ada kejelasan, karena kemudian VOC lebih banyak berhubungan dengan Kerajaan Banjar di Martapura dalam mengurus kepentingannya dengan Kutai. Ini dilakukan oleh perwakilan VOC di Martapura yang telah ditampung di sebuah loji. Namun demikian, hubungan antara VOC dan Kutai segera terjalin atas inisiatif Sultan Kutai sendiri yang mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal H. Brouwer lewat Pool dan berisi berikut ini.

*Dat UEd uwen kapitein laut (admiral) aan mij hebt gezonden is te zijner tijd wel en behoorlijk bij ons gearriveerd, dewelke zegt gelast te zijn ons met de Nederlanders, den koning van Bandjermassin en mij te vereenigen, dat mijns bedunkens, niet buiten de behoorlijke limiten geprocedeerd is; derhalve ben ik dat wel in te vreden, en ten anderen den Javanen en Macassaren hunne negotie in mijn land te verbieden; doch verzoeke ten regarde dat mijne plaats klein en niet veel vermogende is, UEds adsistentie, die mij in allen tegenspoed gelieve te verzekeren, zonder nalaten, opdat mij daarop moge verlaten.*²⁸

Kapten laut (laksamana) Anda yang dikirim kepada saya tiba dengan selamat pada kami yang berkata untuk menyatukan kami dengan orang Belanda, raja Banjarmasin dan saya, yang menurut pendapatku berlangsung di luar batas-batas yang pantas; selain itu saya merasa puas

27 L. C. D. van Dijk, *Neerland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchina* (Amsterdam: J. H. Scheltema, 1862), hlm. 32.

28 L. C. D. van Dijk, *ibid.*, hlm. 33.

dan di sisi lain melarang orang Jawa dan Makassar tinggal di wilayahku; namun dalam hal ini saya tidak lupa mohon bantuan Paduka karena negeriku kecil dan tidak memiliki banyak kemampuan, untuk menjamin saya terhadap semua kesulitan agar saya bisa meninggalkannya.

Dalam surat di atas tampak jelas bahwa Sultan bersedia menerima permintaan VOC, tetapi sebagai imbalannya ia minta bantuan dan perlindungan kepada VOC untuk menghadapi lawan-lawannya. Dari situ diketahui bahwa Kutai pada saat itu berada dalam konstelasi konflik politik atau kompetisi terhadap lingkungan di sekitarnya.

Ketika pada tahun 1638 terjadi konflik antara VOC dan orang-orang Banjar yang diikuti dengan pembunuhan semua orang Belanda dan pembakaran lojinya, praktis hubungan Batavia dan Kesultanan Banjar terputus dan dengan demikian secara resmi juga hubungan dengan Kutai. Selama hampir tiga puluh tahun tidak ada keterangan mengenai Kutai dalam arsip VOC, dan juga tidak ada orang yang berpikir untuk menyebutkannya dalam rapat pimpinan VOC di Batavia. Di samping pengetahuan mereka tentang kerajaan ini masih sedikit, juga ketenaran Kutai sebagai bandar dan lokasi strategis Selat Makassar tidak sebanding dengan Laut Jawa. Kecuali itu juga krisis yang melanda hubungan VOC dan Makassar segera mengalihkan perhatian mereka ke perairan Sulawesi Selatan.

Selama masa itu Kutai sendiri mengalami dinamika politik internalnya. Seperti halnya kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, konflik perbatasan dengan tetangganya juga melanda Kutai dan mengakibatkan permusuhan dengan Pasir yang berlangsung pada pertengahan abad XVII. Kondisi konflik ini segera ditemukan oleh seorang utusan VOC yang berlayar dari Makassar ke Sulu dan singgah di Kutai dan Berau pada tahun 1671, *Onderkoopman* Paulus de Bock.²⁹ Kunjungan Bock ini disambut dengan penuh kecurigaan sehingga upayanya untuk melakukan perdagangan di sana terhambat.

Apakah kecurigaan yang ditunjukkan oleh orang-orang Kutai terhadap Bock ini dipicu oleh kemungkinan keberpihakan VOC kepada lawan-lawan Kutai seperti Pasir, ataukah memang orang Kutai membenci VOC sebagai akibat pengaruh dari Banjar, tidak bisa dipastikan. Akan tetapi, pada prinsipnya dengan adanya kecurigaan tersebut bisa diasumsikan bahwa hubungan kontrak yang dibuat pada tahun 1635 tidak berjalan

²⁹ J. E. de Sturler, *Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met tractaten met Spanje, Engeland en Portugal* (Leiden: P. Sommerwil, 1881), hlm. 113.

dan bahkan dilupakan termasuk juga kesan mereka terhadap orang Belanda yang berkunjung ke Kutai pada masa itu.

Meskipun demikian Bock tidak putus asa. Setelah meninggalkan Kutai, ia menyinggahi Berau untuk tujuan yang sama sebelum berangkat ke Sulu. Setelah kembali dari Sulu, Bock mencoba kembali singgah di Kutai. Pada persinggahan kedua ini perubahan sambutan telah terjadi, terutama dari Sultan Kutai. Hal ini terbukti dari adanya pembicaraan dengan Bock, dan Sultan Kutai bersedia menulis surat untuk ditujukan kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia yang dibawa oleh Bock.

Meskipun tidak diketahui apa isi surat tersebut, dapat diduga ada kaitannya dengan hubungan perdagangan antara kedua pihak. Bock sendiri setelah meninggalkan Kutai dan dalam pelayaran kembali ke Jawa, singgah di Pasir. Di sana ia juga menjalin hubungan dengan Pasir dan membuka ikatan perdagangan. Hubungan dengan Pasir jelas lebih baik daripada dengan Kutai, karena terbukti bahwa tidak ada persoalan yang terjadi dan hal ini menimbulkan kecemburuan pihak Kutai. Ancaman Kutai terhadap hubungan VOC-Pasir ini kemudian menjadi agenda pembicaraan di Batavia karena berpotensi membahayakan perdagangan VOC di Selat Makassar.

Untuk itu pada tahun 1673 Kapten Frans van Heys dikirim ke Kutai dengan maksud untuk memberikan penjelasan tentang hubungan VOC-Pasir dan memperbaiki hubungan, khususnya hubungan perdagangan. Sultan Kutai tetap bertahan dalam pembicaraan dengan Heys bahwa mereka tidak akan mengubah sikapnya selama VOC tetap menjalin hubungan dagang dengan Pasir. Bahkan lebih lanjut lagi, Sultan menyatakan siap berperang apabila memang VOC tidak mau mengabdikan pendapatnya.

Bock kembali ke Batavia dan melaporkannya kepada para petinggi VOC di sana tentang kegagalan misinya memperbaiki hubungan dengan Kutai. Bahkan Bock yang kemungkinan juga emosi terhadap sikap Sultan, mengusulkan agar Batavia mengirimkan armada untuk menggempur Kutai dengan kekuatan kapal dalam ukuran tertentu seperti yang terjadi pada Gowa. Meskipun kepemimpinan VOC tidak mengabdikan permintaan Heys ini, dan mereka masih berupaya untuk meneruskan hubungan baik, dalam surat Gubernur Jenderal kepada Dewan XVII di Belanda tanggal 23 November 1675 disebutkan bahwa tidak ada kemajuan dalam hubungan dengan Kutai dan kondisi pantai

timur Kalimantan tetap rawan akibat permusuhan antara Kutai dan Pasir.

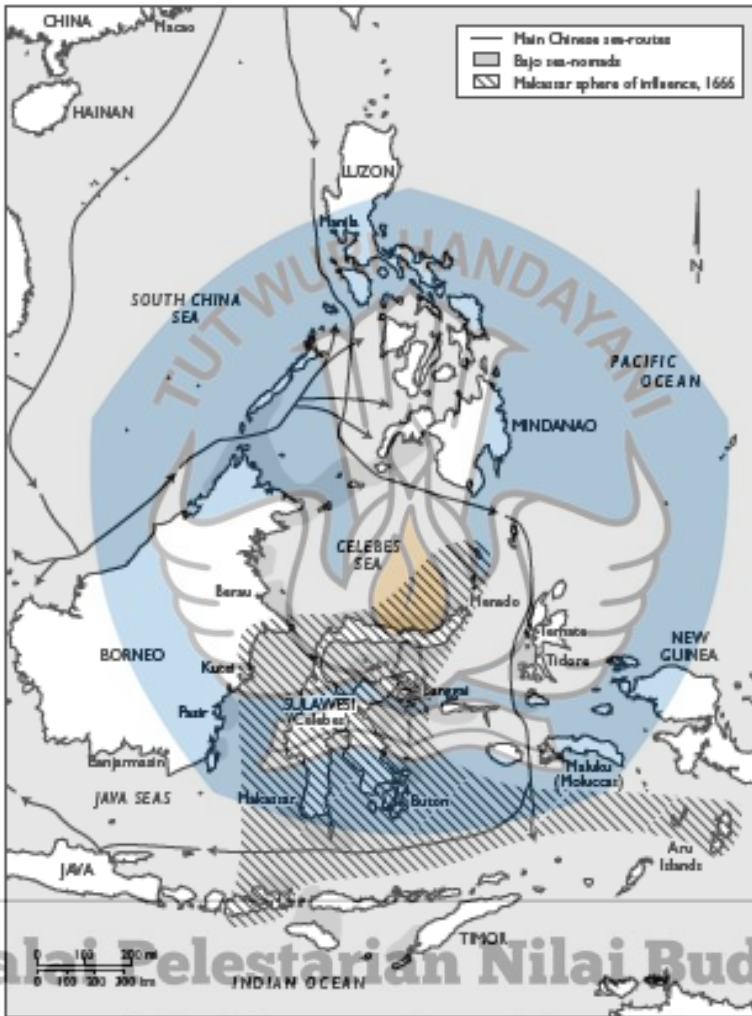
Bagi Kompeni, Pasir memiliki nilai yang strategis. Pada abad XVII orang-orang Belanda mendengar bahwa tempat ini menjadi produsen perahu yang berkualitas dan memiliki kekuatan berlayar samudra. Kekayaan alam yang terdiri atas hutan di pedalaman memungkinkan pasokan jenis-jenis kayu yang cocok bagi pembuatan perahu dan bangunan rumah. Oleh karenanya bagi VOC, hubungan perdagangan produk hutan termasuk kayu dianggap penting dan bernilai strategis. Bertolak dari situ, Batavia merasa perlu melakukan pendekatan kepada penguasa Pasir.

Hubungan baik dengan VOC membuatnya terkena pengaruh pada pembuatan Traktat Bongaya pada tahun 1667. Pasir yang dianggap sebagai sekutu VOC dihubungkan dengan para penguasa Bugis yang juga menjadi sekutu VOC di Bone. Dari hubungan itu perkawinan berlangsung antara penguasa Pasir dan putri Bugis sehingga pada tahun 1686 Raja Pasir diundang ke istana Bone untuk bertemu dengan Aru Palaka. Hubungan ini direstui oleh VOC sehingga sepuluh tahun kemudian *Opperkoopman* Willem Hartzink sebagai wakil VOC di Sulawesi Selatan memberikan akta pengukuhan kepada Raja Pasir.³⁰

Pada kesempatan itu Raja Pasir menyampaikan persoalan keluarganya yang berkaitan dengan bangsawan Bugis dari pihak istrinya, yaitu Daeng Matona atau Karaeng Bontorambang, putri Karaeng Karonrong yang menuntut takhta Kerajaan Pasir sejak tahun 1694. Agar persoalan ini tidak mengarah menjadi sengketa dan konflik terbuka, mereka sepakat menyerahkan keputusan akhirnya kepada VOC. Pada tahun 1688 Gubernur VOC di Makassar setelah mempertimbangkan semua kemungkinan dan manfaatnya, membuat keputusan yang disetujui oleh Batavia bahwa hak atas Kerajaan Pasir tetap dimiliki oleh penguasa Pasir saat itu dan keturunannya.³¹

30 Peristiwa ini membuka jalan bagi tumbuhnya pengaruh Bugis di Pasir khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Selain para pedagang Makassar dan Bugis yang semakin banyak datang di sana, hubungan kekerabatan elite sangat dominan. Ini terbukti bahwa pada awal abad XVIII penguasa Wajo yang bernama Aru Singkang dengan memanfaatkan kekuatan maritimnya sebagai pemimpin perompak bisa menduduki Kerajaan Pasir dan berkuasa sampai tahun 1760. Anonim, "Beknopte geschiedenis van het Makassarsche Celebes en Onderhoorigheden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1848, volume 10, jilid 1, hlm. 69.

31 Anonim, "Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, volume 16, jilid 2, tahun 1854, hlm. 229.



Sumber: Eric Tagliacozzo, 2011

Gambar 4.1 Lingkup pengaruh Makassar sebelum 1669

Selain di Pasir, pola serupa juga muncul di Berau pada pertengahan abad XVII. Orang-orang Bugis mengunjungi tempat itu dengan armada perahunya dan mulai membuat tempat itu ramai dan dinamis sehingga penguasa Berau kemudian memanggil mereka untuk tinggal permanen. Dalam interaksi yang berlangsung dalam hubungan mutualisme tersebut, ikatan perkawinan antara elite politik Berau dan orang-orang Bugis terjadi, antara lain penguasa perempuan Berau Aji Kurindan

Malaka yang memiliki darah Bugis dan menurunkan raja-raja yang menjadi penguasa Berau selanjutnya.³²

Akan tetapi, pengaruh Banjarmasin tetap paling dominan untuk wilayah pesisir timur Kalimantan ini. Dekatnya jarak dan intensitasnya hubungan serta adanya kekerabatan yang erat mengakibatkan Kesultanan Banjar dengan mudah mengontrol tindakan para penguasa di kerajaan-kerajaan pantai timur. Hubungan kerabat dan budaya antara keduanya membuat raja-raja di Pasir, Kutai dan Berau tidak bisa melepaskan orientasinya dari Banjar, meskipun hubungan mereka juga ditentukan oleh hubungan antara VOC dan Kesultanan Banjarmasin. Ini terjadi ketika di beberapa daerah ini mulai muncul kelompok-kelompok tertentu yang menunjukkan niatnya untuk melepaskan diri dari kontrol Banjar pada akhir tahun 1756. Berkat campur tangan VOC, pada tanggal 20 Oktober 1756 sebuah kontrak dibuat oleh utusan VOC *Opperkoopman* J.A. Pravicini dengan Sultan Banjar Tahmud yang memuat pelepasan hak Banjar atas kerajaan-kerajaan di pantai timur Kalimantan dan menyerahkan hak intervensinya kepada VOC.³³

Meskipun tidak memanfaatkan jalur pelayaran rempah utara seperti yang digunakan oleh Portugis dan Spanyol dan lebih mengutamakan pelayaran di Selat Makassar khususnya setelah tahun 1660, VOC tetap tidak meninggalkan begitu saja perairan di Kalimantan Utara. Pada dekade pertama keberadaannya, dengan fokus ingin menghancurkan kekuatan Portugis di Nusantara, VOC juga melihat nilai strategis jalur ini dan berhubungan dengan penguasa pribumi yang ada di sana.

Seorang pelaut dan pedagang Belanda Olivier van Noort adalah orang pertama yang menyusuri perairan ini dalam kunjungannya ke Manila pada bulan Oktober 1600 dari pelayarannya lewat Amerika Selatan. Ketika singgah ke Brunei dalam perjalanan pulang pada akhir Desember 1600, ia sempat bertemu Sultan Brunei Abdul Jalilul Akbar yang saat itu sedang bermusuhan dengan orang Spanyol. Menurut kesaksian van Noort, Brunei memiliki potensi bagi orang Belanda bila akan melakukan perdagangan produk lokal seperti lada dan produk hutan yang dibayar dengan kain dan benda-benda rumah tangga. Dari

32 I. van Nieuwkuijk, *Exploitatie van Nederlanders van de Noordoostkust der Borneo* dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1883, jilid 1, hlm. 123.

33 L. Van Woudrichem van Vliet, *Regtsvragen over nederzettingen van niet-Nederlanders in den Nederlandsch-Indischen archipel, tweede stuk* ('s-Gravenhage: Gebr. Belinfante, 1879), hlm. 143.

situ van Noort mengetahui bahwa Brunei berdagang dengan Patani dalam ekspor ladanya untuk disetorkan ke Malaka.³⁴

Informasi yang diterima oleh VOC setelah mereka menjalin hubungan dengan beberapa penguasa di Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir abad XVI setelah adanya perpaduan politik Spanyol-Portugis, kegiatan perkapalan orang-orang Portugis di Kalimantan Utara meningkat. Selain perkapalan dagang, juga ancaman terhadap eksistensi Brunei selama pemerintahan Sultan Muhamad Hasan muncul karena keterlibatan Brunei dalam penyerangan terhadap armada Spanyol dan Portugis sejak tahun 1570-an dalam persekutuan Brunei-Sulu.³⁵

Berdasarkan kenyataan itu VOC menganggap perlu agar segera juga memperoleh pijakan di pantai utara Kalimantan untuk mengimbangnya.³⁶ Kontak pertama dengan Brunei terjadi ketika VOC menempatkan agen dan lojinya di Patani. Sultan Brunei Abdul Jalil Akbar yang masih muda sebagai pengganti Sultan Hasan mengirimkan utusan ke sana dengan maksud meminta bantuan VOC menghadapi ancaman armada Spanyol. Namun, akibat fokus VOC di Maluku dan juga adanya perbedaan kepentingan di Sambas antara keduanya, hubungan itu sampai tahun 1609 belum ditindaklanjuti dan bahkan VOC memiliki perbedaan posisi dengan Brunei.³⁷

Pada tahun 1610-an utusan dikirim ke Brunei yang dianggap memiliki posisi strategis dan peranan penting di perairan itu. Hasil dari hubungan ini adalah pendirian sebuah loji VOC di sana. Meskipun loji itu tidak dimaksudkan untuk fungsi perdagangan, setidaknya keberadaannya akan membuktikan kehadiran VOC di situ dan mencegah masuknya Portugis di pelabuhan Brunei.³⁸

Kalimantan Barat

34 J. C. Mollema, *De Reis om de wereld van Olivier van Noort 1598-1601* (Amsterdam: P. N. van Kampen, 1937), hlm. 146.

35 Graham Saunders, *A History of Brunei* (Oxon: Routledge Curzon, 2002), tanpa halaman.

36 W.A. van Rees, "Een Bijdrage tot de Indische Krijgsgeschiedenis door Majoor A.J. A. Gerlach" dalam *De Gids*, tahun 1866, jilid 3, tahun ke-4, hlm. 42.

37 Kasus pembantaian orang-orang Belanda yang ditempatkan di loji Sambas pada bulan Januari 1611 oleh sekelompok orang yang diduga diperintah oleh Sultan Hasan dari Brunei mengakibatkan hubungan tegang antara kedua pihak terjadi. Marie-Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century* (Singapore: NUS, 2015), hlm. 62.

38 Hal ini terbukti pada surat Sultan Jalilul Akbar tahun 1614 kepada pimpinan VOC di Ambon yang mempertanyakan keberadaan dan fungsi loji tersebut mengingat tidak pernah ada kegiatan perdagangan yang penting di situ. L. C. D. van Dijk, *op.cit.* hlm. 210.

Menjelang penyerangan VOC terhadap Malaka, kesibukan armada VOC di perairan Kalimantan Utara ini muncul dan perhatian mereka kepada Brunei kembali tumbuh. Pada pertengahan 1634 sejumlah kapal perang dikirim dari Batavia ke perairan Kalimantan Utara yakni *De Zone*, *Klein Wezel*, dan *Amboina*. Diduga kapal-kapal ini dimaksudkan untuk mencegah perkapalan rempah Portugis dari Maluku dan kemudian diperintahkan untuk berbelok ke Makassar melalui Selat Makassar. Namun, mengingat selama beberapa bulan tidak ada kabar dan penantian di Makassar juga tidak berhasil, pada tanggal 16 September 1634 Laksamana Harman Gerritz diperintahkan untuk mencari ketiga kapal tersebut dan membawanya langsung ke Maluku.³⁹

Dalam pelayaran ini Gerritz memanfaatkannya untuk membuat peta perairan Kalimantan Utara dan Timur. Dengan menyusuri pantai Kalimantan Utara, ia tiba di Tanjung Datu. Dari Tanjung Datu, dia menyusuri perairannya dan melihat Pulau Tiga dengan Gunung Mount Pracer di sana, dan meneruskan pelayaran sampai pada posisi $7\frac{1}{2}^{\circ}$ Lintang Utara, di sebelah selatan Pulau Paragoa. Dari situ dia meneruskan pelayaran hingga mencapai posisi 2° Lintang Selatan dan menemukan serangkaian pulau yang telah dikunjungi oleh orang Spanyol, seperti Pulau San Miquel, St. Clara, dan St. Joanna.

Gerritz jelas menyinggahi Brunei dan menemui Sultan untuk memperbaharui hubungan dengan VOC. Hal ini terbukti empat tahun kemudian, pada tanggal 16 Mei 1638 dua orang utusan Sultan Brunei, yakni Mantri Amath dan Mura, menghadap ke Batavia. Keduanya membawa surat dari Sultan Abdul Jalilul Akbar dan Pangeran Adipati yang memuat permohonan bantuan Brunei kepada VOC untuk menghadapi ancaman armada Spanyol. Permohonan tersebut segera dikabulkan dan Gubernur Jenderal menjanjikan bahwa Batavia akan mengirimkan armada yang akan mengangkut persenjataan, personel, dan amunisi ke Brunei.⁴⁰

Setelah penguasaan Malaka oleh Belanda pada tahun 1641 dan diikuti dengan menurunnya potensi perkapalan perdagangan rempah secara drastis di perairan Kalimantan Utara, perekonomian di Brunei juga mengalami pukulan. Hubungan antara Portugis dan Brunei yang sebelum abad XVII dijalin lewat pasokan lada oleh Brunei masih

39 L. C. D. van Dijk, *ibid.*, hlm. 277.

40 L. van Woudrichem van Vliet, *op.cit.*, hlm. 223. Mungkin saja ancaman Spanyol yang dimaksudkan ini adalah respons dari penguasa Spanyol di Manila atas kehadiran dan kegiatan Laksamana Gerritz di perairan Kalimantan utara.

dilanjutkan selama beberapa tahun dalam pelayaran antara Brunei dan Macao yang dilakukan oleh para pedagang Cina. Namun, VOC selanjutnya menerapkan monopoli perdagangan semua jenis rempah, termasuk di perairan Kalimantan Utara, sehingga mengakibatkan perdagangan lada Brunei bergantung pada VOC, dan banyak pedagang Cina meninggalkan Brunei untuk beralih ke Batavia.⁴¹

Monopoli VOC atas semua perdagangan telah mengakhiri jalur pelayaran rempah di utara yang melewati Pulau Kalimantan. Sebaliknya, kebijakan itu memulai struktur baru bagi dinamika perkembangan sosial politik dan ekonomi, seiring dengan perubahan orientasi kebijakan Batavia dalam memerintah koloninya di Hindia Timur.

C. DINAMIKA BARU

Walaupun VOC bisa menegakkan dominasi maritimnya di perairan utama Nusantara, terutama setelah tahun 1667, bukan berarti kekuasaannya berlangsung efektif di segala penjuru. Bahkan di beberapa tempat yang sudah menjalin hubungan resmi dengannya, kekuasaan itu lebih banyak hanya berada di atas surat kesepakatan saja daripada diaplikasikan dalam realitas. Sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat dengan para penguasa pribumi terjadi tanpa bisa ditindak tegas oleh penguasa di Batavia atau bahkan penguasa di Batavia tidak mengetahui atau tidak peduli. Hal ini akan tampak dalam kemunculan dua fenomena baru yang mewarnai perubahan struktur dari era Portugis ke era VOC.

— Fenomena pertama adalah adanya migrasi dalam ukuran yang semakin besar dari beberapa etnis dalam lingkup regional. Beberapa etnis yang berkaitan erat dengan kehidupan maritim meningkatkan eskalasi migrasinya pada abad XVII saat VOC berusaha menegakkan hegemoni ekonominya, seperti suku Bajo, suku Bugis, dan suku Makassar. Beberapa dari migrasi ini dipicu langsung oleh peristiwa politik di tempat asalnya seperti Perang Makassar yang diakhiri dengan Perjanjian Bongaya, tetapi banyak juga yang dimotivasi oleh alasan ekonomi dan sosial seperti mencari lahan penghidupan yang lebih prospektif daripada di kampung halamannya. Dampak proses migrasi ini bukan hanya berpengaruh pada pola pelayaran, melainkan juga pada munculnya lokasi pemukiman baru yang tersebar di sepanjang pantai dan dihuni oleh kelompok-kelompok ini. Pemukiman mereka yang

41 Steven Runciman, *White Rajahs: A History of Sarawak from 1841 to 1846* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 24.

tersebar di sepanjang pantai timur Kalimantan membentuk suatu rantai yang saling terjalin dan disebut diaspora. Kehadiran mereka tidak hanya menciptakan perubahan ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur politik yang ada melalui infiltrasi mereka dalam konstelasi politik lokal.

Fenomena kedua adalah meningkatnya eskalasi perompakan di perairan Kalimantan. Merosotnya dinamika pelayaran rempah di jalur utara justru menaikkan aktivitas perompakan baik kuantitas maupun kualitas. Jika pada mulanya perompakan hanya terbatas pada pencegahan dan pengejaran kapal-kapal dagang yang menjadi sasaran, memasuki abad XVII perompakan meningkat dan meluas ke selat-selat, teluk-teluk, dan bahkan ke aliran sungai. Oleh karenanya, potensi mereka segera meluas dari perairan Laut Cina Selatan masuk ke Selat Kalimantan.

Dua hal ikut memicu peningkatan perompakan ini. Yang pertama berkaitan dengan faktor migrasi yang disebutkan di atas. Jika pada abad XV–XVI perompakan didominasi oleh etnis dari Filipina Selatan, pada abad XVII etnis Sulawesi Selatan, yaitu Bugis dan Makassar, mulai tampil dalam perairan dengan armada perompak mereka sendiri. Sasaran mereka tetap sama yakni kapal-kapal dagang yang menyusuri pantai sepanjang jalur permukiman mereka. Oleh karenanya, diaspora yang disebutkan di atas tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi saja, tetapi juga menjadi sentra dan sarang perompak yang kuat dengan daerah operasionalnya masing-masing.

Kedua, adanya kesepakatan resmi antara Kesultanan Brunei dan Sulu pada awal abad XVII. Meskipun kesepakatan itu lebih banyak terbatas pada kegiatan perdagangan maritim antara dua negara laut ini, karena sifat perdagangan dan pelayarannya, kerja sama mereka memengaruhi keberadaan para perompak, terutama para perompak dari Filipina Selatan, seperti Bajau dan Mindanao, yang merupakan kawula Sultan Sulu. Dengan adanya dukungan dua kesultanan yang kuat di perairan Kalimantan Utara ini, potensi perompakan menjadi semakin gencar dan hal ini harus dihadapi oleh VOC dengan kehadirannya di sana.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kajian data, kunjungan orang Bugis dari Sulawesi Selatan ke pantai timur Borneo ini telah terjadi pada awal abad XVII, khususnya ketika lawan mereka, Kesultanan Gowa melakukan proses islamisasi ke wilayahnya. Daerah-daerah Bone pada awalnya menolak untuk menerima agama Islam karena menduga bahwa hal itu berarti penegakan dominasi Gowa. Sebagai akibatnya,

penyerangan Gowa atas daerah mereka terjadi.⁴² Sebagian dari orang Bugis yang menyerah segera ditangkap dan dibawa ke Gowa, sementara yang lain lolos dan melarikan diri ke luar Sulawesi Selatan. Antara lain dari mereka yang melarikan diri ini menuju pesisir timur Pulau Kalimantan.

Akan tetapi, gelombang pertama yang datang telah terjadi sebelumnya, yaitu beberapa perahu yang melakukan pelayaran pantai diduga pada akhir abad XVI. Mereka dilaporkan sering muncul di ibu kota Kutai Lama, yang berada di muara Sungai Mahakam dekat dengan Gunung Jahitan Layar. Sebagai bandar di muara sungai, tempat ini menarik para pelaut dan pedagang untuk singgah dan beraktivitas di sana. Selama masa itu orang-orang Bugis yang datang tidak menetap, tetapi hanya tinggal sementara dan kemudian berlayar kembali setelah urusan perdagangannya selesai ke tempat asalnya. Oleh karena itu, perkampungan yang mereka dirikan di Jahitan Layar juga masih terbatas pada beberapa rumah yang berfungsi sebagai rumah singgah orang-orang Bugis ini.⁴³

Namun, seiring dengan berjalannya waktu jumlah pendatang Bugis, yang kebanyakan berasal dari Bone dan Wajo, bertambah banyak. Lokasi yang ada semakin padat dan tidak mungkin lagi menampung mereka. Oleh karenanya, menurut *Salasila Bugis* yang terbit di Kutai, Raja Kutai dan para mantrinya mengumpulkan orang Bugis ini di istananya dan menyerahkan kepada mereka dua hal: agar mereka membentuk suatu kesatuan sosial di bawah pimpinan yang mereka pilih sendiri dan mencari lokasi lain yang lebih sesuai bagi perluasan perkampungannya. Menghadapi dua pilihan ini, orang-orang Bugis setuju dan mereka kemudian mengangkat seorang pemimpinnya yang bernama Pua Adu.⁴⁴ Sementara itu, setelah melakukan penelitian, mereka menemukan lokasi yang cocok di pantai Samarinda. Atas perkenan Raja Kutai, orang-orang Bugis ini memperoleh lahan di sana dan membangun pemukiman sebagai pusat diaspora Bugis pertama di pantai timur Kalimantan.

42 Andi Muhamad Akhmar, *Islamisasi Bugis: Karya Sastra atas La Galigo versi Bottinna I La Dewata Sibawa I We Attaweq* (Jakarta: Penerbit Obor, 2018), hlm. 489. Menurut J. Noorduyn yang meneliti hal ini, berdasarkan surat dari Denis tanggal 12 Juli 1612, ia menyaksikan bahwa Bone sudah diislamkan oleh Gowa pada tahun 1611. J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar* (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm. 23.

43 S. W. Tromp, "Mededeelingen omtrent Buginezen in Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1887, vol. 36, hlm. 168.

44 J. G. A. Gallois, "Een korte aantekening gemaakt in een reis langs het Oostkust van Borneo in de bevel van de Nederlandsch Gouvernement" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, tahun 1856, hlm. 225. *Puang Adu* adalah jabatan atau gelar sebagai pimpinan daerah. Jadi *Puang Adu* bukan nama.

Hubungan dengan penguasa Kutai digambarkan dalam *Salasila* itu menjadi sangat dekat. Orang-orang Bugis tersebut menyatakan kepatuhannya kepada dinasti yang memerintah di Kutai dan akan selalu menaati perintahnya sebagai balasan atas pemberian tanah bagi tempat tinggal mereka. Sebaliknya, penguasa Kutai menganggap keberadaan orang Bugis ini sebagai bagian dari kekuatan integral kerajaannya dan menganggap pimpinan orang Bugis di perkampungan itu setara dengan pejabat atau bangsawan Kerajaan Kutai. Penguasa Kutai juga menghormati adat istiadat Bugis yang diterapkan di permukiman mereka, termasuk otonomi mereka untuk memilih dan mengangkat sendiri pemimpin mereka, yang di Samarinda disebut *kapala manang*. *Kapala manang* bukan hanya menjadi pemimpin orang Bugis dan pengawas pelaksanaan adat termasuk pengadilannya, melainkan juga mewakili suara komunitas Bugis dalam istana Kutai yang kemudian berada di Tenggarong pada abad XVII.

Dalam perkembangan lebih lanjut, jumlah komunitas Bugis ini menjadi semakin banyak di Samarinda akibat peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kehadiran orang-orang Wajo dan Bone ini segera diikuti lima puluh tahun kemudian oleh orang Makassar, terutama yang tidak setuju dengan penegakan Perjanjian Bongaya tahun 1667. Mereka kemudian meninggalkan kampung halamannya dan juga mencari tempat permukiman di sepanjang pantai timur Kalimantan yang segera menjadi diaspora seperti Samarinda.

Maraknya pelayaran dan perdagangan yang berlangsung di Selat Kalimantan pada pertengahan abad XVII ini menjadikan posisi kaum pendatang Sulawesi Selatan tersebut semakin kuat. Samarinda terus tumbuh menjadi kota Bugis yang semakin besar dan menjadi sentra perdagangan. Hubungan mereka dengan kaum perompak yang dihubungkan oleh perdagangan budak menjadikan Samarinda sebagai bandar teramai di pantai timur Kalimantan. Keramaiannya mengalahkan pusat Kesultanan Kutai sendiri di Tenggarong, dan menimbulkan kecemburuan elite penguasa Kutai. Terutama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Suleiman yang mencurigai bahwa keberadaan komunitas Bugis dan pimpinannya semakin bebas dan merdeka dari kontrol Kesultanan Kutai.⁴⁵

45 J. Zwager, "Koetai in Oost Borneo in 1853" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1866, vol. 2, hlm. 234.

Kesaksian John Dalton yang berkunjung ke sana membuktikan hal tersebut:

De Arabieren en Boeginezen hebben grooten invloed in het rijk. Door hun rijkdom, wapenen, eensgezindheid en meerdere kennis, zijn zij meester van de voortbrengselen van het land en weten zij den sulthan naar hunnen wil te buigen. Zij zijn in het bezit van Samarindah, een plaats die het naast aan de monding der rivier Koeti is gelegen, van waar de sulthan hen niet kan doen verhuizen.⁴⁶

Orang-orang Arab dan Bugis memiliki pengaruh yang besar pada kerajaan ini. Melalui kekayaan, senjata, kesamaan pandangan, dan lebih banyak pengetahuan, mereka menguasai hasil-hasil tanah itu dan mereka tahu sultan akan tunduk pada keinginannya. Mereka memiliki Samarinda, sebuah tempat yang terletak di samping muara Sungai Kutai, yang tidak bisa disuruh pergi oleh Sultan.

Selain di Samarinda, mereka segera memperluas permukiman mereka dan membentuk jaringan diaspora. Di lokasi tempat pusat aktivitas ekonomi dan politik berlangsung, di tempat itu orang Bugis juga membuka permukiman. Oleh karenanya, Pasir dan Berau segera melihat tumbuhnya pemukiman orang-orang pendatang dari Sulawesi Selatan ini. Hubungan dengan Pasir juga dekat, bahkan hingga masuk ke kalangan elite. Bahkan, pada awal abad XVII salah seorang keturunan Bugis Wajo menduduki takhta di Kerajaan Pasir.

Salah satu tradisi yang diterapkan di kalangan komunitas Bugis di Kalimantan Timur dan berkaitan erat dengan perbudakan adalah budak utang (*pandeling*). Orang bisa menjadi budak karena tidak bisa membayar utangnya, dan utang itu akan terus diturunkan kepada keturunannya. Akibatnya, anak akan menanggung utang ayahnya dan tetap berstatus budak utang. Dia akan terbebas dari statusnya apabila mampu melunasi utangnya, yakni dengan cara mengumpulkan upah saat dia bekerja. Dalam aturan yang ketat, ia wajib bekerja pada krediturnya sampai utangnya lunas yang biasanya sulit dilakukan karena beban bunga yang berat dan upah yang kecil. Sementara itu dalam aturan longgar, ketika dia bekerja kepada orang lain tetapi dengan risiko harus siap dipanggil oleh krediturnya saat dibutuhkan, utangnya akan cepat lunas dan dia akan terbebas. Karena status ini, siapa yang bisa menebus utangnya akan menjadi majikannya yang baru sampai utangnya lunas juga.⁴⁷

⁴⁶ Anonim, "John Dalton en zijne berigten over Koeti en den majoor Muller" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1856, jilid 2, hlm. 277.

⁴⁷ H. von de Wall, "Vervolg extract van Dagelijke Aanteekening der Civiel Gezaghebber voor Koetei en Oostkust van Borneo" dalam *De Indisch Archief*, tahun 1850, jilid III, hlm. 453.

Selain suku-suku dari Sulawesi Selatan, etnis Banjar di pantai selatan Sulawesi juga menjadi unsur pendatang yang menghuni pesisir timur Kalimantan pada masa ini. Melalui hubungan subordinasi dan hubungan historis kerajaan-kerajaan pantai timur dengan Banjarmasin selama abad XVI–XVII, peluang kedatangan dan tinggalnya orang-orang Banjar di sana sangat besar.⁴⁸ Seperti halnya orang Bugis, mereka juga memiliki permukiman khusus dan menguasai fungsi ekonomi perdagangan. Perbedaannya adalah bahwa orang Banjar menjadi penghubung (*middleman*) antara penduduk pribumi di pedalaman (suku Dayak) dan perdagangan ekspor. Melalui penguasaan jalur komunikasi sungai di pedalaman Kalimantan yang mengalir dari sumber airnya, orang-orang Banjar menjadi penampung produk hutan dari pedalaman Kalimantan dan menjadi agen untuk pasar di pesisir Kalimantan Timur.⁴⁹

Di samping suku-suku dari Nusantara sendiri, pada abad XVII kawasan Kalimantan Timur dan Utara menampung kedatangan kaum pendatang dari luar Nusantara yakni suku Bajau atau yang terkenal sebagai Bajau Laut. Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul etnis ini, tetapi mereka yang menyebar ke wilayah Kalimantan diketahui adalah etnis Bajau yang berasal dari Pulau Samar di Filipina Selatan. Oleh karenanya, mereka sering disebut sebagai suku Samar atau suku Bajau Laut, karena kehidupan mereka tidak bisa terpisah dari laut.⁵⁰

Seiring dengan meluasnya pengaruh Kesultanan Sulu dan diikuti dengan perjanjian antara kesultanan ini dan Kesultanan Brunei, etnis Bajau Laut yang menjadi kawula Kesultanan Sulu menyebar ke wilayah kekuasaan Sultan Brunei, yaitu di sepanjang pesisir Kalimantan Utara, termasuk daerah Sabah dan Serawak. Posisi mereka yang segera menguat menyebar ke perairan di sekitarnya dengan memasuki pantai timur Kalimantan. Kehidupan mereka bukan berdagang seperti etnis lain, melainkan hanya mengumpulkan produk laut untuk konsumsi sendiri dan jarang dijual kepada pihak lain, melainkan ditimbun dan kemudian

48 Bukti hubungan erat antara Banjar dan pantai timur Sumatra secara historis tampak dalam beberapa sebutan tentang daerah-daerah Kalimantan Timur dalam *Hikayat Banjar*. Selain itu juga antara *Hikayat Banjar* dan *Salasila Kutai* menunjukkan banyak kesamaan. Ini menimbulkan asumsi bahwa di antara pujangga mereka terdapat hubungan yang terjadi dalam konteks ikatan antarelite kerajaan masa itu. J. J. Ras, *Hikajat Bandjar* (Leiden: Brill, 1968), hlm. 98

49 H. E. Delken, "Schets eener geneeskundige plaatsbeschrijving van district Margasari (Zuid en Ooster Afdeeling Borneo), dalam *Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1864, hlm. 94.

50 Natasha Stacey, Dirk J. Steenbergen, Julian Clifton and Greg Acciaollu, "Understanding Sosial Wellbeing and Values of Small-scale Fisheries amongst the Sama Bajau of Archipelagic Southeast Asia" dalam Derek S. Johnson, Tim G. Acott, Natasha Ellen Tanya Stacey, dan Julie Urquhart (eds.) *Social Wellbeing and the Values of Small-scale Fisheries* (Cham: Springer Nature, 2018), hlm. 99.

dibawa kembali ke pulau-pulau mereka. Di sana mereka baru menjual produk hasil tangkapan tersebut. Setidaknya, demikian pola hidup suku Bajau pada saat awal kedatangan mereka di Kalimantan.⁵¹

Beberapa kelompok etnis pendatang ini selanjutnya menjadi pemain penting dalam dinamika yang terjadi pada lingkup struktur baru abad XVII di pola pelayaran Kalimantan. Di samping itu juga mereka memiliki keterkaitan erat dengan fenomena kedua yang akan mewarnai dinamika perkapalan dan perdagangan VOC di wilayah sekitar Kalimantan, terutama di pantai timur dan utara, yaitu perompakan. Pergantian rezim maritim dari Portugis ke Belanda, yang ditandai dengan kemunduran Portugis dan kekosongan Belanda, dimanfaatkan oleh kekuatan perompak dan pendukungnya untuk tampil di wilayah perairan itu.

Brunei pada masa Sultan Muhamad Hassan menjalin persekutuan dengan Sulu pada awal abad XVII. Dengan persekutuan ini, kedua kesultanan ini praktis mengontrol perairan yang ada di Kalimantan Utara, Filipina Selatan, dan Sulawesi Utara dengan Pulau Semporna di Sabah yang dianggap sebagai rendezvous.⁵² Mengingat banyak kelompok perompak yang berada di bawah kekuasaan langsung Kesultanan Sulu, kegiatan perompakan pada era itu tidak bisa dibedakan apakah ini dilakukan oleh kekuatan armada perompak liar atau disponsori oleh kerajaan. Hal ini terus berlangsung ketika Kesultanan Sulu berada di bawah pemerintahan Sultan Muhyidin yang naik takhta pada tahun 1673.⁵³

Keterkaitan antara perompakan dan perdagangan budak sebagai komoditas terpenting yang memasok devisa bagi Kesultanan Sulu menjadikan perompakan di perairan ini sangat marak terjadi. Tidak adanya kekuatan yang menandingi atau mengontrol wilayahnya, menjadikan Kesultanan Sulu sebagai pelaku satu-satunya yang bertanggung jawab atas maraknya perompakan. Meskipun sasaran utamanya adalah penguasa Spanyol yang berkedudukan di Luzon

51 Mungkin saja pola itu dipertahankan atas perintah Sultan Sulu yang memberi izin kepada mereka untuk migrasi tetapi harus menyetorkan kembali produk yang mereka peroleh sebagai upeti. Dengan menjalankan pola demikian, mereka tetap berhak disebut sebagai kawula Kesultanan Sulu dan mendapatkan perlindungan darinya. Anonim, "Bijdrage tot de kennis van den Soeloesen Archipel" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1850, jilid 2, hlm. 63.

52 Carolin Liss, "Contemporary Maritime Piracy in Waters of Semporna, Sabah" dalam John Kleinen and Manon Ossewijer, *Pirates, Ports and Coasts in Asia* (Singapore: ISEAS, 2010), hlm. 237.

53 Peter Borschberg, "Batu Sawar Johor: A Regional Centre of Trade in the Early Seventeenth Century" dalam Ooi Keat Gin and Hoang Anh Tuan, *Early Modern of Southeast Asia 1350-1800* (New York: Routledge, 2016) tanpa halaman.

pada abad XVII⁵⁴, pada kenyataannya perompakan yang dilakukan oleh mereka juga meluas hingga perkapalan Belanda di wilayah Maluku Utara dan kemudian Kalimantan Timur.

Kerugian yang dialami oleh VOC akibat kegiatan perompakan oleh orang-orang Sulu dari Mangindanao ini terutama dirasakan di perairan Ternate Utara. Gubernur Ternate mengeluh terjadinya defisit pangan beras akibat pencegahan oleh para perompak tersebut, dan ia juga menerima surat dari Sultan Bayan yang mengeluhkan bahwa banyak pedaganginya menjadi korban perompakan itu. Untuk itu Sultan Bayan Shahabudin meminta kerja sama VOC dalam penumpasan para perompak tersebut.⁵⁵

Selain Ternate, perairan Manado di Sulawesi Utara juga menjadi lahan operasi para perompak dari Mangindanao ini. Keberanian para perompak ini begitu luar biasa sehingga untuk mendapatkan budak, mereka bukan hanya menyerang kapal-kapal dan menangkap awak atau penumpangnya untuk diangkut sebagai budak, melainkan juga menyerang kampung-kampung pantai. Penduduk kampung yang tidak dibunuh dan tidak sempat meloloskan diri akan ditangkap dan diangkut menjadi budak (*toen de kustplaatsen alhier vaak geteisterd warden door de zeeroovers van Mangindanao en elder*).⁵⁶

Dalam beberapa saat saja operasi perompakan meluas dari perairan Laut Cina Selatan memasuki Selat Makassar, terutama di sekitar Pulau Laut di ujung timur laut Kalimantan dan Kepulauan Kangean. Melalui Teluk Gorontalo kedua sarang perompak yang kebanyakan terdiri atas orang Sulu ini berhubungan dengan kampung halaman mereka di Filipina Selatan. Sementara itu dari Teluk Gorontalo mereka menyusuri pantai utara Sulawesi dan lewat Kema memasuki perairan Teluk Tomini dan Mouton di Sulawesi Tengah.⁵⁷

Sementara itu, para perompak Bugis juga mulai menunjukkan aksinya dan mereka berbagi dengan perompak Sulu yang berada di bagian utara,

54 James Francis Warren, *The Sulu Zone 1768–1898: The Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State* (Singapore: NUS Press, 2007), hlm. xxi.

55 Y.H. Teddy Sim (ed.), *Piracy and Surreptitious Activities in the Malay Archipelago and Adjacent Seas 1600–1840* (Singapore: Springer, 2014), hlm. 6.

56 “Minahasa-Menado” dalam *Maandbericht van het Nederlandsch Zendinggenootschap*, tahun 1885, nomor 5, hlm. 73.

57 “De zeeroof in den Indischen Archipel” dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1876, jilid 2, hlm. 356.

sementara perompak Bugis menguasai bagian selatan Selat Makassar.⁵⁸ Jalur operasi mereka terbentang dari Kepulauan Kangean hingga timur laut Madura, dengan Pulau Bawal sebagai pusat pertemuan armadanya. Salah satu armada ini (semuanya tiga armada) memiliki daerah operasi di sepanjang pantai timur Kalimantan, mulai dari ujung tenggara Kalimantan ke utara.

Tampaknya, armada perompak Bugis ini memiliki hubungan dengan diaspora yang dibangun di sepanjang pantai timur Kalimantan. Selain hubungan kekerabatan, juga hubungan transaksi seperti budak, produk hutan, produk ekspor, dan sejumlah komoditas bahan pangan dijalin dari situ. Sering terjadi bahwa kapal atau perahu armada perompak ini tinggal selama beberapa hari di perkampungan Bugis dan Makassar di Samarinda dan Kutai.⁵⁹

Bagi VOC, mereka menganggap bahwa kegiatan perompakan itu sebagai suatu bentuk kejahatan karena melanggar hukum pelayaran Barat. Beberapa pejabatnya menyadari bahwa kegiatan perompakan Bugis di sini memiliki pola yang sama dengan di bagian lain Nusantara, yaitu mereka bekerja sama dengan dua pihak: diaspora etnisnya dan elite penguasa lokal yang bukan Bugis tetapi memanfaatkan keuntungan dari kegiatan perompakan Bugis tersebut.⁶⁰

Dari hasil penyelidikan mereka bisa diketahui bahwa ada hubungan erat antara perdagangan budak dan aktivitas perompakan ini. Oleh karenanya, untuk bisa menghancurkan kekuatan perompak, perdagangan budak harus dihapuskan sama sekali sehingga mereka akan kehilangan sumber penghasilan.⁶¹ Namun demikian, hal ini sulit untuk dilakukan karena pihak VOC sendiri secara langsung dan tidak langsung juga terlibat dalam perdagangan budak. Beberapa kebun yang dimiliki oleh

58 Kadang-kadang ada hubungan kerja sama dan saling membantu di antara mereka. Misalnya, para perompak di Pulau Laut yang merupakan orang Sulu bekerja sama dengan Haji Jawa di Kalimantan, serta dengan orang-orang Bajo lokal. Adrian B. Lopian, "Violence and Armed Robbery in Indonesian Seas" dalam John Kleinen dan Manon Osseweijer (eds.), *Pirates, Ports and Coasts in Asia* (Singapore: ISEAS, 2010), hlm. 135.

59 Orang Bugis yang tinggal di diaspora itu umumnya menyediakan produk hutan yang mereka peroleh dari orang Dayak, seperti lilin, madu, sarang burung, rotan, getah, dan tanduk rusa yang sangat laku bagi para pedagang Timur khususnya dari Cina. Oleh para perompak kemudian barang-barang ini dibawa ke Makassar atau ke Malaka untuk dijual kepada pedagang Cina di sana. Dalam hal ini koordinasi antara kelompok perompak di Pulau Bawal menjadi sangat strategis, karena kelompok kedua perompak Bugis di Bawal memiliki daerah operasi di perairan Kepulauan Riau. Anonim, "Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1838, jilid 2, hlm. 25.

60 Shawna R. Herzog, *Negotiating Abolition: The Antislavery Project in the British Straits Settlements, 1786–1843* (New York: Bloomsbury Academic, 2021), hlm. 114.

61 Anonim, "Het Eiland Flores" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, tahun 1855, jilid 2, hlm. 159.

para pejabat VOC di Maluku (*parkeniers*) juga dikerjakan oleh tenaga budak yang mereka pelihara. Oleh karenanya, dalam hal ini sampai akhir keberadaannya, VOC menghadapi dilema untuk mengatasi persoalan di lautan tersebut.

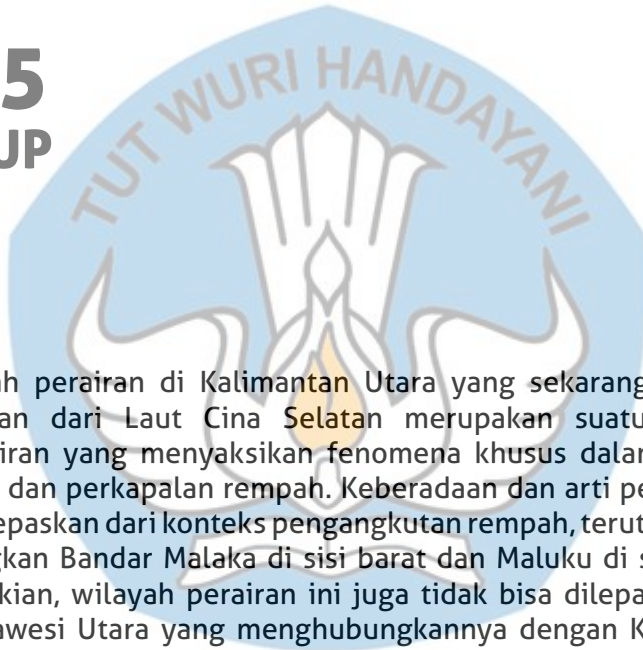
Sebaliknya, bagi para perompak sasaran perompakan mereka yang ditujukan terhadap kapal Eropa bukan hanya memiliki motif ekonomi yaitu banyaknya penumpang dan angkutan, melainkan juga motif politik. Mereka menganggap kehadiran kapal-kapal Barat ini sebagai bentuk monopoli dan hegemoni yang mematikan perekonomian mereka, dan menganggap sebagai kehadiran orang kafir yang harus diperangi.⁶²



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

62 P. J. Veth, "De zeerooverij in den Indischen Archipel", dalam *Tijdschrift voor Ned. India*, tahun 1870, jilid 1, hlm. 175-176.

BAB 5 PENUTUP



Wilayah perairan di Kalimantan Utara yang sekarang menjadi bagian dari Laut Cina Selatan merupakan suatu wahana perairan yang menyaksikan fenomena khusus dalam sejarah perdagangan dan perkapalan rempah. Keberadaan dan arti pentingnya tidak bisa dilepaskan dari konteks pengangkutan rempah, terutama yang menghubungkan Bandar Malaka di sisi barat dan Maluku di sisi timur. Namun demikian, wilayah perairan ini juga tidak bisa dilepaskan dari perairan Sulawesi Utara yang menghubungkannya dengan Kepulauan Maluku dan Filipina Selatan.

— Ditinjau dari jarak yang ditempuh, dibandingkan dengan jalur selatan yang melewati Laut Jawa, jalur perkapalan yang melewati perairan Kalimantan Utara jauh lebih pendek. Akan tetapi, volume perkapalan yang melewatinya tidak sebanyak perkapalan di perairan Laut Jawa yang memerlukan waktu tempuh lebih lama, dan sebagai akibatnya juga potensi dinamika perekonomian dan perdagangan regional tidak menunjukkan eskalasi setinggi di Laut Jawa. Hal ini terbukti dengan jumlah pelabuhan laut di perairan utara yang jauh lebih sedikit daripada di perairan Laut Jawa.

Para pelaku perkapalan yang memanfaatkan jalur ini tidak menunjukkan sifat heterogen seperti yang terjadi di perairan Laut Jawa. Umumnya, penduduk lokal yang daerah asalnya berada di pinggir perairan dan berhubungan langsung dengan dinamika di perairan tersebut yang menjadi pemegang peran sehingga menghidupkan kegiatan maritim

di sana. Akan tetapi, yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah bahwa mereka tidak hanya didominasi oleh kalangan pedagang atau kelompok yang berkepentingan langsung dengan perdagangan seperti yang terjadi di Laut Jawa. Mereka yang memanfaatkan perairan ini meskipun berkaitan dengan perdagangan dan pengapalan rempah juga memiliki peran sebagai perompak, yang tidak berkontribusi langsung bagi eskalasi kuota komoditas dagang, seperti kelompok pelaut dari Kepulauan Filipina Selatan.

Beberapa penguasa pantai, seperti Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu, yang langsung berada di tepi perairan ini atau kerajaan-kerajaan di pantai timur Kalimantan yang memiliki akses langsung ke jalur perkapalan tersebut lebih menunjukkan sikap pasif daripada aktif untuk meramaikan perdagangan seperti halnya para pelaut Makassar, Banjar, dan Jawa di Laut Jawa. Sebagai akibatnya, para pelaut dari kawasan Kalimantan Utara dan Timur ini tidak dikenal di bagian lain Kepulauan Indonesia, termasuk juga para perompak Sulu yang terbatas pada daerah operasinya di perairan Kalimantan dan Sulawesi bagian utara, dibandingkan dengan para perompak Bugis yang mampu menyebar ke segala penjuru Nusantara.

Seperti yang disebutkan di atas, ketergantungan mereka pada jalur perkapalan antara Malaka dan Maluku menjadi faktor penentu pola pelayaran yang ada di sana. Ketika kedua lokasi ini berada dalam hubungan yang stabil, pelayaran dan perkapalan akan berlangsung harmonis. Akan tetapi, mengingat hubungan antara kedua tempat ini tidak dimonopoli oleh dua pelabuhan tersebut, tetapi menjadi bagian dari pola perdagangan rempah yang diikuti oleh banyak pelabuhan lain di jalur rempah selatan, pelayaran di utara hanya menjadi alternatif bagi pelayaran di selatan. Prioritas bagi para pelaku perdagangan dan pelayaran tetap mengambil jalur di selatan, mengingat kepentingan terbesar dinamika mereka berada di Laut Jawa.

Alternatif mengambil jalur utara melalui perairan Kalimantan ini baru muncul ketika jalur selatan dianggap tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini terjadi sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 mengingat mereka menanggung risiko besar melalui jalur pelayaran di selatan. Akan tetapi, ini juga tidak berlangsung lama, setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah hubungan antara Portugis dan para penguasa pelabuhan di Laut Jawa tidak selalu diwarnai dengan polarisasi, tetapi kadang juga berubah menjadi mutualisme

seperti misalnya dengan penguasa Gowa di Makassar yang tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap Portugis. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang-orang Portugis untuk melewati jalur selatan yang dianggap lebih berpotensi memberikan keuntungan.

Faktor kedua adalah kemunculan perompakan laut yang marak sejak pertengahan abad XVI dan kehadiran orang Spanyol yang meskipun pada akhir abad XVI menunjukkan sikap kooperatif dengan Portugis, sepanjang keberadaannya di Malaka hubungan mereka diwarnai dengan konflik seperti yang terjadi di Maluku. Sebagai akibat dari ancaman ini, kerawanan menggunakan perairan di utara justru dianggap lebih besar daripada di selatan, yang bisa menunjukkan sifat fluktuatif.

Di perairan Laut Jawa sebagai jalur selatan, situasi dinamis terus berlangsung sampai awal abad XVII. Meskipun kehadiran Portugis di Malaka sejak 1511 memicu adanya konflik yang diwarnai dengan agama, kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan. Konflik agama yang berusaha dikobarkan, baik oleh orang Portugis dengan semangat Perang Salib maupun oleh kekuatan penguasa Islam lokal yang semangat perang jihad, tidak mampu mendominasi hubungan perdagangan antara Maluku dan Malaka untuk jangka waktu lama. Konflik di Malaka pasca-penguasaan Portugis hanya terbatas pada lingkup lokal, sementara praktis selain serangan Demak tahun 1513, tidak ada lagi permusuhan yang terjadi terhadap orang Portugis dan Laut Jawa tetap menjadi medan "arena" perdagangan yang kondusif. Juga kerajaan-kerajaan lain yang penting, seperti Banjarmasin, Palembang, Banten, dan Makassar tetap saja menjalani fungsinya seperti sebelum tahun 1511.

Struktur ini baru berubah sepenuhnya pada awal abad XVII yang diwarnai oleh dua konflik kompetitif besar yang dipicu oleh kehadiran orang Belanda dengan kongsi dagangnya, VOC, sejak 1602. Penaklukan Makassar dan Banten pada pertengahan pertama abad XVII dan penerimaan monopoli VOC di Banjarmasin menciptakan struktur yang baru dan menggantikan struktur sebelumnya. Sementara itu, penaklukan pesisir utara Jawa dan Kalimantan oleh Kerajaan Mataram dan perubahan orientasinya menjadi kerajaan feodal yang agraris di pedalaman mengakhiri dinamika perkapalan pantai di sepanjang sisi selatan Laut Jawa. Keduanya ini menjadi pemicu berakhirnya dinamika perairan dan perdagangan rempah dari Maluku yang kemudian menjadi monopoli mutlak VOC.

Dengan keberhasilannya menegakkan hegemoni perkapalan di Laut Jawa, VOC tidak merasa perlu untuk mencari alternatif lain. Dalam kekuasaannya yang ditopang kekuatan armada, VOC mampu mengamankan jalur ekspor rempah dari Maluku ke luar Nusantara, terutama sejak perebutan Malaka dari tangan orang Portugis pada tahun 1641, praktis tidak ada hambatan bagi VOC untuk mengirimkan hasil eksploitasi dari politik monopolinya di Maluku. Ancaman perompakan yang muncul bagi kapal-kapalnya di perairan Selat Kalimantan dianggap tidak terlalu mengganggu tonase perkapalannya, karena VOC tidak melihat selat itu dan perairan di Kalimantan Utara sebagai jalur perkapalannya. Kepentingan VOC di perairan itu hanya terbatas pada kepentingan lokal dan sekunder yang bisa menambah variasi pengangkutan produknya di samping komoditas rempah dan komoditas pangan dengan produk hutan.

Akan tetapi, fenomena yang muncul dan masih ada selama hegemoni VOC tetap menjadi faktor yang ikut berkontribusi bagi sejarah perkapalan di Indonesia. Perompakan laut yang mulai tumbuh pada abad XVI dengan cepat menyebar ke segala penjuru seiring dengan penyebaran luas para pendukung utamanya, yaitu orang-orang Bugis dan Makassar. Dengan pola pembentukan diaspora di mana-mana, aksi perompakan juga meluas dan mengiringi pembangunan pangkalan serta permukiman Bugis. Hal ini tidak bisa dibendung oleh kekuatan armada VOC dan akan menjadi tantangan besar dalam kebijakan kolonialnya sepanjang abad XVIII dan XIX di seluruh Indonesia.

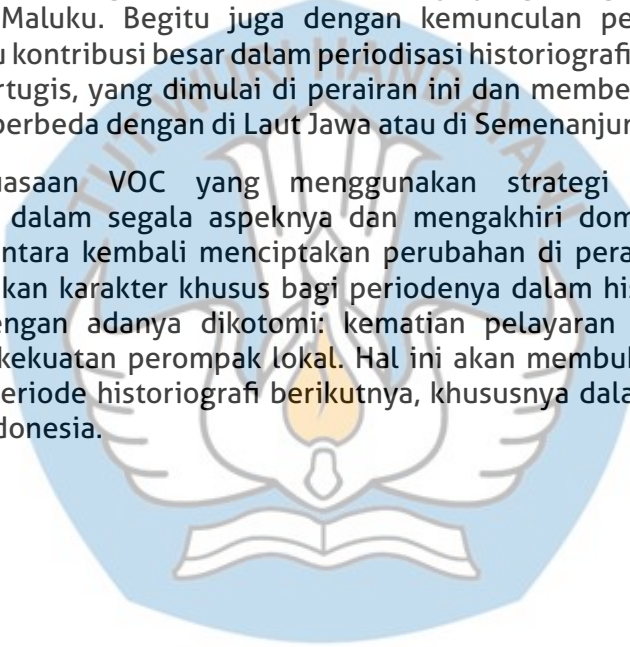
— Bagi historiografi Indonesia, perompakan yang awalnya muncul dari jalur perkapalan rempah di utara ini menjadi suatu objek penelitian khusus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Daya tarik darinya adalah bahwa baik lokasi maupun pola aktivitasnya sampai sekarang ini masih tetap berlaku. Beberapa kasus perompakan di perairan Filipina Selatan dan penculikan para pelaut Indonesia menunjukkan pola dan hubungan yang sama antara kegiatan perompakan dan perbudakan di masa lalu.

Secara garis besar, keberadaan dan dinamika di jalur pelayaran perkapalan Kalimantan dan Sulawesi Utara menunjukkan suatu gambaran tentang pola umum yang berlaku dalam historiografi Indonesia berdasarkan periodisasinya. Dengan pembagian periode berdasarkan dominasi rezim, jalur ini memberikan salah satu karakternya. Era sebelum kedatangan orang Barat, ketika perdagangan Indonesia didominasi oleh kekuatan laut Islam dan kerajaan-kerajaan Hindu terakhir, memberikan

warna khusus di jalur ini dengan tumbuhnya kekuatan lokal, seperti Brunei, Kutai, dan Sulu yang identik dengan kekuatan ekonomi yang dominan pada masa itu.

Kedatangan dan kekuasaan Portugis di Malaka telah menjadikan jalur tersebut memiliki fungsi khusus, karena letaknya yang menghubungkan Malaka dan Maluku. Begitu juga dengan kemunculan perompakan menjadi suatu kontribusi besar dalam periodisasi historiografi Indonesia untuk era Portugis, yang dimulai di perairan ini dan memberikan pola konflik yang berbeda dengan di Laut Jawa atau di Semenanjung Melayu.

Era kekuasaan VOC yang menggunakan strategi monopoli perdagangan dalam segala aspeknya dan mengakhiri dominasi laut lokal di Nusantara kembali menciptakan perubahan di perairan utara dan memberikan karakter khusus bagi periodenya dalam historiografi Indonesia dengan adanya dikotomi: kematian pelayaran lokal dan kebangkitan kekuatan perompak lokal. Hal ini akan membuka wacana baru dalam periode historiografi berikutnya, khususnya dalam sejarah maritim di Indonesia.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

MURI HANDA



Bala Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip dan Buku

Aa, Pieter van der. 1707. *Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee en Land-reysen, na Oost en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking enn soo vervolgens van Verscheyde Volkeren, meerendels door Vorsten, op Maatschappyyen Derwaarts gefonden, gedaan, Zedert het Jaar 1506 tot 1508.* Leiden: St. Pieters Koorsteeg.

----- . 1727. *De doorlugtige scheeps-togten der Portuguysen na Oost-Indien*, tweede stuk. Leiden: St. Pieters Koorsteeg.

Adhyatman, Sumarah. 1990. *Antique Ceramics Found in Indonesia: Various Uses and Origins.* Jakarta: Ceramics Society of Indonesia.

Ahmad. 1978. *Perompak Lanun.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Akhmar, Andi Muhamad. 2018. *Islamisasi Bugis: Karya Sastra atas La Galigo versi Bottinna I La Dewata Sibawa I We Attaweq.* Jakarta: Penerbit Obor.

Alberda, J. J. 1862. *Schets der Handelsgeschiedenis.* Amsterdam: P. N. van Kampen.

Amal, M. Adnan. 2016. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950.* Jakarta: KPG.

Amirell, Stefan Ekloff. 2019. *Pirates of Empire: Colonization and Maritime Violence in Southeast Asia.* New York: Cambridge University Press.

- Anonim. 1666. *Javaansche Reyzen gedaen van Batavia over Samarangh na de Koninklijke hoofdplaets Mataram in 1646*. Doordrecht: Boekverkooper.
- Bailey, Katherine. 1980. *Vasco da Gama: Quest for the Spice Trade (In the Footsteps of Explorers)*. New York: Crabtree Publishing Company.
- Bala, Bilcher. 2005. *Thalassocracy: A History of Medieval Sultanate of Brunei*. Sabah: Universiti Malaysia Sabah.
- Bascar, Clemencio Montecillo. 2003. *Sultanate of Sulu the Unconquered Kingdom: A Razor Sharp and Bold Inquiry into the Dark Side of History*. Zamboanga City: The University Press.
- Bickmore, Albert S. 1873. *Reizen in den Oost-Indischen Archipel, eerste deel*. Schiedem: H. A. M. Roelants.
- Biran, Michal. 2020. "Introduction" dalam Michal Biran, Jonathan Brack, dan Francesca Fiaschetti (eds.), *Along the Silk Roads in Mongol Eurasia: Generals, Merchants, and Intellectuals*. Oakland: University of California Press.
- Blusse, Leonard. 2001. "Queen among Kings: Diplomatic Ritual in Batavia" dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas (eds.), *Jakarta: Socio-cultural Essays*. Leiden: KITLV Press.
- Boek, H. 1850. "Algemeen Geschiedenis van Java" dalam *Indisch Tijdschrift*, jilid II.
- Borschberg, Peter. 2016. "Batu Sawar Johor: A Regional Centre of Trade in the Early Seventeenth Century" dalam Ooi Keat Gin dan Hoang Anh Tuan (eds.), *Early Modern of Southeast Asia 1350–1800*. New York: Routledge.
- Bos, R. 1897. *Oost Indie en de Wereldeelen: een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van de landen buiten Europa*. Groningen: P. Noordhoff.
- Branco, Manuel Bernardes. 1879. *Portugal e Os Estrangeiros*. Lisboa: Livraria de A. M. Pereira.
- Breezeale, Kennon, 1999. *From Japan to Arabia: Ayutthaya's Maritime Relations with Asia*. Bangkok: Toyota Foundation.
- Brierley, Joanna Hall. 1994. *Spices: The Story of Indonesian Spice Trade*. Oxford: Oxford University Press.

Bruin, D. C. de. 1863. *Geschiedenis der Nederlanders in den Oost Indische Archipel, eerste stuk van 1593 tot 1723*. Batavia: G. Kolff en Co.

Brunei. 1955. *Annual Report*. London: H.M. Stationery Office.

----- . 2004. *Brunei Darussalam*. Bandar Sribegawan: Ministry of Finance.

Chapman, F. M. dan Charles C. Chapman. 1887. *The American Encyclopaedia of Practical Knowledge Containing Practical and Sistematic Treatises*. Chicago: Law, King and Law Publ.

Chijs, J. A. van der. 1886. *De vestiging van het Nederlandsche Gezag over de Banda eilanden, 1599–1621*. Batavia: Albrecht en Co.

Coedes, G. 1968. *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Colenbrander, H. T. 1898. *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia 1610–1683*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Colonial Office. 1950. *Annual Report on Brunei for the Year 1950*. London: H.M. Stationery Office.

Cordingly, David dan John Falconer. 1992. *Pirates: Fact and Fiction*. London: Collins and Brown.

Corteseo, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires, Volume 1*. London: The Hakluyt Society.

Cottrell, P.L. dan D.H. Aldcroft (eds.). 1981. *Shipping, Trade and Commerce: Essays in Memory of Ralph Davis*. Leicester: Leicester University Press.

Crawfurd, John. 1825. *De Indische Archipel, derde deel*. Haarlem: de Wed. A. Loosjes.

Cribb, Robert. 2000. *Historical Atlas of Indonesia*, London: Curzon Press.

Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1981. *Seminar Sejarah Nasional III, Seksi Pasca Kuno*. Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan.

Dijk, Mr. L. C. D. van. 1862. *Neerland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchina*. Amsterdam: J. H. Scheltema.

Doren, J. B. J. van. 1860. *Herinneringen en Schetsen van Nederlands Oost-Indie uit de reizen van drie gewesten*. Amsterdam: J. D. Sibrandy.

Eklof, Stefan. 2006. *Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia's Maritime Marauders*. Copenhagen: NIAS Publ.

- Evans, I. H. N. 1953. *The Religion of the Tempasuk Dusuns of North Borneo*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fernandez-Armesto, Felipe. 1995. *The Global Opportunity*. London: Routledge.
- Fissel, Mark Charles. 2006. *Amphibious Warfare 1000–1700: Commerce, State Formation and European Expansion*. Leiden: Brill.
- Fling, Fred Morrow. 1899. *Outline of Historical Method*. Lincoln: J. H. Miller.
- Forshee, Jill. 2006. *Culture and Custom of Indonesia*. Westport, Conn.: Greenwood Press.
- Francis, Peter. 2002. *Asia's Maritime Bead Trade 300 BC to the Present*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Frey, Edward. 2010. *The Kris: Mystic Weapon of Malay World*. Oxford: Oxford University Press.
- Gabriel, Theodore P. C. 1996. *Hindu-Muslim Relations in North Malabar, 1498–1947*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Garraghan, Gilbert J. 1946. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gin, Ooi Keat (ed.). 2004. *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Greig, Doreen E. 1987. *The Reluctant Colonists: Netherlanders abroad in 17th and 18th Centuries*. Assen: van Gorkum.
- Gupta, Arun Das. 2001. "The Maritime Trade of Indonesia: 1500–1800" dalam Paul H. Kratoska (ed.), *Southeast Asia: A Colonial History*. London: Routledge.
- Hall, Kenneth R. 2019. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Harthoorn, S. E. 1873. *De grondlegging van Batavia*. Batavia: Ernst en Co.
- Hedman, Eva-Lotta E. and John T. Sidel. 2000. *Philippine Politics and Society in Twentieth Century: Colonial Legacies, Post-Colonial Trajectories*. London: Routledge.
- Heng, Derek. 2009. *Sino-Malay Trade and Diplomacy from the Tenth through the Fourteenth Century*. Ohio: Ohio University Press.

- Henriques, Antonio. 2017. "The Reconquista and Its Legacy, 1000–1348" dalam Dulce Freire dan Pedro Lains (eds.), *An Agrarian History of Portugal, 1000–2000; Economic Development on the European Frontier*. Leiden: Brill.
- Herzog, Shawna R. 2021. *Negotiating Abolition: The Antislavery Project in the British Straits Settlements, 1786–1843*. New York: Bloomsbury Academic.
- Hoevel, G. W. W. C. Baron van. 1871. "Over de middelen tot herstel van de welvaart en tot ontwikkeling der Ambonsche bevolking" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.
- Hollander, J. J. de. 1869. *Handleiding bij de Beoefening der Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie, tweede deel*. Breda: Gebroeders NYS.
- Howe, Helen dan Robert T. Howe. 1992. *The Medieval World*. Harlow: Longman Publishing Group.
- Hoyt, Sarnia Hayes. 1993. *Old Malacca*. Oxford: Oxford University Press.
- Hunter, Robert. 1887. *The Encyclopaedic Dictionary, Vol. VI*. London: Cassell & Company.
- Irwin, John. 1966. *Studies in Indo-European Textile History*. New Delhi: Calico Museum of Textile.
- Iskandar, Yusoff. 2005. *Parameswara, Pengasas Empayar Malaka*. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia.
- Jacobs, Els M. 2006. *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Jayapalan, N. 2008. *Historiography*. New Delhi: Atlantic.
- Jenkins, Jr. Everett. 1999. *The Muslim Diaspora: A Comprehensive Reference to the Spread of Islam in Asia, Africa, Europe and the America, Volume 2 (1500-1799)*. Jefferson: McFarland.
- Jonge, J. K. J. de. 1862. *De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie (1595–1610), eerste deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- _____. 1870. *De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, vijfde deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Junker, Laura Lee. 1999. *Raiding, Trading, and Feasting: The Political Economy of Philippine Chiefdoms*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan Karangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keijzer, S. 1858. *Francois Valentijn's oud en nieuw Oost-Indien*. 's Gravenhage: H. C. Suson.
- Kernkamp, J. H. 1937. *De reis om wereld van Olivier van Noort 1598–1601*. Amsterdam: P. N. van Kampen en Zoon.
- Kielstra, E. B. 1917. *De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen archipel*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- King, Victor T. 2013. *Kalimantan Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Klerk, J. E. de. 1864. *Batjan*. Batavia: Lange en Co.
- Knaap, Gerrit. 2002. "Kora-Kora en kruitdamp: de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in oorlog en vrede in Ambon" dalam Gerrit Knaap dan Ger Teitler (eds.), *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie*. Leiden: KITLV Pers.
- 2004. "De Ambonse eilanden tussen twee mogendheden: De VOC en Ternate, 1605–1656" dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Peter Rietbergen (eds.), *Hof en Handel: Aziatische vorsten en de VOC, 1620–1720*. Leiden: KITLV Press.
- Krooneman, H. A. 1860. *Aardrijkskunde der Nederlandsche bezittingen buiten Europa*. Utrecht: J. J. H. Kemmer.
- Lach, Donald Frederick. 1965. *Asia in the Making of Europe: The Century of Discovery, Two Volumes*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lambdin, Dewey. 2004. *The Captain's Vengeance: An Alan Lawrey Naval Adventure*. New York: Thomas Dunne Books.
- Lapian, Adrian B. 2010. "Violence and Armed Robbery in Indonesian Seas" dalam John Kleinen dan Manon Osseweijer (eds.), *Pirates, Ports and Coasts in Asia*. Singapore: ISEAS.
- Leur, J. C. van. 1967. *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. The Hague: W. van Hoeve Publ.
- Lewis, Angeline. 2019. *Rajah Brooke's Borneo: The Nineteenth Century World of Pirate and Headhunters, Orangutan and Hornbills and Other Such Rarities as Seen through the Illustrated London News And Other Contemporary Sources*. Canberra: UNSQ Press.

- Liss, Carolin. 2010. "Contemporary Maritime Piracy in Waters of Semporna, Sabah" dalam John Kleinen and Manon Ossewijer (eds.). *Pirates, Ports and Coasts in Asia*. Singapore: ISEAS.
- Lloyd, Christopher. 1989. *The Structures of History*. Oxford: Blackwell.
- Martha Howell and Walter Prevenier, 2001, *From Reliable Resources: An Introduction to Historical Method*. Ithaca: Cornell University.
- Mees, Cornelis Alting. 1935. *De kroniek van Koetai: Tekstuitgave met toelichting*. Santpoort: N.V. Uitgeverij van het C.A. Mees.
- Meglio, Rita Rose Di. 1970. "Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 8th Century" dalam D. S. Richard (ed.), *Islam and the Trade of Asia: A Colloquium*. London: Spottiswoode, Ballantyne & Co. Ltd.
- Meinsma, J. J. 1872. *Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, eerste deel*. Delft: Joh. Ijkema.
- Meyn, Matthias. 1984. *Die Grossen Entdeckungen*. München: C.H. Beck.
- Miksic, John N. 2004. *Early Singapore, 1300s–1819: Evidence in Map, Text, and Artefacts*. Singapore: Singapore International Museum.
- Mollema, J. C. 1937. *De Reis om de Wereld van Olivier van Noort 1598–1601*. Amsterdam: P. N. van Kampen.
- Mulyana, Agus. 1996. "Pergumulan Elite Sunda pada Masa Revolusi: Kasus Berdiri dan Bubarnya Negara Pasundan 1947–1950" dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996: Subtema Pemikiran dan Analisis Teks Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Natasha Stacey, Dirk J. Steenbergen, Julian Clifton and Greg Acciaollu, "Understanding Sosial Wellbeing and Values of Small-scale Fisheries amongst the Sama Bajau of Archipelagic Southeast Asia" dalam Derek S. Johnson, Tim G. Acott, Natasha Ellen Tanya Stacey, dan Julie Urquhart (eds.) *Social Wellbeing and the Values of Small-scale Fisheries*. Cham: Springer Nature.
- Newson, Linda A. 2009. *Conquest and Pestilence in the Early Spanish Phillipines*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Noonan, Laurence A. 1989. *John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque*. Lisabon: Instituto de Investigação Científica Tropical.
- Noorduyn, J. 1972. *Islamisasi Makassar*. Jakarta: Bhratara.

- Ozinga, J. 1940. *De economische ontwikkeling der Westerafdeeling van Borneo en de bevolkingsrubbercultuur*. Wageningen: Zomer en Keuning.
- Panikkar, Kavalam Madhava. 1929. *Malabar and the Portuguese: Being a History of the Relations of the Portuguese with Malabar from 1500 to 1663*. Bombay: D.B. Taraporevala Sons and Co.
- Parry, J.H. 1966. *The Spanish Seaborne Empire*. London: Hutchinson and Co.
- Pecson, Evaristo Casiano. 1945. *Bitter Tears of Mother Philippines*. Stockton, CA: Muldowney.
- Pigafetta, Antonio. 1994. *Magellan's Voyage: A Narrative Account of the First Circumnavigation*. New York: Dover Publ.
- Ras, J. J. 1968. *Hikajat Bandjar*. Leiden: Brill.
- Rassers, W. H. 2012. "Kutai" dalam M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset, dan R. Hartmann (eds.), *Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913–1936)*. Leiden: Brill.
- Reid, Struan. 1994. *The Silk and Spice Routes: Invention and Trade*. Halifax: Maritext.
- Reine, Ronald Prud'homme van. 2009. *Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot*. Amsterdam: De Arbeiderspers.
- Ricklefs, Merle Calvin. 1981. *A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the Present*. Bloomington: Macmillan Press.
- Rogge, H. C. 1895. *De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indie en Cornelis de Houtman*. Leiden: E. J. Brill.
- Runciman, Steven. 2009. *White Rajahs: A History of Sarawak from 1841 to 1846*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salafsky, Nick. 1993. *The Forest Garden Project: An Ecological and Economic Study of Locally Developed Land-Use System in West Kalimantan*. North Carolina: Duke University Press.
- Salam, Aziz dan Katsuya Osozawa. 2008. "Technological Adaptation in the Transformation of Traditional Boats in the Spermonde Archipelago, South Sulawesi" dalam *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, jilid 46.
- Sammis, Kathy. 2002. *The Era of Expanding Exchange and Encounter 300–1000 CE*. Portland: J. Weston Walch.

- Sanchez, D. Miguel. *Las posesiones holandesas en el archipiélago de la India*. Manila: De Los Amigos del Pais.
- Sarangani, Datumanong Ampaso. 1975. *Islamic Penetration in Mindanao and Sulu*. Marawi City: University Research Center, Mindanao State University.
- Sather, Clifford. 1997. *The Bajau Laut: Adaptation, History and Fate in a Maritime Fishing Society of South-eastern Sabah*. Oxford: Oxford University Press.
- Saunders, Graham. 2002. *A History of Brunei*. Oxon: Routledge Curzon.
- Schrieke, B. 1960. *Indonesian Sociological Studies: Selected Writing, Part One*. Bandung: W. van Hoeve.
- Sewang, Ahmad M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Shumatoff, Alex. 2017. *The Wasting of Borneo: Dispatches from a Vanishing World*. Boston: Beacon Press.
- Silva, J.M. Pereira da. 2011. *Obras litterarias e Politicas*. South Carolina: Nabu Press.
- Sim, Y.H. Teddy (ed.). 2014. *Piracy and Surreptitious Activities in the Malay Archipelago and Adjacent Seas 1600–1840*. Singapore: Springer.
- Simkin, C. G. F. 1968, *The Traditional Trade of Asia*. Oxford University Press.
- Simonis, Damien. 2003. *Spain*. Tennessee: Lonely Planet.
- Singh, Ranjit. 2000. *The Making of Sabah, 1865–1941: The Dynamics of the Indigenous Society*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Sjahbandi. 1996. *Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Bajau*. Samarinda: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur.
- Sousa, Pedro de. 1767. *Elementos da Historia: Traduzida da lingua Francaza*. Lisboa: Livraria Castro e Silva.
- Stanford Research Institute. 1975. *City Size and Quality of Life*. Washington: National Science Foundation.
- Stauth, Georg. 2002. *Politics and Cultures of Islamization in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in the Nineteen-nineties*. Bielefeld: Verlag.

- Stavrianos, Lefen Stavros. 1988. *The World to 1500: A Global History*. London: Prentice Hall.
- Stenross, Kurt. 2011. *Madurese Seafarers: Prahus, Timber and Illegality on the Margins of the Indonesian State*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Stephens, H. Morse. 2000. *Rulers of India: Albuquerque*. New Delhi: Asian Educational Service.
- Sturler, J. E. de. 1881. *Het grondgebied van Nederlandsch Oost Indie in verband met tractaten met Spanje, Engeland en Portugal*. Leiden: P. Sommerwil.
- Sukendar, Haris. 1998. *Perahu Tradisional Nusantara: Tinjauan melalui Bentuk dan Fungsi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sulistiyono, Singgih Tri. 2003. *The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s–1970s*. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Tagliacozzo, Eric and Wen-chin Chang (eds.). 2011. *Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia*. Durham dan London: Duke University Press.
- Teenstra, M. D. 1846. *Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen*. Groningen: J. Oomkens en J. Zoon.
- Terwogt, Wilhelmus Albertus. 1892. *Het Land van Jan Pieterszoon Coen: Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië*. Hoorn: P. Geerts.
- UNCTAD/GATT. 1970. *Market for Spices in North America, Western Europe and Japan*. Geneva: International Trade Centre.
- Veth, P. J. 1854. *Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch*. Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon.
- _____. 1878. *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, tweede deel. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- _____. 1912. *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, eerste deel. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Vienne, Marie-Sybille de. 2015. *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*. Singapore: NUS.

Vliet, L. Van Woudrichem van. 1879. *Regtsvragen over nederzettingen van niet-Nederlanders in den Nederlandsch-Indischen archipel, tweede stuk*. 's Gravenhage: Gebr. Belinfante.

Walcott, Arthur Stuart. 1914. *Java and Her Neighbours: A Traveller's Notes in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra*. New York: G. P. Putnam's Sons.

Wallace, Alfred Russel. 1869. *The Malay Archipelago: The Land of the Orang-utan, and the Birds of Paradise*. New York: Harpers and Brothers.

Warren, James Francis. 2002. *Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and Birth of Ethnicity*. Singapore: Singapore University Press.

Warren, James Francis. 2007. *The Sulu Zone 1768–1898: The Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State*. Singapore: NUS Press.

Webster, Noah. 1857. *An American Dictionary of English Language*. Philadelphia: J. B. Lippincott and Co.

Weiss, E. A. 2002. *Spice Crops*. Wallingford, Oxon: CABI Publishing.

Wierbitsky, Otto Julius Bernhard von Corvin. 1884. *De tachtigjarige oorlog der Nederlanders tegen Spaansche Overheersching, eerste deel*. Amsterdam: M. H. Binger.

Winstedt, Richard. 1958. *Malaya and Its History*. New York: Hutchinson.

Wolbers, J. 1868. *Geschiedenis van Java, eerste deel*. Utrecht: Kemink en Zoon.

Zaide, Gregorio F. 1949. *The Philippines since Pre-Spanish Times*. Manila: R. P. Garcia.

2. Surat Kabar

De Gids, tahun 1879, jilid III.

De Ingenieur, tanggal 12 Desember 1896.

De Java Post, tanggal 1 April 1921, nomor 13.

De Nederlandsche Hermes, tahun 1828, nomor 7.

De Werkmanbode, tanggal 15 Januari 1879.

Het Katholieke Missien, tahun ke-50, Juli 1925.

3. Artikel Majalah

- Anonim. 1838. "Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 2.
- Anonim. 1843. "Het Nederlandsch Gouvernement van Makasser op het eiland Celebes" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.
- Anonim. 1845. "Aanteekeningen van het geen de Engelschen, Franschen en Spanjaarden onlangs verricht hebben en nog verrigten, ten aanzien van Solok en het gedeelte van Borneo, dat onder Borneo proper of Solok behoort" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 4.
- Anonim. 1846. "Geschiedkundig overzicht van Moluksche Eilanden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, volume 5.
- Anonim. 1848. "Beknopte geschiedenis van het Makassarsche Celebes en Onderhoorigheden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, volume 10, jilid 1.
- Anonim. 1850. "Bijdragen tot de kennis van den Soeloesen Archipel" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 2.
- Anonim. 1850. "De Rijken en Vorsten van het Gouvernement van Makassar" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.
- Anonim. 1854. "Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, volume 16, jilid 2.
- Anonim. 1855. "Berigten omtrent de Zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel" dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap*.
- Anonim. 1855. "Het Eiland Flores" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 2.
- Anonim. 1856. "John Dalton en zijne berigten over Koeti en den majoor Muller" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 2.
- Anonim. 1866. "Beschrijving der zeden en gewoonten van de bewoners der Minahasa door de Gouverneur der Molukken Robertus Padtbrugge in 1679" dalam *Bijdragen Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Anonim. 1867. "De Onderhoorigheden van Madjapahit" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.

- Anonim. 1876. "De zeeroof in den Indischen Archipel" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 2.
- Anonim, 1885. "Minahasa-Menado" dalam *Maandbericht van het Nederlandsch Zendelingsgenootschap*, nomor 5.
- Anonim. 1905. "Het landschap Pasir" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 58.
- Bock, Carl. 1880. "Reis in Oost en Zuid Borneo" dalam *Notulen Bataviaasch Genootschap*, vol. XVIII.
- Delken, H. E. 1864. "Schets eener geneeskundige plaatsbeschrijving van district Margasari (Zuid en Ooster Afdeeling Borneo)" dalam *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*.
- Fraasen, C. van. 1976. "Drie Plaatsnamen uit Oost Indonesie in Nagara Kertagama: Galiyao, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 132.
- Gallois, J. G. A. 1856. "Een korte aantekening gemaakt in een reis langs het Oostkust van Borneo in de bevel van de Nederlandsch Gouvernement" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Hageman Jcz., J. 1852. "Geschiedenis van verovering der Malacca en der oorlogen tusschen Portugeezen en Maleijers" dalam *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.
- 1861. "Geschiedkundige aantekeningen omtrent zuidelijk Borneo". dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, 23rd Jaargang.
- Kemp, P. H. van der. 1899. "Raffles' Bezetting van Lampongs in 1818" dalam *Bijdrage Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Kern, H. 1905. "Eenige plaatsen uit de Negarakertagama betreffende Hayam Wuruk" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 58.
- Knappert, S. C. 1905. "Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI), Vol. 58.

- Kniphorst, J. H. P. E. 1882. "Historische Schets van de Zeeroof in den Oost Indischen Archipel" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, volume 1.
- Knoop, W. J. 1888. "Beschouwingen over onze Indische krijgsgeschiedenis, deel I" dalam *De Gids*, volume 24, jilid II.
- Kreemers, J. 1983. "De Javaans en zijn hoenders" dalam *Mededeelingen van Nederlandsch Zendingsgenootschap*.
- Mijer, J. E. 1909. "Minahasa en Noord Celebes" dalam *De Indische Gids*, jilid 31, vol. II.
- Musschenbroek, S. C. J. W. van. 1880. "Toelichtingen behorende bij de kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en aangrenzende landen" dalam *Tijdschrift van Aardrijkskundige Genootschap*, jilid IV.
- Nieuwkuijk, I. van. 1883. "Exploitatie van Nederlanders van de Noordoostkust der Borneo" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.
- Rees, W. A. van. 1866. "Eene bijdrage tot de Indische krijgsgeschiedenis door A. J. A. Gerlach" dalam *De Gids*, jilid 3, tahun ke-4.
- Riedel, J. G. F. 1869. "Het oppergezag der vorsten van Bolaang over de Minahasa (Bijdrage tot de Kennis der oude Geschiedenis van Noord Selebes" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Tiele, P. A. 1876. "De Europeers in den Malayschen Archipel 1509–1529" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 24.
- . 1881. "De Europeers in den Maleischen Archipel, vijfde gedeelte, 1578–1599" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, jilid 29.
- Tromp Jr, S. W. 1889. "Een reis naar de bovenlanden van Koetei (11 Augustus–15 September 1885)" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (Bataviasch Genootschap)* XXXII: 273-304.
- Tromp, S. W. 1887. "Eenige Mededeelingen omtrent de Boegineezen van Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 36.

- . 1888. "Uit de salasila van Koetei" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Veth, P. J. 1867. "De Onderhoorigheden van Madjapahit buiten Java" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, jilid 1.
- . 1870. "De Koeteisch Vorstenhuis" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (TNI)* II.
- . 1870. "De zeerooverij in den Indischen Archipel", dalam *Tijdschrift voor Ned. India*, jilid 1.
- Vogel, J. Ph. 1918. "The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo)" dalam *Bijdragen tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*.
- Wall, H. von de. 1850. "Vervolg extract van Dagelijke Aanteekening der Civiel Gezaghebber voor Koetei en Oostkust van Borneo" dalam *De Indisch Archief*, jilid III.
- Weddik, A. L. W. 1848. "Extract van de dagelijksche aanteekeningen van den civielen gezaghebber voor Koetei en de Oostkust van Borneo, H. von Dewal" dalam *Indisch Archief*, jilid I.
- Witkamp, H. 1914. "Een bezoek aan eenige oudheden in Koetei" dalam *Tijdschrift van het Koninklijke Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, tahun 1914, vol., XXXI
- Zwager, J. 1866. "Koetai in Oost Borneo in 1853" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, vol. 2.
-

4. Internet

[https://en.wikipedia.org/wiki/Junk_\(ship\)#/media/File:Kangxi-Reise.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Junk_(ship)#/media/File:Kangxi-Reise.jpg), (akses 17/11/2021 pukul 20:30)

<http://hdl.handle.net/1887.1/item:817557> (akses 17/11/2021 pukul 20:45)

www.sejarah-nusantara.anri.go.id (akses 17/11/2021 pukul 20:35)

MURI HANDA



Bala Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

TENTANG PENULIS



JUNIAR PURBA

Juniar Purba adalah salah seorang tenaga fungsional di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan. Lahir pada tahun 1964 di Simalungun. Menamatkan S-1 Ilmu Sejarah dari Universitas Sumatera Utara (USU, 1988) dan S-2 pada Jurusan Sosiologi Universitas Tanjungpura (2008) dengan tesis berjudul "Fungsi dan Makna Simbol dalam Tradisi Imlek dan Cap

Go Meh pada Masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak". Melakukan sejumlah penelitian kesejarahan dan budaya di wilayah Kalimantan serta aktif dalam kegiatan ilmiah. Pada tahun 1999/2000 aktif di Badan Pembina Pahlawan Daerah (BP2D) wilayah Kalimantan Barat. Tulisan yang dihasilkan antara lain *Rahadi Osman: Riwayat Hidup, Pengabdian dan Perjuangannya* (1993/1994); *Bardan Nadi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (1994); *Ali Anyang Riwayat Hidup dan Pengabdiannya* (1995/1996); *J.C. Oevaang Oeray: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya* (1996); *Pangsuma: Riwayat Hidup dan Pengabdian* (1998/1999); *Sejarah Sosial Kota Pangkalan Bun* (2004); *Orang Kantuk di Bika* (2006); *H. Oemar Dachlan (Tokoh Pers Kalimantan Timur)* (2007); *Riwayat Hidup dan Perjuangan Awang Long di Kalimantan Timur* (2010); *Pelabuhan Tanjung Laut di Bontang* (2011); *Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan* (2011); *Adat dan Tradisi Masyarakat Suku Dayak Kayan di Miau Baru, Kalimantan Timur* (2012); *Elite dalam Struktur Politik di Bera* (2014); *Sejarah dan Pengaruh Islam di Kotawaringin* (2014); *Masyarakat*

Bugis Diaspora di Bontang (2015); Pelabuhan Silo di Berau (2015); Integrasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Jawa di di Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan (2018); Integrasi Sosial Transmigran Bali di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara 1980–2000-an (2018); George Obus: Tokoh Persatuan dari Kalimantan Tengah (1923–1960) (2019); Pemikiran Pangeran Mohamad Noor dalam Persatuan dan Pembangunan di Kalimantan Selatan (1923–1959) (2019); Budaya Sungai pada Masyarakat Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (2020) dan beberapa tulisan lainnya. Tahun 2008–2012 sebagai tenaga pengajar di Program Studi Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Pontianak; tahun 2016 sebagai tenaga pengajar di Universitas Tanjungpura dan aktif sebagai narasumber dan juri lomba di Dinas Arsip Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Juniar Purba bisa dihubungi melalui alamat surel niar.gambir@yahoo.com.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Yusri Darmadi lahir di Dumai (Riau), 30 Juli 1981. Menamatkan pendidikan S-1 di Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai Pamong Budaya Ahli Pertama bidang Kesejarahan di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Beberapa karya ilmiahnya antara lain "Terorrism in Southeast Asia: Unique

Characteristics and Appropriate Solutions" (HPAIR Seoul Paper, 2003); "Kuntowidjojo: Sebuah Biografi (1943–2005) (Skripsi, 2009); *Sejarah Pelabuhan Silo di Teluk Bayur Berau (1912–1957)* (Bersama Tim, Penelitian, 2015); *Diaspora Masyarakat Cina di Sampit pada 1847 sampai 1942* (Bersama Tim, Penelitian, 2016), "*Nieuw Brussel*" di Kalimantan: *Peran Strategis Sukadana pada Abad Ke-19* (Bersama Tim, Penelitian, 2017), *Patheku Isen Mulang: Dinamika Pemikiran Tjilik Riwut* (2019), *Ibnu Hadjar: Pemikiran dan Kekecewaan dalam Perjuangan* (2019), *Selayang Pandang IPDN Kampus Kalimantan Barat* (2020). Nomor WhatsApp (WA): 08115630781. Facebook: Yusri Darmadi. Instagram: yusr1. Surat elektronik: yusri.darmadi@kemdikbud.go.id dan yusri.darmadi@gmail.com.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

MURI HANDA



Bala Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

PERNIAGAAN REMPAH

DI PERAIRAN TIMUR DAN TIMUR LAUT
KALIMANTAN

ABAD XVI DAN XVII

Perairan Kalimantan, khususnya sepanjang pantai Kalimantan Timur dan Utara telah menjadi wahana bagi kegiatan kemaritiman sejak milenium pertama Masehi. Keberadaan dan arti pentingnya tidak bisa dilepaskan dari konteks pengangkutan rempah, terutama yang menghubungkan Bandar Malaka di sisi barat dan Maluku di sisi timur.

Buku ini banyak menguak dinamika pelayaran, jalur pelayaran, dan perdagangan di perairan timur dan timur laut Kalimantan sejak sebelum kedatangan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) hingga era menguatnya dominasi orang Eropa terhadap pelayaran dan perdagangan di Hindia Timur atau Nusantara. Dinamika aktivitas maritim di kawasan tersebut dipaparkan dengan pembagian periode berdasarkan dominasi rezim berikut karakternya.

Era sebelum kedatangan orang Barat, ketika perdagangan Indonesia didominasi oleh kekuatan laut Islam dan kerajaan-kerajaan Hindu terakhir, memberikan warna khusus di jalur ini dengan tumbuhnya kekuatan lokal, seperti Brunei, Kutai, dan Sulu yang identik dengan kekuatan ekonomi yang dominan pada masa itu.

Kemudian, kedatangan dan kekuasaan Portugis di Malaka menjadikan jalur tersebut memiliki fungsi khusus, karena letaknya yang menghubungkan Malaka dengan Maluku. Kemunculan perompakan yang dimulai di perairan ini juga menjadi suatu kontribusi besar dalam periodisasi historiografi Indonesia untuk era Portugis. Kemunculan mereka menciptakan pola konflik yang berbeda di kawasan ini dengan di Laut Jawa atau di Semenanjung Melayu.

Era kekuasaan VOC yang menggunakan strategi monopoli perdagangan dalam segala aspeknya dan mengakhiri dominasi laut lokal di Nusantara kembali menciptakan perubahan di perairan utara dan memberikan karakter khusus dengan adanya dikotomi: kematian pelayaran lokal dan kebangkitan kekuatan perompak lokal.



Padalarang-Bandung
Telp. +62 812 22205182

Email: penerbitmja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ISBN 978-623-7526-58-2



9 786237 526582